

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru di tahun 1998, etnis Tionghoa di Indonesia mendapatkan kebebasan mengekspresikan budaya mereka. Perubahan ini merupakan perubahan yang cukup mendasar dan berpengaruh terhadap etnis Tionghoa dalam memandang diri dan komunitasnya. Meski diskriminasi lambat laun mulai dihapus, pada masa pasca Orde Baru sekarang ini, permasalahan etnis Tionghoa tetap merupakan permasalahan yang penting, dalam kaitannya dengan kesatuan bangsa Indonesia. Lamanya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang terjadi pada masa Orde Baru membuat usaha pemulihan hubungan antar etnis bukanlah suatu hal yang mudah. Contoh-contoh peristiwa diskriminatif yang terjadi pasca-Orde Baru antara lain: pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tanggal 12 Oktober 2004 tentang perusahaan golongan ekonomi lemah yang dikatakan sebagian besar terdiri dari orang Indonesia asli—mengenai akan dibedakannya perlakuan terhadap kelompok pengusaha; peristiwa Garut tanggal 3 Juli 2002, ketika itu orang Tionghoa diminta menanggung renteng utang Acun—agar “tidak menimbulkan kerusuhan”; peristiwa Pontianak pada peringatan tahun baru Imlek tahun 2008, ketika prosesi naga dibatasi hanya di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, yang dikaitkan dengan insiden perusakan rumah, kelenteng, dan kendaraan (Thung 2010: 6-7). Hal-hal ini berhubungan dengan persepsi atau stereotip terhadap etnis Tionghoa, dan pada akhirnya berujung pada identitas etnis Tionghoa. Oleh karena itu perlu dilakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap identitas etnis Tionghoa. Coppel mendefinisikan orang Tionghoa Indonesia sebagai orang keturunan Tionghoa yang berfungsi sebagai warga atau berpihak pada masyarakat Tionghoa atau yang dianggap sebagai orang Tionghoa oleh orang Indonesia pribumi dan mendapatkan perlakuan tertentu sebagai akibatnya (Coppel 1994: 26). Secara

dasar, definisi ini mungkin tepat, namun kini yang perlu diketahui lebih jauh adalah karakteristik etnis Tionghoa, bagaimana dinamika identitas mereka saat ini, di tengah gelombang reformasi dan globalisasi? Seperti apakah orang Tionghoa itu dipersepsi dan mempersepsi dirinya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini selama Orde Baru tidak memungkinkan untuk dijawab secara akademis dan menyeluruh karena ruang untuk menelaahnya telah tertutup.

Dalam kajian budaya, secara singkat identitas bisa didefinisikan sebagai berikut: identitas adalah sebuah stabilisasi sementara atas makna atau deskripsi diri kita yang kita identifikasi secara emosional. Identitas adalah sebuah proses menjadi, bukan entitas yang tetap, dan melibatkan “penjahitan” hal-hal “di luar” kita yang bersifat wacana, dengan proses-proses subjektivitas “di dalam” kita. Identitas adalah titik keterlekatan sementara pada posisi subjek yang dikonstruksi oleh praktik-praktik wacana bagi kita (Barker 2012: 504). Dalam pendekatan konstruksionis, yang berpengaruh signifikan dalam kajian budaya akhir-akhir ini, identitas merupakan sebuah konstruksi. Identitas kita dikonstruksi melalui proses identifikasi, baik oleh diri kita sendiri, maupun dari bagaimana orang lain atau masyarakat memandang kita. Ini merupakan sebuah perdebatan tentang *agency* (kapasitas individu untuk bertindak secara independen dan membuat pilihan secara bebas) dan *structure* (susunan berpola yang berulang, yang mempengaruhi atau membatasi pilihan dan kesempatan yang tersedia), sebatas manakah “kebebasan” kita dapat mengkonstruksi identitas diri kita sendiri, dan sejauh mana pengaruh dari lingkungan sosial dan masyarakat terhadap konstruksi identitas kita. Konstruksi identitas juga berkaitan dengan perbedaan, memberi batas antara “kita” dan “mereka” (Woodward 2002: viii). Menurut Hall (1996c), identitas dikonstruksi *melalui* perbedaan (1996c: 4), dan identitas merupakan hal yang sangat kompleks (Holliday 2010). Bagaimana identitas itu ditunjukkan, adalah melalui representasi, melalui simbol-simbol tertentu yang kita kenakan. Sistem simbol ini

diimplikasikan dalam proses mengkonstruksi makna tentang siapakah kita (Woodward 2002: 76).

Hal-hal ini dapat ditelaah pada etnis Tionghoa di Indonesia, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan seperti: perbedaan apakah yang ada antara etnis Tionghoa dengan yang liyan, bagaimanakah batas itu dibentuk, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta representasi seperti apakah yang ditunjukkan oleh etnis Tionghoa dalam hubungannya dengan identitas mereka. Dengan demikian, dalam hal eksplorasi terhadap etnis Tionghoa, identitas menjadi penting. Dapat kita katakan bahwa identitas mereka adalah jalan masuk kita untuk mengetahui siapa yang disebut dengan Tionghoa pada pasca-Orde Baru ini.

Istilah-istilah mengenai identitas dalam hubungannya dengan etnis adalah: *identitas etnis* dan *etnisitas*. *Identitas etnis* adalah bagian dari identitas budaya, yang lingkupnya lebih luas (meliputi unsur lokasi, gender, ras, sejarah, kebangsaan, bahasa, seksualitas, agama dan kepercayaan, etnisitas, estetika, dan sebagainya). Walau demikian, istilah *etnis* sendiri erat kaitannya dengan budaya. Sebuah kelompok etnis memiliki karakteristik budaya yang sama di antara anggota kelompok tersebut (walau kesamaan ini masih bisa diperdebatkan). Dengan demikian, istilah identitas etnis dan identitas budaya kerap mengalami *overlap*, karena sama-sama bertumpu pada budaya. Meski begitu, identitas etnis lebih condong kepada tingkatan seseorang memandang dirinya sebagai anggota dari sebuah kelompok etnis tertentu (Tsai, Chentsova-Dutton, & Wong 2002: 42). *Etnisitas* adalah sebuah istilah budaya bagi bentukan batas antara kelompok-kelompok orang yang telah dikonstruksi secara wacana, yang memiliki nilai-nilai, norma-norma, praktik-praktik, simbol-simbol dan artefak-artefak yang sama dan dipandang demikian oleh diri mereka sendiri dan orang lain (Barker 2012: 501). Jadi etnisitas berkaitan dengan batas yang membedakan kelompok-kelompok etnis.

Dengan demikian, istilah identitas etnis dalam penelitian ini selanjutnya lebih dikhususkan kepada identitas Tionghoa. Selain itu, istilah “ketionghoaan” juga dipakai. Tidak ada definisi yang jelas mengenai ketionghoaan, namun istilah *ketionghoaan* ini secara umum mengacu pada kondisi menjadi (*being*) etnis Tionghoa, walau ketionghoaan itu sendiri dapat dimaknai berbeda-beda tergantung interpretasi masing-masing, dan dapat beragam, tidak homogen (Teng). Dapat dilihat konsep identitas etnis (Tionghoa) dan ketionghoaan memiliki esensi yang sama, yakni menjadi Tionghoa, menjadi bagian dari kelompok yang dinamakan Tionghoa. Maka dalam pembahasan berikutnya dalam tesis ini, istilah “identitas etnis Tionghoa” dan “ketionghoaan” bisa saling menggantikan.

Kompleksitas identitas Tionghoa dipaparkan dengan cukup menyeluruh terkait dengan aspek historisnya oleh Wu (1991), yang berangkat dari identitas Tionghoa “otentik”, yakni pusat keberadaan, menjadi bagian dari sebuah peradaban yang bersatu yang memiliki sejarah ribuan tahun tanpa terputus. Rasa memiliki ini merupakan hal yang umum bagi semua etnis Tionghoa di dunia, bahkan etnis Tionghoa di luar Tiongkok. Namun di sebagian tempat, khususnya di Asia Tenggara, etnis Tionghoa *Peranakan* merupakan kasus yang berbeda. Tionghoa Peranakan tetap menganggap diri mereka Tionghoa, tetapi mereka memiliki budaya yang perlahan meninggalkan karakteristik budaya asal, dan lebih terakulturasi dengan budaya lokal (1991: 172). Wu berpendapat bahwa etnis Tionghoa perantauan akan selalu menganggap mereka Tionghoa (dengan kata lain tidak terasimilasi total), asalkan pemerintah Tiongkok maupun para intelektual dan elit masyarakat Tionghoa terus menerima signifikansi identitas Tionghoa tersebut (1991: 177). Hal senada juga diungkapkan oleh Chun (1996), bahwa ada perbedaan antara disposisi etnik (seperti bahasa atau tradisi) dengan rasa identitas etnis Tionghoa perantauan, yang menyebabkan mereka memiliki gaya hidup (bahasa atau tradisi) yang melokal, namun secara identitas, mereka

masih merasa sebagai orang Tionghoa (terutama para Peranakan di Asia Tenggara) (1996: 123).

Dengan kompleksitas seperti ini, bagaimanakah kita menjelaskan ketionghoan, apakah ketionghoan itu sungguh ada? Bila ketionghoan dipandang sebagai sebuah keberagaman, dan sebuah keadaan yang menjelaskan seseorang atau kelompok sebagai Tionghoa, maka ketionghoan memang bisa dikatakan ada, dengan taraf dan bentuk yang berbeda-beda. Namun yang terlebih penting adalah bukan memperdebatkan apakah ketionghoan itu ada, melainkan menyelidiki bagaimana kategori tersebut beroperasi dalam praktiknya dalam konteks sejarah, geografis, politis, dan budaya yang berbeda-beda (Ang 1998: 227). Ketionghoan adalah sebuah keberagaman (Hoon 2012) dan ketionghoan masing-masing orang tidaklah sama. Namun berkaitan dengan etnisitas, kita bisa melakukan eksplorasi untuk menemukan pola-pola tertentu dari ketionghoan pada sekelompok orang. Misalnya, secara umum bisa dikatakan bahwa ketionghoan di Medan, berbeda dari ketionghoan di Jakarta, dan ketionghoan ini bisa melampaui batas ras, contohnya orang seperti Dahlan Iskan, yang terlihat sekali orientasi ketionghoannya. Dengan kompleksitas dan keragaman seperti ini, maka merupakan hal yang menarik untuk mengkaji lebih jauh identitas Tionghoa di Indonesia.

Setelah 1998, atau pasca Orde Baru, ketionghoan di Indonesia mengalami rekonstruksi, sebab budaya Tionghoa kini diperbolehkan untuk diekspresikan secara terbuka. Secara politis, kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dengan mulai dihapuskannya berbagai diskriminasi terhadap etnis tersebut. Freedman memberikan tiga kemungkinan skenario perubahan identitas etnis Tionghoa pasca Orde Baru, yakni: (1) semakin berbeda dengan kelompok etnik lainnya di Indonesia (semakin “Tionghoa”), (2) semakin terasimilasi, dan (3) mengalami transformasi bertahap hingga menjadi anggota bangsa Indonesia yang setara dengan etnis lain (Freedman 2003:

449-451). Proses perubahan yang terjadi dan kemungkinan-kemungkinan akibatnya menyebabkan bahwa meng-konseptualisasi kembali apa arti ketionghoan di Indonesia pasca Orde Baru adalah hal yang mendesak (Hoon 2012: xii), terutama dalam kaitannya dengan kestabilan hidup berbangsa dan relasi yang damai dengan etnis yang lain. Hoon menjelaskan bahwa ketionghoan setelah Orde Baru tidaklah bisa sekedar kembali ke identitas primordial, atau salah satu versi identitas Tionghoa yang “otentik”, tetapi tujuan studi tentang ketionghoan adalah hendak menjelajahi kompleksitas dan diversitas identitas ini di era yang baru (Hoon 2012: 69).

Pers Tionghoa sebagai salah satu pilar budaya Tionghoa, merupakan elemen penting dalam menyalurkan ekspresi budaya Tionghoa (Suryadinata 2010: 205). Beberapa studi juga menyebutkan bahwa surat kabar Tionghoa berperan penting dalam bidang pendidikan bahasa Tionghoa serta kesusastraan Tionghoa (Lu 2009, 2010; Sai 2010; Zhong 2007), dan merupakan sarana yang mengkomunikasikan hubungan bilateral kedua negara (Luo & Gao 2005). Pers Tionghoa turut berperan pula dalam konstruksi identitas Tionghoa. Bangkitnya pers Tionghoa pasca Orde Baru menggambarkan perubahan dan kesinambungan dengan era pra-1966, yakni dalam hal adanya nostalgia dengan masa itu, namun juga tidak terlalu berorientasi politis seperti masa tersebut. Bersamaan dengan itu, pers Tionghoa pasca Orde Baru memiliki sebuah misi *resinicization*, menekankan pada pendidikan nilai-nilai Tionghoa (*Chineseness* dari generasi tua Tionghoa di Indonesia) kepada generasi muda Tionghoa (Hoon 2012: 148).

Salah satu penelitian mengenai media etnis Tionghoa adalah mengenai peranannya bagi etnis Tionghoa setelah era reformasi dengan studi kasus pada majalah *Suara Baru* (Yuniartie 2011). Majalah ini berbahasa Indonesia, diterbitkan oleh INTI (Perhimpunan Indonesia-Tionghoa). Majalah ini berperan menjembatani hubungan antara sesama etnis Tionghoa, dan juga dengan etnis lainnya di Indonesia, terlebih untuk meluruskan stigma

yang salah kaprah antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya di Indonesia (Yuniartie 2011: 26).

Pada 10 Oktober 2000, seperti halnya di kota-kota lain, seiring dengan dibukanya kembali kebebasan pers Tionghoa di Indonesia, di Surabaya lahirlah surat kabar berbahasa Tionghoa yang bernama *Harian Nusantara (Qian Dao Ri Bao)*. Harian ini diproduksi di Surabaya, dengan dukungan dari organisasi-organisasi Tionghoa di Surabaya. Harian ini memiliki tujuan sesuai dengan slogannya: “Nusantara Aman Sejahtera, Rakyat Makmur”. Ini bisa dilihat sebagai cita-cita etnis Tionghoa bagi Indonesia di masa mendatang, yakni adanya kedamaian antar etnis. Konsep ini sekaligus merupakan ideologi *Harian Nusantara*, yakni konsep bangsa Indonesia yang multikultural, dan etnis Tionghoa adalah satu bagian yang terintegrasi di dalamnya. Setelah 10 tahun lebih terbit secara teratur dan masih terus terbit hingga sekarang, surat kabar ini telah memiliki basis pembaca yang reguler, terutama di kalangan etnis Tionghoa. Satu hal lagi yang perlu dicatat adalah harian ini sekarang sudah memiliki suplemen edisi Jakarta, yang di dalamnya ada bagian yang menggunakan bahasa Indonesia. Redaksi surat kabar ini seluruhnya adalah etnis Tionghoa.

Di sisi lain, surat kabar arus utama berbahasa Indonesia dengan sirkulasi terbesar di Surabaya adalah *Jawa Pos*. *Jawa Pos* merupakan salah satu surat kabar tertua di Indonesia, dengan lebih dari 60 tahun penerbitan secara kontinu. Dengan ruang lingkup pembaca yang sangat luas, *Jawa Pos* memiliki pertimbangan yang cukup memadai di dalam memilih topik beritanya (memproduksi teks yang merepresentasikan berita). *Jawa Pos* bisa dikatakan memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat (umum). Ini dapat dilihat dari hasil riset *Nielsen Media Index* tahun 2006 dan 2010, yang menyatakan bahwa *Jawa Pos* adalah surat kabar yang paling banyak dibaca di Indonesia¹. Di dalam hubungannya dengan konstruksi

¹ <http://www.jawapos.com/profile/profile/index.php>

identitas etnis, *Jawa Pos* merupakan surat kabar arus utama pertama pasca Orde Baru yang menggunakan kembali istilah Tionghoa dan Tiongkok, bukan Cina (Iskan 2009). Ini berhubungan juga dengan orientasi ketionghoan Dahlan Iskan, CEO *Jawa Pos*, seperti yang sudah disebutkan di atas. *Jawa Pos* memiliki slogan “Selalu Ada yang Baru”. Sebagai ideologi *Jawa Pos*, konsep ini tercermin pada cukup banyaknya terobosan baru yang dilakukan olehnya, misalnya dalam hal ukuran koran, yang berukuran lebih kecil dari koran konvensional, atau beberapa suplemen khusus yang muncul pada momen-momen tertentu, misalnya Sumpah Pemuda, Imlek dan sebagainya, serta melalui kolom-kolom di dalam *Jawa Pos* itu sendiri seperti Deteksi, *For Her*, dan sebagainya. Konsep *Power of Youth* juga merupakan salah satu ideologi *Jawa Pos*, yang dinyatakan melalui jajaran editor utama mereka yang kebanyakan berusia di bawah 40 tahun². Hal ini pula yang menjadi salah satu bahan pertimbangan pemilihan *Jawa Pos* sebagai sumber data penelitian, sebab “suara muda” inilah yang nantinya akan berpengaruh dalam menentukan arah kehidupan bangsa dan negara, termasuk dalam hal hubungan antar etnis.

Dalam kaitan dengan ketionghoan di era reformasi ini, belum ada studi empirik dan spesifik dalam konteks budaya mengenai bagaimana media surat kabar mempengaruhi konstruksi identitas Tionghoa di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Hoon (2012) masih bersifat umum atas kondisi surat kabar Tionghoa di Indonesia setelah reformasi. Studi oleh Yuniartie (2011) lebih terbatas pada 9 edisi majalah *Suara Baru* di kisaran tahun 2000-2001. Selain itu, dapat dilihat bahwa melalui harian arus utama seperti *Jawa Pos*, etnis Tionghoa juga mendapatkan pemberitaan yang turut mengkonstruksi identitas mereka. Maka penulis memandang perlu untuk mengeksplorasi konten berita di *Harian Nusantara* dibandingkan

² <http://www.jawapos.com/profile/profile/index.php>

dengan konten berita di surat kabar arus utama seperti *Jawa Pos*, dalam kaitannya dengan konstruksi identitas.

Maka penelitian ini hendak melihat konstruksi identitas Tionghoa di Indonesia masa sekarang ini (era reformasi) melalui kedua media. Penelitian ini mengungkapkan identitas Tionghoa yang ditampilkan dalam pemberitaan tentang etnis Tionghoa di *Harian Nusantara*, dibandingkan dengan berita dalam surat kabar *Jawa Pos*, dan dari gambaran identitas tersebut diharapkan dapat diketahui bagaimana konstruksinya pada masing-masing surat kabar.

Komparasi dengan surat kabar arus utama berbahasa Indonesia dilakukan selain karena surat kabar arus utama turut berperan dalam mengkonstruksi identitas Tionghoa, diperlukan sebuah pembandingan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Subjek penelitian adalah dua buah teks dalam dua budaya yang berbeda, sehingga memungkinkan dilakukan pendekatan komparatif (Berger 2000: xiv). Komparasi yang dilakukan di sini adalah komparasi isi dari surat kabar dalam pemberitaan topik-topik tertentu guna mengetahui perbedaan apa sajakah yang ada serta menemukan karakteristik kedua surat kabar yang diperoleh dari analisis wacana.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002, pada tanggal 1 Februari 2003, hari raya Imlek mulai ditetapkan menjadi hari libur nasional. Ini merupakan sebuah tonggak bersejarah bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengamati apa yang sudah terjadi sejak 2003 hingga sekarang. Perkembangan konstruksi identitas Tionghoa, yang terjadi dari tahun 2003 yang juga merupakan masa-masa awal reformasi, hingga kini setelah lebih dari satu dasawarsa, merupakan bagian dari kajian tesis ini. Untuk itu ditentukan ruang lingkup terbitan surat kabar yang hendak dianalisis adalah pada masa pasca-Orde Baru, yakni tahun 2003, dan masa kini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana identitas etnis Tionghoa diungkap dalam teks berita atau artikel di *Harian Nusantara* dan *Jawa Pos* pasca-Orde Baru (tahun 2003, dan 2013-2014)?
- 2) Bagaimana konstruksi identitas etnis Tionghoa oleh teks kedua media tersebut dalam kurun waktu tahun 2003 dan 2013-2014?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana *Harian Nusantara* dan *Jawa Pos* mempengaruhi konstruksi identitas Tionghoa di Indonesia. Dari sini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang orang Tionghoa di Indonesia pasca-Orde Baru, baik melalui media etnik, maupun melalui media arus utama.

Signifikansi penelitian ini secara keilmuan adalah memberikan basis ilmiah untuk penelitian-penelitian ketionghoan di Indonesia selanjutnya, khususnya di era reformasi dan melalui konteks budaya media Tionghoa.

Signifikansi penelitian secara praktis adalah: pertama, bagi orang non-Tionghoa, akan lebih mengenal dan mengerti siapa sebenarnya etnis Tionghoa itu, sehingga diharapkan dapat menghapuskan stereotip yang salah terhadap etnis tersebut, dan lebih mempererat hubungan antar etnis sehingga memberikan suasana kondusif bagi pembangunan bangsa. Bagi etnis Tionghoa sendiri, mereka akan lebih mengenal keberagaman yang ada di dalam etnis mereka, serta lebih mengetahui bagaimana identitas mereka dikonstruksi. Mereka juga akan mengetahui sekat seperti apakah yang membatasi kelompok mereka dengan kelompok yang bukan Tionghoa, sehingga mereka diharapkan juga bisa mengikis perbedaan atau eksklusivitas yang menghambat interaksi mereka dengan etnis yang lain dan bahkan dengan golongan-golongan di dalam etnis mereka sendiri. Kedua, bagi pemerintah, penelitian ini

bisa dijadikan pedoman dalam mengambil kebijakan dalam kaitan dengan politik dan demokrasi serta kebijakan multikulturalisme atau pluralisme. Ketiga, manfaat praktis bagi surat kabar itu sendiri, baik *Harian Nusantara* maupun *Jawa Pos* ataupun surat kabar lainnya. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai tambahan bahan pertimbangan redaksi mengatur konten berita dengan lebih baik, supaya dapat turut berkontribusi bagi harmonisnya kehidupan sosial bangsa ini.

BAB IV

KETIONGHOAN DALAM *HARIAN NUSANTARA* DAN *JAWA POS*

Melalui metode pengumpulan data dan teknik analisis data, berikut diuraikan hasil analisis serta pembacaan dan interpretasi hasil yang didapat.

4.1 Gambaran Umum Struktur *Harian Nusantara* dan *Jawa Pos*

Sebelum masuk pada analisis wacana teks, terlebih dahulu dibandingkan struktur kedua surat kabar keseluruhan. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh, tentang apa yang hendak disampaikan oleh sebuah surat kabar etnik, dan surat kabar arus utama. Konten yang disajikan oleh surat kabar tentunya juga mempertimbangkan kondisi, preferensi, dan latar belakang dari kalangan pembaca yang mengkonsumsi surat kabar tersebut. *Harian Nusantara* yang merupakan harian etnis Tionghoa, semestinya menyuarakan sesuatu dari sudut pandang etnis Tionghoa, baik dari redaksinya yang sebagian besar etnis Tionghoa, juga secara tidak langsung mengungkap sisi pembacanya, yang juga mayoritas adalah etnis Tionghoa. Dengan demikian, dari perbandingan struktur keseluruhan ini, walau belum sampai pada perbandingan konten teks khususnya tentang identitas Tionghoa, namun kita bisa mendapatkan gambaran tentang ‘suara’ dari sudut pandang etnis Tionghoa, dibandingkan dengan sudut pandang arus utama. Dari perbandingan struktur keseluruhan *Harian Nusantara* dan *Jawa Pos* tersebut, dapat ditemukan beberapa perbedaan dan persamaan sebagai berikut.

4.1.1 Halaman Pertama Surat Kabar, Editorial dan Opini

Halaman pertama surat kabar berisikan teks yang dianggap paling penting, terkini dan relevan bagi pembaca. Karena halaman pertama ini adalah halaman yang pertama kali dilihat oleh pembaca pada sebuah edisi, biasanya *headline* atau judul teks ditulis dengan ukuran besar untuk menarik pembaca. *Harian Nusantara* biasanya menyetengahkan berita-berita dalam negeri terkini di halaman pertama. Pada umumnya, topik berita yang diletakkan

di halaman pertama adalah berita seputar politik dan pemerintahan, serta kegiatan presiden. Di bagian bawah halaman biasanya ada bagian editorial atau opini (kadang editorial ini berupa terjemahan dari teks editorial dari surat kabar lain).

Tidak ada perbedaan yang terlalu besar antara halaman pertama *Jawa Pos* dengan *Harian Nusantara*. Di *Jawa Pos*, berita-berita terkini menempati halaman ini, sesuai isu-isu yang sedang hangat saat itu. *Jawa Pos* juga memiliki ‘tambahan’ halaman pertama, yakni halaman terakhir di seksi *Jawa Pos*, yang juga memuat berita-berita yang penting. Kedua halaman ini adalah halaman terluar di seksi *Jawa Pos*, sehingga cukup strategis karena pembaca tidak perlu membuka koran untuk bisa membacanya. Sedangkan halaman terluar *Harian Nusantara* tidak semua menjadi ‘halaman pertama’, karena halaman terakhir memuat topik berita yang berbeda.

Perbedaan yang ada pada pemberitaan di halaman pertama *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara* adalah pada porsi pemberitaan kegiatan presiden. Bila *Harian Nusantara* cukup konsisten memberitakan kegiatan presiden di halaman pertama, *Jawa Pos* tidak demikian. Teks berita di halaman pertama *Jawa Pos* lebih bervariasi, tidak sama dengan *Harian Nusantara* yang cenderung memberitakan isu politik dan pemerintahan di halaman ini. Opini juga tidak menempati halaman pertama *Jawa Pos*, tetapi di bagian bawah halaman pertama umumnya berisikan artikel tentang sosok atau tokoh tertentu.

Di *Jawa Pos*, editorial serta opini menempati halaman khusus yakni sekitar halaman 4. Editorial *Jawa Pos* dinamakan Jati Diri. Di halaman ini *Jawa Pos* juga menempatkan kolom Pembaca Menulis, yang berisikan surat-surat pembaca yang umumnya berisi opini pendek, keluhan dan kritik.

Yang membedakan editorial *Harian Nusantara* dan *Jawa Pos* adalah, editorial *Harian Nusantara* kadang merupakan terjemahan dari media lain, sedangkan *Jawa Pos* tidak demikian. Bagian opini di *Jawa Pos* merupakan hasil tulisan dari para tokoh atau pakar di

bidang tertentu, sehingga isi tulisannya cenderung bersifat formal dan akademik. Topik tulisannya juga beragam, biasanya disesuaikan dengan tren saat itu, atau peringatan tertentu saat itu. Sedangkan di *Harian Nusantara*, opini-opini semacam ini tidak diletakkan di halaman khusus, tetapi biasanya berada di halaman berita komunitas Tionghoa, serta di halaman kolom atau suplemen. Sesuai dengan letaknya, opini-opini di *Harian Nusantara* cenderung lebih menyoroti isu-isu tentang ketionghoan. *Harian Nusantara* juga tidak memiliki kolom khusus berisi keluhan pembaca, tetapi pembaca disediakan ruang untuk menulis artikel umum di halaman kolom atau suplemen, yang tentunya tidak khusus memuat keluhan terhadap suatu hal tertentu.

4.1.2 Berita Politik

Jawa Pos memiliki halaman khusus yang memuat berita politik dalam negeri, yakni di halaman 2. Bagian ini memuat berita-berita politik dalam negeri. *Harian Nusantara* tidak mempunyai bagian khusus politik. Berita politik pada *Harian Nusantara* tersebar pada halaman pertama serta pada bagian berita dalam negeri.

4.1.3 Berita dalam Negeri

Halaman 2 *Harian Nusantara* memuat artikel berita-berita dalam negeri (nusantara). Hampir seluruh artikel di halaman ini merupakan terjemahan dari media dalam negeri, seperti Antara, Kompas, *Jawa Pos*, Detik dan sebagainya. Kadang juga memuat artikel dari media internasional. Selain di halaman ini, pada empat halaman terakhir di sebuah edisi, *Harian Nusantara* memuat konten yang diterbitkan oleh redaksi cabang surat kabar ini di Jakarta. Konten dalam bagian ini berisikan berita-berita nasional, dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa.

Jawa Pos mempunyai dua bagian khusus untuk berita dalam negeri, yang dinamakan Berita Utama, pada sekitar halaman 3 (tidak selalu ada, tergantung *setting* di edisi tersebut), dan di sekitar halaman 10, ada bagian Nusantara, yang juga memuat berita-berita dalam

negeri. Selain itu, di sekitar halaman 11, ada bagian Jakarta, yang memuat berita-berita daerah Jakarta.

Dari sini terlihat bahwa jumlah halaman berita dalam negeri di *Jawa Pos* lebih banyak dibandingkan *Harian Nusantara*. Namun belum tentu jumlah artikel atau beritanya selalu lebih banyak, sebab artikel di halaman-halaman *Jawa Pos* harus berbagi tempat dengan iklan di halaman itu. Sedangkan di *Harian Nusantara*, jarang ditemukan iklan produk, dan sebagian besar halaman penuh dengan artikel.

Selain itu, liputan tentang komunitas Tionghoa di dalam negeri mendapat porsi lebih di *Harian Nusantara*, yang apabila dibandingkan dengan *Jawa Pos*, berita-berita mengenai komunitas ini bisa ditempatkan di bagian Berita Utama, Nusantara, maupun di bagian Metropolis.

4.1.4 Berita Surabaya dan Jawa Timur

Halaman 3 *Harian Nusantara* memuat artikel berita seputar Surabaya dan Jawa Timur. Seperti halnya artikel berita dalam negeri, artikel seputar Surabaya juga merupakan terjemahan dari berbagai media lain. Dari segi kuantitas konten, *Jawa Pos* memuat porsi ini lebih banyak, dengan pembagian tema yang lebih terorganisir, karena artikel seputar Surabaya dimasukkan dalam seksi khusus yakni *Metropolis*, yang berisikan tujuh hingga delapan halaman berita, yang dibagi menjadi beberapa bagian, yakni Politik & Pemerintahan, Kasuistika (berita-berita kriminal), *Cover Story* (bila ada), Pendidikan, *Around Surabaya*, *Lifestyle*, dan *Life! Begin at 50*, termasuk juga halaman khusus Gresik dan halaman khusus Sidoarjo. Ditambah lagi di seksi *Jawa Pos* sendiri, di sekitar halaman 8-13 ada dua halaman yang diperuntukkan bagi berita-berita Jawa Timur selain Surabaya.

4.1.5 Berita Komunitas Tionghoa

Halaman 4 *Harian Nusantara* memuat artikel tentang komunitas Tionghoa. Halaman ini diberi label *Dinamika Komunitas Tionghoa* (华社动态). Halaman ini berisi informasi

tentang kegiatan-kegiatan komunitas Tionghoa, misalnya kegiatan pertemuan, reuni, seminar dan sebagainya. Selain itu, juga berisi artikel-artikel tentang tokoh Tionghoa, kegiatan organisasi dan komunitas Tionghoa, dan artikel opini yang berhubungan dengan bahasa dan budaya Tionghoa. Sumber artikel di halaman ini bervariasi, bisa berasal dari media lain, bisa ditulis oleh wartawan *Harian Nusantara* sendiri, atau bisa pula ditulis oleh khalayak umum. Komunitas Tionghoa merupakan topik berita yang mendapatkan porsi besar di *Harian Nusantara*. Selain halaman 4, kadang di dalam halaman 9 hingga 13 juga dikhususkan untuk memuat topik ini.

Jawa Pos tidak memiliki bagian yang khusus memuat artikel tentang komunitas Tionghoa. Ini adalah salah satu perbedaan yang tampak dari kedua surat kabar. Walaupun tidak berarti *Jawa Pos* sama sekali tidak memberitakan komunitas Tionghoa, namun dari segi porsi yang diberikan, terlihat jelas bahwa *Harian Nusantara* memberikan kuantitas konten tentang komunitas Tionghoa lebih banyak. Di seksi *Metropolis*, kadang bisa ditemukan berita tentang komunitas Tionghoa atau orang Tionghoa di Surabaya, dan di bagian *Life! Begin at 50* juga cukup sering ditemukan berita serupa.

4.1.6 Berita Ekonomi

Di sekitar halaman 5 (bisa juga diletakkan di halaman belakang, tergantung edisi) *Harian Nusantara* memuat artikel-artikel tentang ekonomi, terutama berita dalam negeri. Konten di halaman ini diambil dari media lain, baik langsung dalam bahasa Tionghoa maupun diterjemahkan terlebih dahulu. Sedangkan di sekitar halaman 15, dimuat berita ekonomi internasional (berita ekonomi internasional tidak selalu muncul di tiap edisi).

Di sekitar halaman 5-7, *Jawa Pos* memuat berita ekonomi dan bisnis. Sebagian besar berita adalah tentang ekonomi dan bisnis dalam negeri. Berita ekonomi internasional juga diletakkan di bagian ini.

Perbedaan yang nampak dengan *Harian Nusantara* adalah bahwa di *Jawa Pos* tidak ada bagian khusus yang memuat berita ekonomi internasional saja, tetapi baik berita ekonomi nasional dan internasional semuanya dicampur di satu bagian yang sama.

4.1.7 Artikel Kesehatan

Halaman 6 *Harian Nusantara* memuat artikel tentang kesehatan. Konten ini juga diambil dari media lain, terutama media berbahasa Tionghoa. Informasi kesehatan yang diberikan bervariasi, bukan hanya dari bidang *Traditional Chinese Medicine*, melainkan juga artikel kesehatan umum.

Sedangkan di *Jawa Pos*, artikel-artikel kesehatan tidak memiliki halaman khusus, biasanya bisa berada di bagian *FOR HER*, atau *Lifestyle*.

4.1.8 Cerita Bersambung *Wuxia* (武侠)

Harian Nusantara memuat cerita bersambung yang diambil dari novel dengan genre *wuxia*, atau kisah silat Tiongkok. Cerita bersambung ini ditempatkan di halaman 6, di bagian bawah konten tentang kesehatan.

Jawa Pos juga memiliki cerita bersambung di tiap edisinya, dan kebetulan belakangan ini *Jawa Pos* memuat cerita silat dengan judul *Naga Jawa di Negeri Atap Langit* karya Seno Gumira Ajidarma. Dan di edisi Minggu, ada halaman Cerpen.

4.1.9 Kolom atau Suplemen

Bagian suplemen atau kolom di *Harian Nusantara* berisikan artikel-artikel non-berita, yang ditulis oleh khalayak umum. Bagian ini ditempatkan di halaman 7. Topik artikel bervariasi, mulai dari pengalaman pribadi penulis, puisi, opini, dan sebagainya. Tiap Senin, halaman ini memuat kolom khusus, yang berjudul *汉风语韵*, yang berisikan pengetahuan tentang bahasa Tionghoa (linguistiknya) yang ditulis oleh dosen Pusat Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang. Setiap Selasa, halaman ini khusus memuat tulisan siswa yang sedang belajar bahasa Tionghoa, atau konten tentang pembelajaran bahasa Tionghoa bagi

siswa. Konten berupa tulisan siswa atau tulisan untuk pembaca anak-anak, juga bisa muncul di halaman sembilan.

Bagian seperti ini, tidak ditemukan secara khusus di *Jawa Pos*. Bagian *DetEksi* bisa memuat tulisan-tulisan dari pembaca muda. Dan opini juga sudah ditempatkan di halaman khusus opini dan editorial. Dulu *Jawa Pos* sempat memiliki rubrik Tekat Sayang, yang berisikan konten seputar pepatah bahasa Tionghoa, sebagai salah satu bentuk pembelajaran bahasa Tionghoa bagi pembacanya. Namun belakangan ini rubrik ini sudah tidak ada lagi.

4.1.10 Berita Olahraga

Halaman 8 *Harian Nusantara* memuat berita-berita olahraga. Bagian ini lebih sering memuat berita-berita olahraga internasional, dan sebagian besar merupakan olahraga yang dimainkan oleh atlit etnis Tionghoa, baik Indonesia maupun internasional. Porsi ini lebih sedikit dibandingkan *Jawa Pos*, yang memiliki seksi khusus olahraga (yang sekarang diberi tajuk *Sportainment*) sebanyak sekitar enam halaman. Dari segi kontennya, berita-berita olahraga di *Jawa Pos* lebih bervariasi, tidak hanya terbatas pada berita internasional dan olahraga etnis Tionghoa.

4.1.11 Karikatur

Karikatur tidak selalu ada dalam tiap edisi *Harian Nusantara* (umumnya ada di edisi Sabtu), demikian juga dengan *Jawa Pos* (di *Jawa Pos* biasanya muncul pada edisi Selasa, Kamis dan Sabtu). *Jawa Pos* memberi bagian karikatur dengan judul *Clekit*, sedangkan pada *Harian Nusantara* tidak diberi judul khusus. Terdapat perbedaan dari segi konten karikatur. Karikatur di *Jawa Pos*, sesuai judulnya, *Clekit* (bahasa Jawa yang berarti rasa nyeri menyengat), berisikan kritik atau komentar terhadap topik yang sedang hangat di masyarakat saat itu. Sedangkan karikatur di *Harian Nusantara* lebih berupa sebuah komik mini, dengan sebuah narasi cerita, bisa berisi cerita lucu, petuah moral, dan sebagainya. Karikatur berupa kritik terkadang juga bisa muncul, namun tidak reguler.

4.1.12 Berita tentang Tiongkok

Berita tentang Tiongkok mempunyai beberapa halaman khusus di *Harian Nusantara*, biasanya di sekitar halaman 10. Tiongkok di sini tidak hanya Tiongkok Daratan, tetapi juga Hongkong dan Macau yang menjadi wilayah administratif khusus Tiongkok. Isinya diambil dari media-media di negara tersebut. Di halaman lain bisa juga ditempatkan berita-berita seputar Tiongkok yang menjadi fokus belakangan ini. Ini ditempatkan di satu halaman tersendiri. Kadang juga masih ada tambahan halaman-halaman dengan tema khusus, yang muncul reguler (walau bukan di tiap edisi) adalah 今日西藏 (*Xizang Today*, berisikan berita-berita seputar propinsi Tibet), 新疆专版 (Halaman Khusus *Xinjiang*, berisikan berita-berita seputar propinsi *Xinjiang*), 广东侨乡 (*Guangdong Hometown*, berisi berita-berita seputar propinsi *Guangdong*), dan halaman tentang tokoh Tionghoa di dunia, serta halaman berisi artikel-artikel dengan beragam topik khusus seputar Tiongkok. Artikel-artikel ini sebagian besar bersumber dari media Tiongkok.

Jawa Pos tidak mempunyai halaman khusus untuk artikel berita Tiongkok. Berita tentang Tiongkok bisa ditemukan di halaman berita internasional, atau di halaman pertama.

4.1.13 Berita tentang Taiwan

Berita tentang Taiwan pada *Harian Nusantara* ditempatkan di sekitar halaman 11, pada satu halaman khusus, namun tidak selalu muncul pada tiap edisi. Isinya memuat berita-berita terkini di Taiwan. Apabila tidak ada halaman khusus, maka berita tentang Taiwan ditempatkan pada halaman yang memuat berita tentang Tiongkok. Konten artikel diambil dari media Taiwan maupun Tiongkok.

Jawa Pos tidak mempunyai bagian khusus seperti ini, berita tentang Taiwan bisa berada di bagian berita internasional.

4.1.14 Berita Internasional

Pada *Harian Nusantara*, berita internasional biasanya ditempatkan di sekitar halaman 14. Artikel berita umumnya bersumber dari media Tiongkok, seperti kantor berita Xinhua.

Di *Jawa Pos*, berita-berita internasional dimuat di sekitar halaman-halaman akhir seksi *Jawa Pos* (antara halaman 14-18, bisa juga di halaman 3, tergantung jumlah halaman pada edisi tersebut). Berita-berita di sini ditulis ulang dari berbagai sumber (biasanya mengambil bahan dari beberapa sumber kantor berita asing, kemudian ditulis ulang menjadi satu artikel).

Jadi perbedaan pada teks berita internasional terletak pada sumber berita dan cara penulisan artikelnya. *Harian Nusantara* cenderung mengambil berita dari satu sumber untuk tiap artikel, dan diterjemahkan. Sedangkan *Jawa Pos* bisa menggabungkan dari beberapa sumber untuk dijadikan satu artikel.

4.1.15 Berita Selebriti dan Hiburan

Di *Jawa Pos*, tiap edisinya selalu memuat berita-berita selebriti dan hiburan. Ini diletakkan di bagian Show & Selebriti, di sekitar halaman 7. Kadang bagian ini diselipkan di dalam bagian *FOR HER*, sebuah bagian yang diperuntukkan khusus untuk pembaca wanita. Tampaknya ada wacana untuk mengidentikkan kaum wanita sebagai konsumen berita selebriti dan hiburan. Walau pada praktiknya bagian *FOR HER* tentu tidak hanya dibaca oleh wanita saja.

Sedangkan di *Harian Nusantara*, berita selebriti dan hiburan muncul tiap Sabtu di sekitar halaman 13. Artikel di halaman ini diterjemahkan dari media lain.

4.1.16 Budaya dan Sastra Tionghoa

Harian Nusantara tiap selang waktu tertentu juga menyelipkan halaman khusus yang memuat budaya Tionghoa, sastra Tionghoa (puisi), serta halaman yang memuat karya kaligrafi atau lukisan Tionghoa. Halaman budaya Tionghoa memuat berbagai artikel dari

berbagai sumber, dengan topik seputar budaya, filosofi, sejarah Tionghoa. Sedangkan halaman tentang puisi memuat beberapa karya puisi Tionghoa, serta artikel tentang puisi.

Jawa Pos tidak mempunyai halaman seperti ini.

4.1.17 Tokoh

Kadang *Harian Nusantara* juga memuat satu halaman khusus tentang seorang tokoh Tionghoa, baik dalam maupun luar negeri. Walau demikian, artikel tentang tokoh juga bisa tersebar di halaman lain, misalnya di halaman tentang komunitas Tionghoa.

Di *Jawa Pos*, tokoh yang diceritakan di tiap edisi tentunya tidak selalu adalah tokoh Tionghoa. Namun di bagian *Life! Begin at 50*, cukup sering ditemukan pemberitaan tentang kegiatan orang-orang Tionghoa di Surabaya.

4.1.18 For Her

Jawa Pos memiliki bagian khusus yang diberi judul *FOR HER*, yakni halaman khusus untuk pembaca wanita. Artikel-artikel di sini berisi seputar dunia wanita dan keluarga. Sedangkan *Harian Nusantara* tidak mempunyai bagian khusus seperti ini, namun artikel-artikel senada bisa ditemukan di bagian lain, seperti di bagian kolom/suplemen, serta artikel kesehatan.

4.1.19 Bagian untuk Pembaca Muda

Jawa Pos mempunyai rubrik *DetEksi*, yang memuat artikel bagi pembaca muda. Dan rubrik ini juga dikelola oleh pemuda. Di dalamnya bisa ditemukan artikel tentang hobi, hiburan, serta yang belakangan selalu muncul adalah berita tentang *DetEksi Basketball League* (DBL).

Harian Nusantara tidak mempunyai bagian khusus seperti ini. Tulisan pembaca muda bisa ditemukan di bagian suplemen, tapi tidak selalu. Karangan pebelajar bahasa Tionghoa bisa ditemukan di bagian suplemen tiap edisi Selasa. Kadang juga bisa ada satu halaman lain yang berisikan artikel-artikel untuk anak-anak, dengan tujuan lebih kepada

pembelajaran bahasa Tionghoa bagi anak-anak. Di lain waktu, bisa juga muncul halaman berisi karangan-karangan dari Tiongkok, namun tidak spesifik untuk pembaca muda.

4.1.20 Hobi dan Catatan Perjalanan

Jawa Pos memasukan artikel-artikel tentang hobi di bagian *FOR HER* atau *DetEksi*, dan kadang juga disediakan halaman khusus yang memuat berita tentang perfilman dan hobi. *Jawa Pos* juga cukup sering memuat catatan perjalanan wartawan, dan bisa diletakkan di bagian *FOR HER*, atau di halaman pertama.

Harian Nusantara tidak memiliki halaman khusus yang membahas tentang hobi, artikel semacam ini jarang ditemukan. Namun secara berkala *Harian Nusantara* memuat catatan perjalanan wartawan koran tersebut, ataupun catatan perjalanan dari pembaca, yang biasanya diletakkan di satu halaman khusus.

4.1.21 Non-editorial

Di kedua surat kabar, selain konten editorial, juga terdapat konten non-editorial, seperti iklan dan horoskop. Horoskop di *Harian Nusantara* muncul tiap Sabtu di bagian halaman berita selebriti dan hiburan, sedangkan di *Jawa Pos*, muncul tiap hari Minggu.

Iklan di *Jawa Pos* lebih bervariasi, terutama karena *Jawa Pos* banyak memuat iklan produk komersial. Selain itu *Jawa Pos* juga menyediakan halaman yang diberi judul Komunikasi Bisnis atau Info Properti, dan sebagainya, yang di dalamnya berisi artikel yang mengenalkan produk tertentu. Secara berkala, *Jawa Pos* juga ikut mendukung kegiatan pameran, atau *sale* di Surabaya, sehingga bisa menyediakan halaman khusus untuk keperluan ini. *Harian Nusantara* juga memuat iklan produk komersial, namun sangat jarang ditemukan iklan seperti ini.

Jawa Pos juga memuat *iklan jitu*, yang merupakan iklan baris, kumpulan iklan-iklan mini yang dimuat oleh pembaca, dengan porsi yang cukup besar. *Harian Nusantara* tidak mempunyai bagian untuk ini.

Iklan kematian juga ada di *Jawa Pos*, tapi tidak dengan porsi sebanyak *Harian Nusantara*. Iklan kematian di *Harian Nusantara* bukan sekedar bersifat memberitahukan seseorang yang meninggal, tapi lebih banyak berupa ucapan turut berduka cita, yang berasal dari pembaca. Apabila orang yang meninggal mempunyai pengaruh atau merupakan orang penting, iklan-iklan ucapan duka cita ini akan muncul cukup banyak, bahkan tidak jarang bisa menempati satu halaman penuh. Jadi di *Harian Nusantara*, kematian bisa dikatakan sudah menjadi komoditi.

Selain itu, *Harian Nusantara* juga memuat iklan ucapan selamat, yang biasanya terdiri dari ucapan selamat untuk peringatan berdirinya komunitas Tionghoa tertentu, pernikahan, peringatan hari kemerdekaan, peringatan ulang tahun koran tersebut, dan sebagainya. Sama seperti iklan kematian, iklan ucapan selamat ini berasal dari pembaca, dengan ukuran yang berbeda-beda, dan bisa menempati satu halaman penuh. *Jawa Pos* juga kadang memuat iklan seperti ini, tapi dengan tema yang berbeda, karena tidak selalu berhubungan dengan Tionghoa, serta tidak sesering kemunculan di *Harian Nusantara*.

Jenis iklan yang lain adalah iklan kegiatan atau *event* tertentu. Kegiatan-kegiatan komunitas Tionghoa bisa diiklankan di *Harian Nusantara*. Sedangkan di *Jawa Pos* lebih memuat iklan kegiatan umum, tidak khusus untuk komunitas Tionghoa.

4.2 Identitas Tionghoa yang Diungkap di *Harian Nusantara* dan *Jawa Pos*

Analisis wacana kritis dilakukan terhadap teks di *Harian Nusantara* dan *Jawa Pos*, dengan kriteria yang telah ditentukan di bab 3.

4.2.1 Budaya Tionghoa

Di tahun 2003, Tahun Baru Imlek mulai ditetapkan menjadi hari libur nasional. Momen ini merupakan momen bersejarah bagi etnis Tionghoa di Indonesia. *Jawa Pos* turut menyambut euforia momen ini dengan menurunkan cukup banyak artikel tentang Tahun Baru Imlek maupun budaya Tionghoa. Dalam bulan Februari 2003 saja, tercatat ada sekitar

35 buah artikel di *Jawa Pos* yang berhubungan dengan budaya Tionghoa. Sebagai perbandingan, pada Februari 2014, artikel semacam itu sudah berkurang jumlahnya, menjadi sekitar 20 artikel. Berikut ini analisis wacana kritis dua artikel di *Jawa Pos* dan dua artikel di *Harian Nusantara*.

4.2.1.1 Bawa Hoki, Malam Imlek Turun Hujan, 1 Februari 2003, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Dari sisi leksikal, menarik mencermati pemilihan kata untuk menyebutkan Tahun Baru Imlek di dalam artikel *Jawa Pos* ini. Pada judul, artikel ini menggunakan metonim “Imlek” untuk menyatakan Tahun Baru Imlek. Sedangkan di dalam isinya, kebanyakan menggunakan istilah “Tahun Baru China”, dicampurkan dengan metonim “Imlek”. Sama sekali tidak digunakan istilah “Tionghoa” maupun “Tiongkok” di dalam artikel ini. Untuk menyebutkan hal-hal yang menyangkut Tiongkok, digunakan istilah “China”. Sedangkan untuk menyebutkan etnis Tionghoa, tidak digunakan penanda etnis, tetapi hanya menggunakan istilah “warga”.

Lead artikel ini menggunakan berita turunnya hujan di malam tahun baru Imlek, yang dipandang sebagai hal yang baik, yakni mendatangkan keberuntungan di tahun yang baru. Kemudian narasi pada artikel ini menceritakan dua jenis perayaan Imlek, yakni di vihara dan kelenteng, serta di hotel dan restoran. Di tengah-tengahnya, diselipkan narasi kecil tentang perayaan Imlek di YP Dharma Vita. Kontrasnya perayaan di vihara dan kelenteng serta di hotel dan restoran diperlihatkan lewat acara yang diadakan di kedua jenis tempat tersebut. Vihara dan kelenteng dominan dengan acara sembahyang, sedangkan hotel dan restoran dominan dengan acara hiburan.

Penggunaan kata “jor-joran” maupun “heboh” menggambarkan bagaimana hotel dan restoran menyuguhkan berbagai acara semeriah mungkin untuk menyambut Imlek.

.....hotel dan restoran jor-joran mengemas acara pesta dengan berbagai atraksi hiburan dan menu istimewa.

Tentu saja perayaan Tahun Baru China ala kelenteng dan vihara ini tidak seheboh hotel maupun restoran.

Kontruksi etnis Tionghoa sebagai etnis yang umumnya berprofesi sebagai pengusaha atau pedagang, nampak cukup kental dalam artikel ini. Ini terlihat dari penggunaan kata-kata seperti “rekan bisnis”, “pengusaha”, untuk mengacu pada subjek etnis Tionghoa.

Ucapan “gong xi fa cai” terdengar setiap kali mereka bertemu dengan saudara, keluarga, maupun rekan bisnis yang kebetulan merayakan di tempat yang sama.

“Karena kesibukan kami, baru tadi siang (kemarin, Red) kami mencari tempat untuk makan malam merayakan tahun baru China bersama keluarga. Eh, semuanya sudah penuh,” keluh Himawan, seorang pengusaha di Surabaya.

Presuposisi terlihat pada beberapa bagian artikel berikut ini.

“Kami tidak membatasi umat yang bersembahyang, karena Tuhan adalah milik semua orang. Selain itu, ada baiknya kita semua mendoakan agar keadaan Indonesia yang saat ini makin buruk ini bisa menjadi baik lagi,” ujar Soetiadji Yudho, pimpinan Sanggar Agung.

Dipresuposisikan bahwa Tuhan adalah milik semua orang, yang berarti bahwa Tuhan yang disembah di kelenteng adalah juga Tuhan semua orang yang lain, dengan demikian kelenteng ini terbuka bagi semua orang untuk bersembahyang. Presuposisi yang lain terlihat dari pernyataan bahwa keadaan Indonesia saat ini semakin buruk, namun tidak dijelaskan lebih lanjut “lebih buruk” tersebut dalam hal apa dan bagaimana.

2. Praktik Wacana

Liputan perayaan Imlek di artikel ini memunculkan dua wacana jenis perayaan, yakni wacana religius, dengan menampilkan peringatan Imlek di kelenteng dan vihara, serta wacana budaya, yang mengangkat perayaan Imlek di hotel dan restoran. Wacana budaya disajikan hanya dengan menyoroti perayaan Imlek di hotel dan restoran, dengan sebagian kecil penulisan tentang perayaan di YP Dharma Vita. Hotel dan restoran menunjukkan kesan

bahwa perayaan Imlek adalah perayaan yang mewah. Apalagi nama-nama hotel dan restoran yang ditulis di artikel ini semuanya adalah yang tergolong kelas atas. Bagaimana etnis Tionghoa memenuhi hotel dan restoran tersebut (hingga *full-booked*), artis dari Tiongkok yang diundang untuk mengisi acara, juga menunjukkan wacana bahwa etnis Tionghoa adalah golongan menengah ke atas. Tradisi membagikan *angpao* juga menjadi salah satu unsur yang mengesankan dominannya unsur ekonomi dalam perayaan ini. Apalagi di dalam artikel ini disebutkan secara eksplisit nominal uang yang disediakan dalam *angpao* bagi pengunjung. Maka wacana budaya perayaan Imlek di sini lebih condong ke arah wacana komersial yang mewah, hari raya Imlek seakan mengalami perubahan menjadi sebuah komoditi untuk dijual. Wacana ini mengaburkan makna dari tahun baru Imlek itu sendiri.

Sedangkan wacana religius, mengaitkan hari raya Imlek sebagai hari raya keagamaan. Menilik dua tempat ibadah yang ditampilkan, yakni kelenteng dan vihara, mengesankan adanya wacana bahwa Imlek adalah hari raya sekaligus bagi umat penganut tiga agama atau Tri Dharma (Budha, Konghucu dan Taoisme). Di sini baru terlihat makna tahun baru Imlek sebagai momen untuk bersyukur, lewat diberitakannya kegiatan sembahyang pada malam menjelang tahun baru. Namun artikel ini juga menyelipkan berita tentang di sebuah kelenteng telah dibuat kue keranjang terbesar se-Indonesia yang memecahkan rekor MURI. Jadi meskipun dalam wacana religius pun, masih terselip wacana kemewahan.

Hal lain yang patut dicatat adalah intertekstualitas dalam kutipan perkataan pimpinan kelenteng Sanggar Agung, yakni sembahyang Imlek tersebut terbuka bagi penganut agama apa pun. Di sini terlihat kesan cairnya aspek religi dari etnis Tionghoa, mereka digambarkan sebagai kelompok yang terbuka untuk berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang lain. Maka di tengah-tengah wacana tentang kekuatan ekonomi etnis Tionghoa, yakni seolah-olah mereka adalah kelompok yang eksklusif, masih diselipkan wacana bahwa etnis Tionghoa tidak eksklusif dari segi religi, karena situs religi mereka terbuka bagi semua golongan.

Selain dua wacana mengenai perayaan Imlek tersebut, di bagian awal artikel juga ada wacana tentang simbolisme lain seputar Imlek, yakni makna turunnya hujan di malam tahun baru Imlek. Hujan dianggap membawa keberuntungan di tahun yang baru. Ini sebenarnya mengandung secercah makna lain tentang Imlek, yakni selain bersyukur, juga tentang harapan untuk tahun yang baru. Wacana tentang simbol-simbol tradisi Imlek seperti ini sebenarnya diselipkan juga di dalam isi artikel, namun terkesan menjadi tidak terlalu dominan karena tidak diulas lebih lanjut mengenai maknanya, misalnya tidak adanya penjelasan mengenai makna *angpao*, kue keranjang, warna merah, dan juga apa artinya berkumpul bersama pada malam tahun baru. Yang terkesan lebih dominan dalam interdiskursivitas artikel ini justru adalah wacana budaya (komersial) dan wacana religius tadi.

3. Praktik Sosial

Tahun baru Imlek tahun 2003 ini merupakan momen pertama kalinya Imlek menjadi hari libur nasional. Oleh karena itu, terasa sekali euforia etnis Tionghoa menyambut momen ini. Menurut teks di *Jawa Pos* ini, perayaan Imlek menjadi sangat meriah, bahkan terkesan kelewat meriah dan mewah. Artikel ini terlihat melukiskan euforia itu melalui ramainya suasana perayaan serta antusiasnya masyarakat Tionghoa Surabaya merayakan Imlek. Di sini tampaknya *Jawa Pos* berusaha memberikan gambaran tahun baru Imlek secara berimbang, yakni sebagai sebuah konstruksi budaya yang terdiri dari aspek budaya dan aspek religius. Namun pada kenyataannya, aspek budaya yang disajikan di sini cenderung merupakan aspek komersial, dan menonjolkan sisi kekuatan ekonomi etnis Tionghoa. Sedangkan aspek tradisi, simbol-simbol mengenai Imlek itu sendiri tidak terlalu banyak ditampilkan. Bisa kita katakan bahwa etnis Tionghoa melalui artikel ini dikonstruksi dari beberapa sisi, sisi agama, sisi budaya maupun sisi sosial. Baik di sisi agama maupun budaya, masih terkesan bahwa etnis Tionghoa itu identik dengan ekonomi kelas atas, sebagai

kelompok sosial yang elit, yang eksklusif, yang tergambar dari kemewahan yang ada di dua sisi tersebut (walau lebih nampak pada sisi budaya komersialnya), dimana pada sisi religius pun ada unsur ‘mewah’ melalui pembuatan kue keranjang terbesar. Bahkan kesan khuyuk yang hendak ditampilkan lewat sisi religius, terasa kurang kuat, terlalu kontras dengan kemeriahan perayaan di sisi budaya (perayaan di hotel dan restoran). Maka terlihat bahwa konteks yang mewarnai sisi budaya komersial di sini adalah adanya kuasa dari kelas sosial yang lebih tinggi, misalnya dari hotel-hotel berbintang yang dituliskan pada artikel, yang mempengaruhi produksi teks ini. Kesan mewah dan *wah* yang diperoleh dari penyajian acara Imlek di hotel-hotel tersebut, dengan dihadiri oleh pengusaha Tionghoa, merupakan hal yang terkesan sengaja ditonjolkan oleh teks. Dan selanjutnya teks ini ikut mempengaruhi pembaca dalam mempersepsi etnis Tionghoa.

Walau demikian, sisi religius yang ditampilkan di sini jelas menunjukkan bahwa etnis Tionghoa juga merupakan etnis yang beriman pada Tuhan. Dan wacana tahun baru Imlek sebagai hari raya keagamaan juga muncul. Melalui sisi religius ini pula, bila diamati dari sisi sosialnya, etnis Tionghoa juga digambarkan sebagai kelompok yang cair dan mau terbuka untuk berinteraksi dengan golongan yang lain, khususnya melalui situs religi mereka yang dibuka bagi pemeluk agama apa pun.

4.2.1.2 *Sìshuǐ yáng nián chūnjié huāxù* (洒水羊年春节花絮, Kilasan Tahun Baru Imlek Tahun Kambing di Surabaya), 3 Februari 2003, *Harian Nusantara*

Artikel ini bertema senada dengan artikel *Jawa Pos*, yakni liputan seputar perayaan Imlek di Surabaya.

1. Analisis Teks

Berbeda dengan *Jawa Pos*, *Harian Nusantara* menggunakan kata “sederhana” untuk menunjukkan bagaimana etnis Tionghoa Surabaya merayakan Imlek.

Etnis Tionghoa Surabaya merayakan tahun baru Imlek dalam suasana sederhana dan gembira. (*Sìshuǐ de huárén zúqún zài jiǎnpǔ hé huānlè de qīfēn zhōng guòjié.*)

Kata “sederhana” di sini terlihat ingin menekankan terlebih dahulu bahwa etnis Tionghoa bukan seperti yang distereotipkan selama ini, yakni sebagai kalangan yang kaya, dan memiliki hidup yang mewah.

Narasi yang digunakan juga berkebalikan dengan *Jawa Pos*. Di sini diceritakan perayaan Imlek di kelenteng terlebih dahulu, diselingi dengan perayaan di hotel dan restoran, kemudian dilanjutkan dengan berita tentang kue keranjang terbesar di kelenteng Sanggar Agung, lalu berita tentang ucapan selamat tahun baru kepada etnis Tionghoa yang merayakan, kemudian ditutup dengan cuaca hujan di malam tahun baru, yang merupakan penyemangat dalam menghadapi tahun yang baru. Sekali lagi terlihat penekanan yang berbeda dengan *Jawa Pos*, yakni kemeriahan dan kemewahan tidak ditempatkan di posisi awal, tetapi *Harian Nusantara* lebih menekankan aspek religius dan kerukunan antar etnis.

Isi doa yang dipanjatkan oleh para umat di kelenteng dituliskan dengan lebih umum, tidak nampak adanya presuposisi ‘keadaan Indonesia yang semakin buruk’, tetapi lebih merupakan doa agar Indonesia aman dan makmur. Liputan seputar perayaan Imlek di hotel dan restoran tidak dideskripsikan sedetil di *Jawa Pos*, tetapi hanya ditulis dalam satu paragraf saja. Secara singkat disebutkan berbagai macam acara yang diadakan oleh hotel dan restoran, yaitu barongsai dan tarian naga, penampilan wushu, penyalaan kembang api, serta pembagian *angpao*. Ditambahkan pernyataan bahwa di media televisi juga ditayangkan acara-acara khusus Imlek.

Narasi tentang pemberian ucapan selamat tahun baru Imlek oleh media, serta partai politik, merupakan hal yang tidak ada dalam artikel di *Jawa Pos*, namun mendapat porsi cukup besar di *Harian Nusantara*, dengan dicantumkannya foto-foto ucapan selamat tersebut. Nama-nama media serta partai politik yang memberi ucapan selamat ditulis dengan cukup detail. Hiperbola “*suichu*” yang berarti di mana-mana, digunakan untuk menggambarkan bahwa ucapan selamat ini sangat banyak dijumpai di segala media dan

penjuru kota. Deskripsi tentang spanduk-spanduk ucapan yang dipasang di mana-mana itu pun ditulis dengan puitis, yakni spanduk-spanduk itu ‘berkibar-kibar mengikuti angin’, ‘menambah kemeriahan warna Imlek’.

Spanduk dan iklan ucapan selamat tahun baru Imlek oleh surat kabar dan majalah, para pedagang serta partai politik dapat dijumpai di segala penjuru kota Surabaya. Misalnya Harian Surya, Radar Surabaya, Indonesia Profit Magezin, Agar-Agar Satelit Sriti. Di jalan Darmo, Basuki Rachmat, Tunjungan dan Bubutan terpasang spanduk (ucapan); Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di jalan Panglima Sudirman, Partai Kebangkitan Bangsa di kelenteng Tri Dharma di jalan Kampung Dukuh, memasang spanduk yang mencolok bertuliskan “GONG XI FA CAI”, berkibar-kibar mengikuti angin, menambah warna meriah Imlek. (*Gè bào zázhi, shāngǔ jí zhèngdǎng zhùhè chūnjié de héngfú zài sishuǐ gè dàjiē lùkǒu suíchù kējìàn. Rú “SURYA rìbào”, “RADAR SURABAYA”, “INDONESIA PROFIT MAGEZIN”, “SATELIT SRITI yàn cài jīng” děng, zài DARMO jiē, BASUKI RACHMAT jiē, TUNJUNGAN jiē jí BUBUTAN jiē děng chù yǒu guà héngfú; guómín shǐmìng dǎng, dòuzhēng mínzhǔdǎng zài PANGLIMA SUDIRMAN jiē, mínzú fùxīng dǎng zài KAMPUNG DUKUH jiē de sǎn jiào miào qián xuánguà de xiānyàn de xiě yǒu “GONG XI FA CAI” de héngfú yíngfēng zhāozhǎn, shǐ chūnjié zēngsè bù shǎo.*)

Presuposisi terlihat pada bagian akhir artikel

Basahnya hujan yang ditunggu di malam sebelum dan sesudah tahun baru Imlek di Surabaya, membuat orang-orang lebih percaya diri, dalam menghadapi tahun baru yang penuh tantangan, mengalahkan kesulitan, meraih kemenangan. (*Sishuǐ shì chūnjié qiánhòu liǎng tiān gān yǔ de zīrùn, shǐ rénmen gèng chōngmǎn xìnxīn, qù yíngjiē chōngmǎn tiǎozhàn de yī nián, zhànshèng kùnnán, zhēngqǔ shènglì.*)

Di sini dipresuposisikan bahwa tahun yang baru akan penuh dengan tantangan. Ini berbeda dengan kutipan di *Jawa Pos* yang mengatakan kondisi Indonesia yang semakin buruk, namun secara implisit juga terkandung makna yang hampir sama, yakni di tahun yang baru akan ada banyak kesulitan dan tantangan.

2. Praktik Wacana

Mirip dengan artikel *Jawa Pos*, artikel ini menggunakan beberapa wacana untuk menggambarkan perayaan Imlek. Namun bila di *Jawa Pos* digunakan wacana religius dan wacana budaya, di artikel ini digunakan tiga macam wacana, yakni wacana pemberian ucapan selamat tahun baru kepada etnis Tionghoa, wacana religius dan wacana budaya.

Wacana tentang simbol-simbol ataupun makna tradisi Imlek juga tidak nampak di sini. Bahkan makna tentang hujan di malam tahun baru yang oleh *Jawa Pos* disebutkan sebagai pertanda keberuntungan, di sini tidak disebutkan demikian. Hujan yang dinanti (karena lama tidak hujan) atau *ganyu*, di sini dikatakan menambah semangat dan percaya diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan di tahun yang baru. Jadi tidak tampak unsur-unsur seperti keberuntungan atau hal-hal yang berbau kesejahteraan materi seperti yang cukup kental dilukiskan di *Jawa Pos*. Ini mungkin bisa dipahami sebab sebagai surat kabar etnis Tionghoa, pembaca surat kabar ini dianggap sudah paham dan terbiasa dengan makna-makna semacam itu. Di sisi lain, wacana ‘kesederhanaan’, dan tidak terlalu ditekankannya perayaan di hotel dan restoran, mungkin juga senada dengan tidak adanya wacana tentang keberuntungan, yang memberikan konstruksi etnis Tionghoa sebagai etnis yang tidak hanya mengejar kekayaan materi saja. Ini merupakan wacana yang kontras dengan wacana di *Jawa Pos*, merupakan wacana tandingan yang menggugat (walau tidak secara eksplisit) stereotip bahwa etnis Tionghoa merupakan ‘binatang ekonomi’. Mungkin secercah wacana tentang kekuatan ekonomi etnis Tionghoa terlihat lewat penulisan berita kue keranjang raksasa yang memecahkan rekor MURI.

Tidak ada kutipan perkataan seseorang di dalam artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intertekstualitas terwujud dari pengutipan isi ucapan selamat tahun baru yang tertulis di berbagai media maupun spanduk, namun itu pun hanya berupa “Gong xi fa cai” yang sudah umum. Di sisi lain, penggunaan wacana tentang pemberian ucapan selamat tahun baru di berbagai media maupun oleh berbagai parpol, menunjukkan bahwa etnis Tionghoa kini memang benar-benar ‘diakui’ oleh banyak pihak sebagai bagian dari bangsa ini, dan tahun baru Imlek juga benar-benar ‘diakui’ sebagai salah satu hari raya nasional.

Dalam rantai teks pemberitaan tentang Imlek, artikel ini tentu saja merupakan satu mata rantai dari rantai teks yang panjang. Sebab dalam memberitakan Imlek, *Harian Nusantara* biasanya menyuguhkan liputan dalam jumlah yang besar, dan tema Imlek akan muncul terus hingga lewat satu bulan. Dan khususnya terkait dengan wacana merayakan Imlek dengan sederhana, di beberapa terbitan sebelum 1 Februari 2003 ini terdapat beberapa artikel yang menghimbau atau menekankan agar etnis Tionghoa ‘waspada’, merayakan Imlek dengan sederhana dan tidak berlebihan, untuk menghindari kemungkinan timbulnya prasangka buruk atau iri hati dari etnis yang lain.

3. Praktik Sosial

Dalam euforia menyambut Imlek sebagai perayaan tahun baru, sekaligus sebagai momen diakuinya tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional, *Harian Nusantara* melalui artikel ini cenderung memberikan nada perayaan yang ‘redup’. Ia lebih menonjolkan kesederhanaan. Tidak ‘diumbar’nya perayaan Imlek di hotel dan restoran, menunjukkan kesan kesederhanaan itu, selain juga tidak dideskripsikannya simbol-simbol Imlek yang berkaitan dengan kemakmuran. Maka produksi teks ini lebih dipengaruhi oleh wacana bahwa etnis Tionghoa jangan menjadi eksklusif, jangan mempertontonkan kekayaan, untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial. Aspek menjaga keharmonisan antar etnis dan antar kelas mewarnai produksi teks.

Selain kesederhanaan, juga ditekankan bahwa posisi etnis Tionghoa di Indonesia kini sudah jauh lebih baik secara ‘legal’, lewat diliputnya pemberian ucapan selamat tahun baru di berbagai spanduk di berbagai penjuru kota, termasuk oleh berbagai parpol. Ini memberi kesan bahwa etnis Tionghoa dan hari raya Imlek sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan demikian melalui teks ini, *Harian Nusantara* berusaha mempengaruhi pembaca untuk memiliki persepsi bahwa etnis Tionghoa telah benar-benar diakui sebagai elemen bangsa.

4.2.1.3 Arak Lima Patung Dewa, 22 September 2014, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Judul artikel ini, “Arak Lima Patung Dewa”, tidak menghadirkan subjek. Karena tidak bersubjek, kata “arak” pun menjadi bermakna ambigu. “Arak” selain berarti “mengarak”, juga bisa berarti sejenis minuman keras. Maka pembaca harus membaca isi artikel barulah bisa memahami arti judul ini. Dari isi artikel, diketahui bahwa “arak” bermakna “mengarak”, dan subjeknya adalah umat Tri Dharma di Surabaya.

Digunakan kata kerja “gendong” untuk menyatakan perbuatan mengangkat patung.

Ada lima patung dewa yang digendong belasan umat berkeliling di sekitar kelenteng.

Sekitar pukul 09.00, lima patung itu digendong keluar dari kelenteng.

Umat Tri Dharma langsung berebut untuk menggendongnya. Mereka yang tidak kebagian jatah menggendong tandu ikut berjalan bersama patung tersebut.

Di kalimat terakhir ini baru diketahui kalau yang digendong adalah tandu, sehingga seharusnya lebih tepat menggunakan kata “memikul”. Terkesan ada unsur “memanusiawikan” patung-patung tersebut, sehingga digunakan kata “gendong” sebagai metafora yang memiliki makna lebih akrab.

Ada ketidaksinambungan yang terjadi antara kalimat pertama dengan kalimat-kalimat di belakangnya pada narasi di paragraf ini:

Selama berkeliling, tandu tempat patung dewa itu sesekali bergerak. Umat Tri Dharma memercayai bahwa sang dewa sedang memberikan berkah kepada masyarakat di dunia. Rute yang dilewati mulai dari kelenteng di Jalan HOS Cokroaminto menuju Jalan dr Soetomo, lalu memutar melalui Jalan Imam Bonjol. Dari Jalan Imam Bonjol, kembali ke Jalan Kartini. Jaraknya diperkirakan hampir 3 kilometer.

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “tandu tempat patung dewa itu sesekali bergerak”. Karena kalimat-kalimat berikutnya tidak memiliki korelasi dengan kalimat ini. Secara implisit kita hanya bisa menerka, bahwa mungkin maksudnya adalah, tandu tempat

patung dewa itu bergerak sendiri, yang menandakan bahwa sang dewa sedang memberikan berkah. Jadi ada unsur supranatural yang hendak disampaikan.

Dari segi presuposisi, terdapat presuposisi tentang kerukunan. Ini terlihat dari bagian berikut ini:

Lalu, berkah dan kerukunan. Dia mencontohkan kesenian hadrah al banjari yang tampil di acara tersebut. Dengan begitu, terjalin kerukunan tanpa membedakan suku, adat, ras, ataupun agama.

Hadirnya kesenian hadrah al banjari dianggap mewakili adanya kerukunan antar kelompok.

Hal ini juga dinyatakan di awal artikel:

Kirab itu juga simbol kerukunan karena diikuti berbagai etnis selain Tionghoa.

Adanya berbagai etnis yang mengikuti acara ini, dianggap identik dengan adanya kerukunan. Hubungan sebab-akibat ini dipresuposisikan benar, padahal belum tentu demikian. Dan tampaknya artikel ini berusaha mempertegas kebenaran hal ini, dengan menambahkan komentar salah seorang undangan, yang mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bukti bahwa masyarakat beragam etnis bisa berbaur tanpa ada perbedaan sama sekali. Namun kata “undangan” di sini muncul tiba-tiba, tanpa ada penjelasan sebelumnya tentang siapa saja yang diundang dan siapa yang mengundang, sehingga identitas orang yang berkomentar ini tidak terlalu jelas.

Sementara itu, untuk melengkapi artikel ini, ditampilkan sebuah foto suasana arak-arakan. Foto ini menggambarkan orang-orang yang sedang menandu patung yang diarak, dengan diikuti oleh keramaian. Nuansa Tionghoa dimunculkan lewat dominasi warna kuning merah dari pakaian para rombongan pengarak, serta warna dominan merah pada dekorasi patung.

2. Praktik Wacana

Intertekstualitas dalam artikel ini nampak pada kutipan-kutipan dari perkataan subjek di dalam berita, yakni seorang pengurus kelenteng, serta seorang undangan. Kutipan dari pengurus kelenteng di-rekontekstualisasikan dengan lebih menekankan pada wacana kerukunan antar golongan. Demikian pula dengan kutipan dari seorang undangan.

Kemudian wacana tentang kerukunan ini bercampur pula dengan wacana kegiatan keagamaan, seperti berkah dan doa. Walau yang lebih dominan ditonjolkan adalah wacana kerukunan dan multikultural, sedangkan wacana kegiatan keagamaannya lebih terkesan hanya sebagai latar cerita saja. Latar belakang acara keagamaan ini juga tidak dipaparkan dengan jelas, hanya disebutkan sebagai simbol kebersihan. Bahkan kegiatan kirab patung itu sendiri, yang merupakan sebuah ritual keagamaan, dikesankan menjadi lebih ‘humanis kultural’ dengan penggunaan kata kerja ‘gendong’ yang bernuansa lebih humanis.

3. Praktik Sosial

Dari analisis teks dan praktik wacana, diketahui bahwa wacana multikultural, kerukunan antar etnis dan golongan, menjadi poin penekanan pada teks ini. Kegiatan keagamaan etnis Tionghoa (Tri Dharma) digambarkan sebagai sebuah kegiatan budaya, bahkan terjadi percampuran budaya dengan adanya penampilan kesenian dari etnis lain di dalam arak-arakan. Ditambahkannya pula kesenian hadrah al banjari yang juga bernuansa agama, semakin mencerminkan kesan luwesnya aspek agama etnis Tionghoa, yang mungkin mirip dengan sinkretisme dalam budaya Jawa.

Jawa Pos sebagai surat kabar arus utama, dengan pembaca yang berasal dari beragam etnis dan golongan, terlihat mencoba mendengungkan indahnya keberagaman dan kerukunan antar golongan melalui teks ini. Dengan menekankan gambaran bahwa etnis Tionghoa bersifat terbuka, mau menerima budaya lain ke dalam dirinya, teks ini hendak memberikan persepsi kepada pembaca bahwa etnis Tionghoa telah ‘mencairkan’ sekat dirinya dengan kelompok etnis lain. Sekat ini dicairkan dengan memberikan persepsi bahwa

budaya Tionghoa dan budaya etnis lain bisa saling bercampur. Lebih dianggap pentingnya wacana akulturasi budaya, daripada wacana multikultural, merupakan hal yang mempengaruhi produksi teks ini.

4.2.1.4 *Qìngzhù guǎng zé zūnwáng chéngdào jí chén: Sìshuǐ Fèng Shān Gǔ Dì miào jǐn shēn shèng jiào xúnyóu* (庆祝广泽尊王成道吉辰：泗水凤山古地庙举行金身圣轿巡游, Merayakan Hari Bodhi Dewa *Guangze*: Kelenteng *Feng Shan Gu Di* Surabaya Mengadakan Kirab Patung Dewa), 23 September 2014, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Harian Nusantara juga memuat artikel mengenai kegiatan yang sama pada 23 September 2014. Perbedaan yang langsung nampak adalah pada judul. Artikel di *Harian Nusantara* menggunakan judul yang panjang, berupa kalimat yang lengkap dengan subjeknya, yakni Kelenteng *Feng Shan Gu Di* (Hong San Ko Tee dalam dialek Hokkian). Maka dari judul ini pembaca dapat langsung mengetahui kira-kira isi dari artikel ini. Perbedaan yang lain adalah disebutkannya alasan melakukan kirab ini, yakni bertepatan dengan momen Hari Bodhi Dewa *Guangze*.

Penyebutan nama orang-orang yang ada dalam pemberitaan ini disebutkan dengan referensi yang cukup lengkap, dengan menyebutkan jabatan masing-masing. Ini berbeda dengan artikel di *Jawa Pos*, yang hanya menggunakan referensi jabatan umum, yakni ‘pengurus kelenteng’. Sedangkan di *Harian Nusantara*, nama dan jabatan disebutkan lengkap: *Dōng zhǎowā sān jiào miàoyǔ liánhé huì zhǔxí Wú Shìjiàn* (东爪哇三教庙宇联合会主席吴式健, Ketua Persatuan Kelenteng Tri Dharma Jawa Timur *Wu Shijian*), *Sìshuǐ Sānbǎo shèngmiào zhǔxí Yáng Jìnwěi* (泗水三宝圣庙主席杨进伟, Ketua Kelenteng *Sanbao Sheng* Surabaya *Yang Jinwei*), *Fèng shān gǔ dì miào zhǔxí Chén Ruǐliǔ nǚshì* (凤山古地庙主席陈瑞柳女士, Ketua Kelenteng *Feng Shan Gu Di* Ibu *Chen Ruiliu*). Artikel ini menggunakan kata *nǚshì* (女士, ibu/lady) untuk menyebut ketua kelenteng *Feng Shan Gu*

Di, sementara dua tokoh lainnya tidak menggunakan sebutan (ibu/bapak) seperti ini. Sedangkan di bagian belakang artikel, digunakan sebutan ‘ketua’, yakni *Chén Ruiliǔ zhǔxí* (陈瑞柳主席, Ketua *Chen Ruiliu*). Hal ini menandakan penyebutan nama seseorang merupakan hal yang cukup menjadi perhatian dalam artikel di *Harian Nusantara*.

Perbedaan juga nampak pada narasi prosesi barisan kirab, di mana *Harian Nusantara* menggambarkan urutan kirab dengan: pertama, Reog Ponorogo dan tari naga (Liong) dari kelenteng *Feng Shan Gu Di* mengawali kirab, disambung dengan kirab patung Dewa *Guangze*, patung *Mazu* (Makco), patung *Guanshiyin pusa* (Kwan Im), patung Dewa *Fu de zheng* dari kelenteng *Feng Shan Gu Di*, serta patung Dewa *Guangze* dari kelenteng *Bao An Gong* Tanggul, Jember. Artikel ini tidak menyebutkan adanya kesenian hadrah al banjari, dan barongsai, sedangkan di *Jawa Pos*, tidak disebutkan ada Liong. Nama dari lima dewa yang dikirab juga tidak sama. *Harian Nusantara* juga menyebutkan adanya bantuan dari GP Ansor dan Bonek Hitam Putih untuk membantu mengamankan acara, sedangkan di *Jawa Pos* tidak disebutkan.

Prosesi kirab dilukiskan dengan kata *hào hào dàng dàng* (浩浩荡荡, dengan gagah dan kuat). Ini berbeda dengan penggambaran di artikel *Jawa Pos*, yang menggunakan kesan supranatural yaitu Bergeraknya tandu. Sedangkan di *Harian Nusantara*, lebih menggambarkan kesan natural, yakni megahnya arak-arakan patung-patung ini. Sementara itu, foto-foto yang dipasang di *Harian Nusantara* jauh lebih banyak dari *Jawa Pos*, dengan total ada enam buah foto, lengkap menggambarkan suasana arak-arakan, tarian Liong, penampilan Reog, serta suasana sembahyang di kelenteng.

Presuposisi tentang kerukunan di sini diperlunak, dengan penggunaan modalitas *xīwàng* (希望, berharap), serta *cùjìn* (促进, mendorong). Kerukunan yang terjadi merupakan hal yang diharapkan bisa didorong melalui kegiatan ini. Ini berbeda dengan presuposisi yang

lebih keras di *Jawa Pos*, yang menyatakan bahwa kerukunan akan terjalin dengan adanya berbagai etnis dan budaya yang tampil bersama, bahkan langsung dikatakan bahwa kegiatan ini adalah simbol kerukunan.

2. Praktik Wacana

Intertekstualitas dalam artikel ini diwujudkan melalui kutipan tak langsung perkataan ketua kelenteng, *Chen Ruiliu*. Ini berbeda dengan *Jawa Pos* yang lebih banyak menggunakan kutipan langsung. Berbeda dengan *Jawa Pos*, tidak ada wacana mengenai simbol bersih-bersih. *Harian Nusantara* merekontestualisasikan perkataan ketua kelenteng dengan menyebutkan terlebih dahulu momen peringatan yang mendasari diadakannya kegiatan kirab ini, dan kegiatan sembahyang untuk memperingati momen tersebut. Kegiatan kirab ini tidak diadakan setiap tahun, sedangkan sembahyang itu diadakan tiap tahun. Wacana tentang kerukunan sama dengan apa yang disampaikan di *Jawa Pos*, hanya saja lebih diperlunak dan tidak terlalu dominan, dan tidak disebutkan mengenai kesenian hadrah al banjari, dan di *Harian Nusantara* ditambahkan wacana tentang permohonan doa agar negara diberkati, semoga aman dan makmur.

Maka interdiskursivitas yang disampaikan oleh artikel ini adalah percampuran wacana tentang keagamaan (sembahyang dan peringatan hari raya agama), wacana tentang kerukunan dan keberagaman, serta wacana tentang berkah bagi negara. Namun wacana yang lebih dominan adalah tentang kegiatan keagamaan itu sendiri.

3. Praktik Sosial

Nama-nama tokoh Tionghoa yang hadir dalam acara ini ditampilkan dengan cukup detil beserta jabatannya. Padahal yang paling berperan hanyalah ketua kelenteng. Sedangkan dua tokoh yang lainnya terkesan sebagai ‘tamu kehormatan’ yang perlu ditulis namanya di dalam artikel, walau tidak disebutkan apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut di

kegiatan ini. Ini merupakan salah satu karakteristik media Tionghoa di Indonesia seperti yang disoroti oleh Prasetyo (2010).

Wacana keagamaan mendapat penekanan lebih besar di artikel ini, ditandai dengan penulisan nama-nama patung dewa dengan lebih teliti, serta unsur peringatan keagamaan, dengan adanya sembahyang. Proses kirab juga tidak terkesan hanya sebagai sebuah wacana budaya, tetapi juga merupakan bagian dari peringatan keagamaan. Dengan demikian produksi teks ini dipengaruhi oleh wacana bahwa etnis Tionghoa merupakan etnis yang sangat religius, tidak berbeda dengan etnis lainnya di Indonesia yang menganut falsafah Ketuhanan yang Maha Esa. Kuasa dari norma atau falsafah sila pertama Pancasila ini tampaknya mendasari produksi teks.

Wacana kerukunan dan keberagaman juga ditampilkan, namun lebih dari sisi posisi sosial etnis Tionghoa, yaitu dalam hubungan sosial yang harmonis dengan etnis yang lain di negara ini, bukan mengesankan adanya unsur percampuran atau sinkretisme budaya seperti yang terkesan di artikel di *Jawa Pos*. Hal ini nampak dengan tidak disebutnya penampilan kesenian hadrah yang bernuansa agama, namun ditampilkannya kelompok massa dari etnis lain seperti GP Ansor dan Bonek Hitam Putih. Jadi kesan multikultural lebih kuat di sini dibandingkan dengan akulturasi budaya. Dan memang konteks multikultural dan integrasi merupakan hal yang terlihat di 'kampanye'kan oleh *Harian Nusantara*, sehingga mendasari produksi teks ini.

4.2.2 Nasionalisme Etnis Tionghoa

Untuk berita yang berkaitan dengan nasionalisme, pada terbitan masa kini, digunakan berita tentang peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Perbedaan yang langsung terlihat antara *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara* adalah bahwa di *Jawa Pos* tidak banyak dimuat liputan upacara atau peringatan kemerdekaan secara khusus yang dilakukan oleh etnis Tionghoa. Ini bisa dipahami karena *Jawa Pos* adalah harian arus utama. Misalnya, pada hari

kemerdekaan Indonesia di tahun 2014, tidak ditemukan artikel tentang etnis Tionghoa merayakan kemerdekaan di *Jawa Pos*. Sedangkan di *Harian Nusantara*, cukup banyak artikel tentang bagaimana etnis Tionghoa merayakan atau memperingati kemerdekaan Indonesia di setiap tahunnya. Untuk keperluan perbandingan, maka tesis ini mengambil artikel di *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara* yang memuat kegiatan peringatan kemerdekaan yang senada. Sedangkan di tahun 2003, tidak ditemukan artikel tentang peringatan hari kemerdekaan yang senada, sehingga analisis artikel tahun 2003 menggunakan dua topik yang berbeda.

4.2.2.1 Di Jalanan Kami Tidak Bisa Upacara. 18 Agustus 2003, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Teks artikel tidak menyebutkan secara eksplisit predikasi ‘Tionghoa’ bagi subjek dalam artikel ini. Namun dari foto yang disajikan cukup besar, dari penampilan fisik, terlihat bahwa siswa-siswi YPPI mayoritas adalah etnis Tionghoa. Presuposisi terlihat dari

Cara mereka menghormat bendera tidak kalah dengan siswa YPPI 1 lainnya.

Kata-kata ‘tidak kalah dengan siswa YPPI 1 lainnya’ menunjukkan bahwa siswa YPPI dianggap sebagai yang telah mengenyam bangku pendidikan, sehingga seharusnya memiliki ‘cara menghormat bendera yang benar’. Selanjutnya presuposisi kembali terlihat pada

“Pertunjukan reog dan barongsai ini untuk mengenalkan budaya kita yang universal,”
ujar Totok, panitia.

‘Budaya kita’ di sini seharusnya mengacu pada budaya Indonesia. Budaya Indonesia dipresuposisikan sebagai budaya yang ‘universal’. Sebenarnya tidak terlalu jelas apa makna ‘universal’ di sini. Bila reog dan barongsai yang dipadukan menyatakan ‘universal’, terasa kurang cocok. Mungkin yang dimaksud dengan ‘universal’ sebenarnya adalah

‘beranekaragam’. Berikutnya dalam narasi tentang pembauran siswa-siswi YPPI dengan anak jalanan

Usaha membaurkan anak-anak ini ternyata cukup berhasil. Apalagi anak-anak jalanan yang hadir tidak terlihat canggung bercengkerama dengan siswa YPPI 1. Sebaliknya siswa YPPI 1 juga sangat senang mendengar pengalaman-pengalaman teman-temannya ini. ”Saya jadi kepingin ikut ngamen bareng mereka,” kata salah satu siswa SLTP YPPI.

Dari narasi di atas, tampak bahwa ‘pembauran yang berhasil’ di sini diukur dari adanya interaksi yang akrab, saling bercengkerama antara siswa YPPI dengan anak-anak jalanan. Hal ini secara implisit mengatakan bahwa di luar acara ini, dalam keseharian, terkesan tidak cukup adanya ‘pembauran’ seperti ini, atau tidak cukup adanya interaksi yang akrab antara anak-anak Tionghoa dengan anak-anak etnis lain. Namun teks ini tidak menjelaskan hal ini lebih jauh.

2. Praktik Wacana

Wacana peringatan hari kemerdekaan RI di sini digabungkan dengan wacana kepedulian antar etnis (dan kelas), yakni antara siswa-siswi sekolah YPPI dengan anak jalanan. Di samping itu, ada pula wacana keberagaman budaya Indonesia, dimana budaya Tionghoa termasuk salah satu di antaranya, dengan ditampilkannya kesenian reog dan barongsai bersama-sama. Wacana kepedulian terhadap sesama serta kerukunan antar etnis ini menjadi wacana yang dominan dalam artikel ini. Melalui presuposisi yang ditampilkannya, terkesan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, pergaulan atau interaksi yang akrab antara etnis pribumi (dari kelas ekonomi lemah) dengan etnis Tionghoa masih kurang terjalin. Sehingga diperlukan acara seperti ini sebagai cara untuk ‘membraurkan’ mereka. Di sini konsep ‘pembauran’ sudah berbeda dengan konsep ‘pembauran total’ di Orde Baru. Konsep ‘pembauran’ di sini lebih menekankan pada interaksi sosial, bukan asimilasi budaya. Ini ditunjukkan pula dengan tampilnya kesenian reog dan barongsai bersama-sama, yang menandakan keragaman, bukan penyatuan dengan asimilasi.

3. Praktik Sosial

Jawa Pos tidak sesering *Harian Nusantara* dalam memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme etnis Tionghoa. Pada tahun 2003 ini pun demikian. Liputan tentang peringatan hari kemerdekaan RI di sekolah YPPI ini lebih menekankan pada wacana kepedulian kepada anak jalanan. Pesan yang hendak disampaikan lebih kepada agar etnis Tionghoa juga menaruh perhatian pada etnis pribumi khususnya dari kalangan masyarakat kelas bawah, sebab melalui ditunjukkannya interaksi yang akrab antara siswa YPPI dengan para anak jalanan itu, kehidupan yang rukun dan damai antar etnis dan antar kelas sosial bukanlah hal yang tidak mungkin. Kuasa ditunjukkan justru berasal dari masyarakat lapisan bawah, dimana kepedulian terhadap mereka menjadi konteks yang mempengaruhi produksi teks ini. Dan dari teks yang dihasilkan ini, terkesan ingin memberikan pengaruh kepada pembaca agar etnis Tionghoa dipersepsi menjadi etnis yang sudah dan seharusnya peduli terhadap sesama, khususnya etnis lain dan golongan kelas sosial bawah.

4.2.2.2 *Huázú yīng rúhé kàndài 2004 nián dàxuǎn? Jièshào sān zhǒng lùndiǎn gōng dàjiā kǎolù hé tāolùn* (华族应如何看待 2004 年大选? 介绍三种论点供大家考虑和讨论, Bagaimanakah Seharusnya Etnis Tionghoa Menghadapi Pemilu 2004? Tiga Argumen Sebagai Bahan Pertimbangan dan Diskusi). 26 Februari 2003, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Presuposisi sudah terlihat pada kalimat pada *lead* berita berikut ini

Harus bagaimanakah etnis Tionghoa sebagai satu elemen penting suku bangsa di Indonesia menyikapi (pemilu 2004), merupakan hal yang layak kita telaah. (*Zuòwèi Yīnní mínzú yīgè zhòngyào zúchéng bù fèn de huázú, yīng rúhé kàndài jí cǎiqǔ hé zhǒng tàidù, shì hěn zhídé wǒmen shēnrù yánjiū de kèti.*)

Presuposisi di sini menganggap bahwa etnis Tionghoa adalah salah satu elemen penting suku bangsa di Indonesia. Di sini terlihat bahwa etnis Tionghoa dikonstruksi sebagai salah satu etnis yang ‘penting’ di Indonesia. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut makna kata ‘penting’ di sini.

Pada analisis tentang pilihan sikap jenis pertama orang Tionghoa menghadapi pemilu, juga terdapat presuposisi

.....berdasarkan pelajaran yang dialami etnis Tionghoa di masa lalu—terutama luka sejarah peristiwa “30 September”—, menganggap etnis Tionghoa lemah, tak berdaya, dalam pergolakan politik dan kerusuhan anti Tionghoa yang berulang kali terjadi di negara kita, etnis Tionghoa selalu menjadi kambing hitam, tak memiliki jaminan keselamatan baik jiwa maupun harta. (*Gēnjù guòqù huá zú suǒ shēnshòu de jīngyàn jiàoxùn - - tèbié shì “jiǔ sà”shìjiàn de lishǐ chuāngshāng - - , rěnwéi huá zú shì dān lì báo, wú yī wú kào, zài wǒguó lǚcì de zhèngzhì dòngdàng hé pái huá yùndòng zhōng, zǒng shì chéngwèi dài zuì gāoyáng hé shòuhài zhě, rénshēn ānquán hé cáichǎn háo wú bǎozhàng.*)

Oleh pandangan pertama ini, etnis Tionghoa dianggap ‘lemah, tak berdaya’. Ini dikarenakan seringkali timbul kerusuhan anti Tionghoa yang mengorbankan mereka di masa lalu. Logika yang dipakai dalam presuposisi ini adalah, karena sering menjadi korban, maka etnis Tionghoa dipandang lemah dan tak berdaya. Meski artikel ini tidak menyangkal presuposisi ini, namun pada akhirnya ia berargumen, sikap pasif dan tidak ikut campur dalam politik karena alasan etnis Tionghoa selama ini selalu menjadi kambing hitam, adalah tidak benar. Dan apabila kita mundur sejenak ke bagian awal artikel, istilah ‘elemen penting bangsa’ terkesan bertolakbelakang dengan pernyataan bahwa etnis Tionghoa ‘lemah dan tak berdaya’. Namun karena kita tidak mengetahui makna ‘penting’ di sini, sehingga kita hanya bisa menganggap bagian ini sebagai paradoks, yakni etnis Tionghoa adalah elemen penting bangsa, sekaligus juga mereka adalah elemen bangsa yang lemah.

Di bagian akhir artikel, disebutkan presuposisi yang ‘mengubah’ etnis Tionghoa dari ketidakberdayaan menjadi lebih kuat.

Lebih-lebih, ketika etnis Tionghoa dan etnis-etnis yang lain bersatu dengan erat, maka kita tidak akan merasa lemah tak berdaya lagi. (*Hékuàng, dāng huá zú yǔ gè zú rénmin jīnmì tuánjié zài yīqǐ shí, wǒmen biàn bù huì zài gāndào gūdān wú wéi le.*)

Di sini dianggap bahwa bila etnis Tionghoa bisa bersatu dengan etnis yang lain (dalam konteks ini, bersatu menata Indonesia ke arah yang lebih baik, menghilangkan kekuatan

rezim lama), maka etnis Tionghoa tidak akan menjadi lemah tak berdaya (selalu menjadi korban) lagi. Di sini juga terkandung makna bahwa persatuan antar etnis merupakan hal yang mendukung keberlangsungan dan pengakuan atas etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

2. Praktik Wacana

Sebagai sebuah artikel argumentatif, artikel ini mengajukan tiga macam sikap atau pandangan yang bisa diambil orang Tionghoa dalam menghadapi pemilu 2004. Sikap pertama terkait dengan wacana bahwa berdasarkan pengalaman sejarah, selama ini etnis Tionghoa sering menjadi korban kerusuhan anti Tionghoa, menjadi kambing hitam, sehingga lebih baik mengambil sikap pasif, tidak ikut berperan dalam menghadapi pemilu. Mereka yang kebanyakan mengambil sikap seperti ini adalah para pengusaha atau masyarakat kelas menengah. Wacana kedua adalah gagasan dari golongan etnis Tionghoa generasi muda, maupun kaum terpelajar Tionghoa, yang menganjurkan etnis Tionghoa berperan aktif dalam pemilu, justru untuk melawan dan memusnahkan sisa-sisa rezim otoriter lama. Dari wacana kedua ini, masih terbagi menjadi dua wacana atau dua sikap lagi, yakni dua macam sikap ‘aktif’ yang bisa diambil, yakni yang pertama adalah mengikuti pemilu namun menyatakan sikap ‘golput’, sebagai bentuk ‘pemberontakan’ terhadap orang-orang lama yang nantinya juga akan terpilih kembali sebagai wakil rakyat dan pemerintah. Sedangkan sikap kedua, adalah sikap aktif mengikuti pemilu, dan menggunakan hak pilih yang ada. Sikap ini, yang juga disarankan oleh artikel ini, diambil dengan harapan bahwa dengan menyalurkan hak pilih, etnis Tionghoa dapat berperan serta ikut memilih wakil rakyat serta pemerintah yang bersih, menuju ke Indonesia yang lebih baik.

Berbagai wacana yang dihimpun oleh artikel ini menunjukkan berbagai aspek ketionghoan di Indonesia, dalam kaitan dengan kepedulian mereka terhadap nasib bangsa ini, termasuk nasib mereka juga sebagai bagian dari bangsa. Tiga macam sikap yang ada

mencerminkan tiga macam ketionghoan yang mungkin dimiliki etnis Tionghoa di Indonesia. Dan ketiga macam sikap ini semuanya berhubungan dengan nasionalisme mereka. Bagaimana mereka memandang diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, mempengaruhi pemilihan sikap, atau penampilan ketionghoan mereka melalui sikap-sikap tersebut. Misalnya sikap pertama yang acuh terhadap politik, dilandasi rasa trauma atas penderitaan-penderitaan yang dialami etnis Tionghoa di masa lalu. Hal ini kemungkinan menyebabkan rasa ‘bagian dari bangsa’ menjadi lemah atau bahkan hilang. Mereka mungkin tidak merasa lagi menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sedangkan pada sisi yang lain, dilandasi dengan rasa sebagai bagian dari bangsa, etnis Tionghoa seharusnya ikut berperan aktif memperbaiki atau mengubah susunan wakil rakyat menjadi lebih baik, lebih bersih dan mengurangi kekuatan rezim lama yang masih mungkin menduduki parlemen. Dengan mengurangi kemungkinan berkuasanya kembali rezim lama, maka masa depan etnis Tionghoa juga akan lebih cerah.

Sebagai bentuk intertekstualitas, artikel ini merupakan salah satu dari sekian artikel tentang situasi politik menjelang pemilu 2004, terutama disoroti dari sudut pandang etnis Tionghoa. Sikap apa yang harus diambil oleh etnis Tionghoa dalam menghadapi pemilu kali ini, merupakan hal yang dipandang krusial. Dari argumen yang disampaikan artikel ini, kita mengetahui bahwa posisi yang diambil oleh *Harian Nusantara* adalah mendorong etnis Tionghoa untuk berperan aktif dan menggunakan hak pilih mereka.

3. Praktik Sosial

Dalam menghadapi pemilu 2004, artikel ini menyampaikan pesan (dalam hal ini adalah juga pesan *Harian Nusantara*) bahwa etnis Tionghoa diharapkan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ini adalah salah satu ‘kampanye’ yang disuarakan oleh *Harian Nusantara* dalam memberikan ‘pendidikan politik’ kepada etnis Tionghoa untuk tidak lagi bersifat pasif dan acuh terhadap perkembangan politik di Indonesia. Artikel

ini memberikan gagasan bahwa sebagai bentuk semangat integrasi menjadi bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, etnis Tionghoa semestinya juga bersatu dengan etnis yang lain, berperan aktif mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ini juga merupakan salah satu bentuk rasa nasionalisme etnis Tionghoa yang direpresentasikan melalui artikel ini. Sedangkan dari segi produksi teks, gagasan bahwa etnis Tionghoa adalah salah satu etnis penyusun keanekaragaman etnis di Indonesia, yakni konsep integrasi, turut mendasari produksi teks ini.

Adanya aspek kuasa dari pemerintah ataupun parlemen sebagai pembuat kebijakan, termasuk kebijakan yang menyangkut masa depan etnis Tionghoa, juga menjadi poin yang melandasi produksi teks. Etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dalam tatanan wacana kebangsaan, dipandang ikut memiliki tanggungjawab dalam menentukan siapa ‘penguasa’ ini. Namun di sini yang lebih ditekankan adalah mengikis habis pengaruh rezim Orde Baru yang ditengarai masih ada di parlemen. Artikel ini menggambarkan, tanggungjawab untuk ikut menghasilkan ‘penguasa’ baru yang bersih, menjadi agenda utama etnis Tionghoa.

4.2.2.3 Maraknya Peringatan HUT Ke-68 RI di Metropolis, Upacara Underwater hingga Ekspatriat. 18 Agustus 2013, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Teks ini merupakan kumpulan liputan perayaan hari kemerdekaan di kota Surabaya, sehingga isinya tidak semua berhubungan dengan etnis Tionghoa. Hanya bagian tentang liputan upacara bendera di Pasar Atom yang berhubungan. Dari *lead* berita

Pasar Atom yang biasanya berjubel pembeli tampak berbeda kemarin (17/8). Sekitar 2.000 pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Tionghoa Indonesia Surabaya dan Himpunan Pedagang Pasar Atom berbaur dengan masyarakat sekitar. Uniknya, mereka mengadakan upacara bendera peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh kemarin.

Transitivitas yang digunakan dalam *lead* berita berisikan subjek yakni sekitar 2.000 orang pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Tionghoa Indonesia dan Himpunan Pedagang Pasar Atom. Mereka berbaur dengan masyarakat sekitar untuk mengadakan upacara bendera. 2.000 orang pengusaha ini meskipun tidak secara eksplisit dikatakan sebagai pengusaha Tionghoa, namun dari asosiasi mereka, tersirat bahwa paling tidak sebagian besar dari mereka adalah etnis Tionghoa. Sedangkan “masyarakat sekitar” yang dimaksud di sini tidak terlalu jelas mengacu kepada siapa. Bila dilihat dari konteksnya, maka mungkin yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Atom, dan bukan etnis Tionghoa, karena digunakan kata “berbaur”. Penggunaan kata “uniknya” memberikan kesan bahwa kegiatan upacara bendera ini tidak biasanya diadakan di Pasar Atom, dan subjek “mereka” (para pengusaha Tionghoa) menunjukkan pula bahwa pengusaha Tionghoa ini tidak biasanya mengadakan upacara bendera. Sehingga ini dianggap sebagai hal yang unik.

Nama tokoh yang hadir hanya disebutkan dua nama, yakni Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo serta direktur Pasar Atom Mal, Didi W. Simson. Sedikit hiperbola nampak pada kalimat

Tak tanggung-tanggung, upacara itu dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo.

Kata “tak tanggung-tanggung” memberikan kesan bahwa upacara bendera ini bukan sekedar upacara biasa, namun upacara yang “luar biasa” karena dihadiri pula oleh Pangdam V/Brawijaya.

Presuposisi dipakai pada kalimat berikut

Semangat pluralisme dan toleransi memang tampak dari penyelenggaraan upacara yang diadakan setiap tahun tersebut. Tanpa canggung para pengusaha itu merayakan upacara bersama warga yang mayoritas berprofesi sebagai tukang becak, tukang parkir, dan penjual nasi bungkus.

Kata-kata “memang tampak” memberikan kesan pasti dan jelas bahwa penyelenggaraan upacara ini memperlihatkan semangat pluralisme dan toleransi. Klaim ini didasarkan pada berbaurnya para pengusaha dengan para warga. Sekali lagi ini serupa dengan artikel di bagian 4.2.1 di atas, bahwa pluralisme dan toleransi ditunjukkan (dan dipresuposisikan) dari hadirnya berbagai elemen etnis yang berbeda dalam sebuah acara. Kata-kata “tanpa canggung” juga merupakan klaim yang disodorkan oleh teks ini. Makna dari “tanpa canggung” juga tidak terlalu jelas, seperti apakah standar “tanpa canggung” itu. Secara tersirat, “tanpa canggung” yang digunakan di sini juga mengisyaratkan makna yang lain, yakni pada umumnya para pengusaha (Tionghoa) akan merasa canggung bila disejajarkan dengan para warga dari kalangan menengah ke bawah. Presuposisi lainnya terlihat pada penggunaan kata “mayoritas”, yang apabila dirunut kembali ke awal teks, bahwa “warga” di sini mungkin yang dimaksud adalah warga sekitar Pasar Atom, maka teks ini telah mengklaim bahwa mayoritas warga sekitar Pasar Atom adalah tukang becak, tukang parkir dan penjual nasi bungkus.

Presuposisi juga nampak pada bagian bergaris bawah di bawah ini.

"Pada momen inilah, kita mampu menyadari bahwa kita ini bangsa yang besar dan berjaya. Namun, itu semua tidak akan berhasil kalau kita saling serang dan hujat. Yang kaya bantu yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, dan hilangkan sekat antara mayoritas dan minoritas. Dengan hal itu, konflik antaragama atau suku bisa ditekan seminimal-minimalnya," katanya dalam amanat upacara.

Di sini dikatakan bahwa seharusnya “yang kaya membantu yang miskin, yang kuat menolong yang lemah”. Terkesan bahwa relasi kehidupan antar anggota masyarakat harus seperti itu, yakni yang berkelebihan membantu yang kekurangan. Padahal bila dipikirkan lebih lanjut, secara logika tidak selalu harus demikian, karena mungkin saja yang miskin membantu yang kaya, hanya saja mungkin bukan dalam hal bantuan materi, tapi bantuan dari segi yang lain. Maka teks ini terkesan ingin menekankan bahwa selama ini fenomena yang terjadi di masyarakat adalah golongan yang kaya kurang membantu yang miskin, dan

yang kuat kurang menolong yang lemah. Dan tersirat pula makna bahwa pengusaha Tionghoa sebagai kalangan menengah ke atas seharusnya juga membantu warga yang miskin.

2. Praktik Wacana

Berita tentang upacara bendera yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Pasar Atom merupakan berita tahunan. Namun *Jawa Pos* tidak setiap tahun memuat berita tersebut. Sebagai bentuk interteks, ditemukan berita serupa pada tahun 2010, namun tidak dimuat di edisi cetak *Jawa Pos*, tetapi dimuat pada situs *online Jawa Pos National Network* di jpnn.com³.

Interdiskursivitas terlihat dari penggabungan wacana peringatan hari kemerdekaan Indonesia, dengan wacana tentang kerukunan antar etnis, pluralisme dan toleransi. Sedangkan intertekstualitas terwujud pada kutipan langsung amanat upacara oleh inspektur upacara, yakni direktur Pasar Atom Mal, Didi W. Simson. Wacana tentang Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam perbedaan, serta toleransi dan saling membantu, “menghilangkan sekat” antara mayoritas dan minoritas, untuk menekan konflik antar agama dan suku, merupakan isi dari amanat upacara tersebut. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “menghilangkan sekat”, sebab menghilangkan sekat bisa berarti sama dengan asimilasi total, yang dalam kenyataannya mustahil terwujud, dan bertentangan dengan konsep kebhinnekaan itu sendiri.

3. Praktik Sosial

Jawa Pos kembali memunculkan konsep pluralisme dan toleransi melalui artikelnya ini. Dalam momen hari kemerdekaan, selain digambarkan bahwa etnis Tionghoa pun memiliki rasa nasionalisme dengan antusiasme mereka mengikuti upacara bendera, namun yang lebih ditekankan oleh teks ini adalah masalah pluralisme dan toleransi. Bagaimana para

³ www.jpnn.com/read/2010/08/17/70359

pengusaha Tionghoa bisa hadir mengikuti upacara secara berdampingan dengan warga etnis lain yang adalah rakyat kecil, merupakan sebuah usaha membangun persepsi bahwa sebenarnya etnis Tionghoa di kalangan menengah ke atas pun (dalam hal ini pengusaha) bisa membaaur dengan sesamanya yang dari kalangan menengah ke bawah. Walau tentunya konstruksi yang demikian ini masih bisa dipertanyakan, karena cenderung hanya melihat dari permukaan yang nampak saja. Dan di dalam artikel ini juga terkandung agenda lain, yakni etnis Tionghoa yang “kaya” seharusnya membantu warga lain yang “miskin”, guna menjaga toleransi dan menghilangkan konflik antar suku. Dengan demikian masih muncul stereotip (walau samar, karena dalam konteks ini yang dimaksud dengan Tionghoa adalah pengusaha Tionghoa yang kemungkinan besar memang adalah kalangan menengah ke atas) bahwa etnis Tionghoa umumnya kaya. Stereotip ini mengesensialisasikan perbedaan antara etnis Tionghoa dan etnis Liyan, bahwa entitas Tionghoa secara kelas sosial adalah entitas yang homogen, yakni kelas menengah ke atas. Cukup kuatnya pengaruh stereotip ini membuat wacana ‘yang kaya membantu yang miskin’, ‘yang kaya berbaur dengan yang miskin’, menjadikan dasar produksi teks. Senada dengan artikel *Jawa Pos* di bagian 4.2.2.1 di atas, kerukunan antar kelas sosial merupakan agenda penting dalam teks ini.

4.2.2.4 *Sishuǐ Yuánzǐ shāngchǎng jǔbàn shēngqí yíshì qìngzhù wǒguó dì 68 zhōunián guóqìng: Huázú gèjiè rénshì yǔ dìfāng jūnzhèng jǐng zhǎngguān gòng 2500 rén chūxí* (泗水原子商场举办升旗仪式庆祝我国第 68 周年国庆: 华族各界人士与地方军政警长官共 2500 人出席, Pasar Atom Surabaya Mengadakan Upacara Bendera Memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kita ke-68: Etnis Tionghoa dari Berbagai Kalangan Bersama Pimpinan Polisi dan Militer Daerah Total 2.500 Orang Hadir). 19 Agustus 2013, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Dari judul artikel, kita mendapati bahwa judul ditulis dengan transitivitas lengkap. Pasar Atom Surabaya selaku subjek penyelenggara upacara, serta etnis Tionghoa dari berbagai kalangan, pimpinan polisi dan militer daerah, seluruhnya total 2.500 orang hadir dalam upacara tersebut. Ada perbedaan subjek dengan artikel di *Jawa Pos*, di mana di *Jawa*

Pos disebutkan 2.000 pengusaha menghadiri upacara itu bersama masyarakat sekitar. Sedangkan di *Harian Nusantara*, ditulis 2.500 orang total peserta, dari berbagai kalangan (menyiratkan bukan dari kalangan pengusaha saja).

Seperti ciri khas liputan di *Harian Nusantara* pada umumnya, para tokoh penting dan peserta yang hadir dalam acara ini ditulis dengan detil. Mereka adalah wakil konsul jenderal RRT di Surabaya Zhang Yusen, konsul perdagangan Yan Jiong, Pangdam V/Brawijaya, anggota Muspida, direktur perusahaan Prosam Plano Chen Taiyuan, Huang Qingshan, Wang Kairong, pengusaha, pegawai, satpam di pasar Atom, serta perwakilan komunitas-komunitas Tionghoa di bawah Paguyuban Masyarakat Tionghoa yang dipimpin oleh Chen Yituan. Komandan upacara adalah S. Bayu A., inspektur upacara adalah Didi B. Simson. Ini sangat berbeda dengan artikel di *Jawa Pos*, yang memang bisa dimaklumi karena ruang untuk liputan ini pada artikel di *Jawa Pos* cukup sempit, sebab artikel tidak khusus memuat liputan upacara di pasar Atom ini saja, namun bercampur dengan liputan acara lainnya. Sedangkan di *Harian Nusantara*, teks liputan ini mendapat jatah satu halaman penuh, dengan dominasi foto-foto para tokoh yang hadir dalam upacara tersebut.

Artikel ini kemudian menceritakan narasi jalannya upacara, dengan melukiskan prosesi pengibaran bendera, yang dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi, pembukaan UUD 1945, Pancasila, lalu mengheningkan cipta dan amanat upacara oleh inspektur upacara Didi B. Simson (artikel ini melakukan kesalahan penulisan nama, karena seharusnya nama yang benar adalah Didi W. Simson). Upacara ditutup dengan penampilan paduan suara yang membawakan tiga lagu, serta penampilan Taichi serta wushu. Para hadirin juga dikatakan mendapat bingkisan dari panitia. Dari foto-foto yang dipasang di halaman artikel ini, diketahui bahwa sebenarnya masih ada acara pembagian bingkisan kepada para tukang becak, serta penyerahan hadiah kepada pemenang lomba pakaian tradisional.

Narasi yang menggambarkan pengibaran bendera menggunakan deskripsi dengan pemilihan kata-kata yang bernada cukup puitis, yakni

Pukul 7.30, tiga orang pengibar bendera berseragam putih laksana salju, dengan khidmat mengikuti irama lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh paduan suara Perkumpulan Fuqing Jawa Timur, mengibarkan bendera merah putih cerah naik tinggi ke puncak tiang bendera. Bendera negara berkibar dengan gagah di langit yang biru. (7 shí bàn, shēn chuān xuēbái yīfú de 3 míng qíshǒu zhuāngyán de gēnsuǐzhe Dōng zhāowā Fúqīng gōnghuì héchàng tuán dàhéchàng “Dà Yīnní guógē” de jìezòu, bǎ xiānyàn de hóng bái qí xúxú shēng shàng qíngān de dǐngbù, guóqí zài wèilán de tiānkōng xióngwěi de piāoyáng.)

Sedangkan pembacaan teks proklamasi, pembukaan UUD dan Pancasila, semuanya disebutkan dengan transitivitas lengkap berikut nama pembacanya, yang semuanya adalah etnis Tionghoa.

Presuposisi digunakan dalam isi amanat upacara, yakni upacara ini menunjukkan rasa cinta tanah air semua lapisan masyarakat, serta persatuan antar etnis. Hal ini senada dengan presuposisi pada artikel di *Jawa Pos*.

Didi B. Simson dalam amanat upacara menekankan, upacara yang diadakan di pasar Atom ini menunjukkan rasa cinta tanah air setiap lapisan masyarakat Jawa Timur, persatuan antar etnis demi mengembangkan perdagangan di daerah setempat, berusaha mewujudkan suasana bisnis yang damai, mendorong berkembangnya bisnis di pasar Atom. (Didi B. Simson zài zhìcí zhōng qiángdiào, zài yuánzǐ shāngchǎng jùbàn shēngqí yìshì xiānshìle Dōng zhāowā gè jiēcéng shìmín de àiguó jīngshén, gè zú qún tuánjié yīzhì wèi fāzhǎn dāngdì de jīngmào, nǚlì yǐngzào yīgè hénmù de yǐngyè huánjìng, tuīdòngle yuánzǐ shāngchǎng yèwù de fā zhǎn.)

Presuposisi juga nampak di bagian akhir artikel, di mana diceritakan bahwa upacara itu juga diliput oleh kru stasiun TV Jiangmen, Tiongkok. Dikatakan bahwa liputan ini akan menjadi dokumentasi yang menunjukkan ikut sertanya etnis Tionghoa di Indonesia dalam kegiatan-kegiatan bertema kebangsaan.

.....mendokumentasikan keseluruhan proses etnis Tionghoa Surabaya mengikuti upacara bendera di pasar Atom, sebagai dokumentasi yang menunjukkan etnis Tionghoa di Indonesia mengikuti kegiatan-kegiatan bertema kebangsaan. (.....xiānchǎng pāishè le Sishuǐ huárén zài yuánzǐ shāngchǎng cānjiā shēngqí yìshì de zhēnggè guòchéng, zuòwéi Yīnní huárén shēn jiā àiguó zhūyì huódòng de zīliào.)

Di sini dipresuposisikan bahwa hasil rekaman ini akan menjadi dokumentasi atau materi (kajian?) tentang etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya yang menunjukkan nasionalisme mereka. Namun tidak disebutkan dokumentasi ini akan disimpan oleh siapa dan digunakan oleh siapa.

2. Praktik Wacana

Perbedaan bentuk kutipan dengan *Jawa Pos* tampak pada pengutipan amanat upacara yang disampaikan oleh Didi Simson. Isi amanat tersebut dalam artikel ini disampaikan dengan cara kutipan tak langsung. Wacana tentang toleransi, persatuan antar etnis yang ditunjukkan melalui adanya upacara ini, disampaikan lewat kutipan isi amanat upacara. Ini berbeda dengan artikel di *Jawa Pos*, yang menyampaikannya lewat kalimat penulis artikel. Maka kita ketahui bahwa entah itu artikel *Jawa Pos* atau artikel *Harian Nusantara*, salah satunya telah melakukan rekontekstualisasi wacana tentang kerukunan yang ditunjukkan melalui upacara ini, apakah itu sebenarnya berasal dari isi amanat upacara yang dikontekstualkan menjadi pendapat si penulis artikel, ataukah sebaliknya, sebenarnya adalah kesan wartawan peliput, yang kemudian dikontekstualkan menjadi isi amanat upacara. Walau demikian, wacana kerukunan antar etnis secara umum memang nampak dalam kutipan isi amanat upacara di kedua artikel. Namun di *Harian Nusantara*, wacana kerukunan memiliki tujuan yang berbeda, yakni untuk menciptakan suasana kondusif bagi perekonomian, khususnya mendukung perkembangan perdagangan di pasar Atom. Di sini sekali lagi nampak adanya rekontekstualisasi, karena penekanan isi amanat upacara di kedua artikel terlihat berbeda. *Jawa Pos* lebih menekankan kerukunan untuk menghindari konflik antar golongan, sedangkan *Harian Nusantara* lebih menekankan kerukunan agar tercipta lingkungan yang kondusif guna memajukan perekonomian.

Interdiskursivitas terlihat dari wacana kerukunan antar etnis dipadukan dengan wacana perekonomian yang membutuhkan iklim kondusif. Wacana perekonomian muncul

dalam konteks pasar Atom, yang merupakan sebuah pusat bisnis di Surabaya. Kemudian wacana tentang nasionalisme etnis Tionghoa selain diperlihatkan melalui menyelenggarakan dan hadir dalam upacara ini, juga muncul pada bagian yang menceritakan liputan oleh stasiun TV Jiangmen, Tiongkok, bahwa dokumentasi upacara ini akan menjadi bahan yang menunjukkan nasionalisme etnis Tionghoa.

Selain melalui teks tulisan, foto-foto yang dimuat bersama artikel ini menunjukkan wacana kepedulian etnis Tionghoa kepada masyarakat ekonomi lemah (dalam hal ini ditunjukkan dengan pemberian bingkisan kepada para tukang becak). Namun dalam tulisan artikel tidak disebutkan mengenai pemberian bingkisan ini. Wacana kepedulian yang ditekankan pada dua artikel *Jawa Pos* pada bagian 4.2.2.1 dan 4.2.2.3, di sini seolah tersamarkan, karena hanya disajikan melalui foto saja.

3. Praktik Sosial

Artikel ini berusaha menunjukkan rasa cinta tanah air Indonesia dari etnis Tionghoa melalui upacara bendera memperingati hari kemerdekaan Indonesia di pasar Atom. Ini diungkapkan dengan cukup eksplisit, melalui isi amanat upacara, serta pendokumentasian upacara oleh kru TV Jiangmen, Tiongkok sebagai dokumentasi tentang nasionalisme etnis Tionghoa. Artikel-artikel mengenai peringatan hari kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai komunitas Tionghoa di Indonesia memang menjadi tema utama pada edisi-edisi *Harian Nusantara* di sekitar 17 Agustus. Artikel ini nampaknya sekaligus sebagai misi surat kabar ini untuk menyuarakan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian dari bangsa Indonesia, punya rasa memiliki, rasa cinta terhadap tanah air ini. Selain menunjukkan nasionalisme, misi lain yakni mengenai terciptanya kerukunan antar elemen bangsa, juga digaungkan melalui pemberitaan-pemberitaan semacam ini.

Berbeda dengan *Jawa Pos*, relasi kuasa antara kelompok sosial kaya dan miskin tidak dimunculkan pada artikel ini. Para hadirin yang mengikuti upacara pun tidak dikatakan

semuanya adalah pengusaha. Dengan demikian, dari sudut pandang *Harian Nusantara*, etnis Tionghoa dipandang sebagai entitas yang heterogen. Kuasa yang nampak di sini justru adalah wacana identitas nasional, dimana simbol-simbol identitas nasional direproduksi dengan cukup detil di sini, meliputi pengibaran bendera, pembacaan pembukaan UUD 1945, pembacaan teks Pancasila dan pembacaan teks proklamasi. Pembacaan ketiga teks tersebut dikatakan dilakukan oleh etnis Tionghoa. Ini merupakan perwujudan Tionghoa dengan identitas nasional Indonesia. Hal-hal inilah yang melandasi produksi teks artikel ini.

4.2.3 Hak Etnis Tionghoa sebagai Warga Negara

Untuk analisis teks dengan topik mengenai kesetaraan hak etnis Tionghoa sebagai warga negara Indonesia, pada terbitan tahun 2003, digunakan tema momen ditetapkannya Imlek sebagai hari libur nasional, sedangkan pada terbitan masa kini digunakan topik pergantian penyebutan “Tjina/Cina/China” menjadi “Tionghoa” dan “Tiongkok”. Keputusan presiden RI No. 12 Tahun 2014 berisi tentang hal ini. Keputusan ini merupakan sebuah momen penting dalam sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Sebagai sebuah momen yang penting, maka *Harian Nusantara* secara khusus mengulas topik ini dalam beberapa edisinya, dalam bentuk opini-opini pembaca, hingga memuat iklan ucapan pujian kepada presiden SBY dari komunitas Tionghoa (tercatat hingga tanggal 1 April 2014 koran ini masih memuat opini pembaca mengenai hal ini). Ini berbeda dengan *Jawa Pos*, yang hanya memuat sekitar tiga opini saja. Perbedaan tingkat kepentingan ini mewarnai perbedaan dua surat kabar.

4.2.3.1 Jangan Ada Diskriminasi, 1 Februari 2003, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Artikel ini berupa esai yang ditulis oleh Amien Rais. Seiring dengan momen penting bagi etnis Tionghoa, yakni ditetapkannya Imlek sebagai hari libur nasional, artikel ini ditempatkan di halaman pertama *Jawa Pos*, dengan tajuk di atas judulnya adalah “Esai

Imlek”. Dan sebagai esai khusus Imlek, teks dibuka dengan ucapan selamat tahun baru Imlek oleh Amien.

Modalitas terlihat pada kalimat

Kita tidak bisa menutup mata bahwa di antara anak-anak bangsa terdapat sejumlah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang kadang-kadang sampai sekarang ini masih sedikit banyak mengalami diskriminasi.

Digunakannya istilah “kadang-kadang” dan “sedikit banyak” secara bersamaan terkesan redundan, dan modalitas yang tidak begitu tegas ini malah terkesan menurunkan frekuensi seringnya diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa, atau memberikan kesan bahwa diskriminasi yang terjadi tidak terlalu serius.

Bila diteliti lebih lanjut, kalimat berikutnya sebenarnya juga mengandung ketidakjelasan.

Namun, kita perlu bersyukur bahwa tren atau kecenderungan bagi warga Indonesia keturunan Tionghoa itu, Insya Allah makin lama makin bagus sehingga suatu saat tidak ada lagi diskriminasi.

Tren atau kecenderungan bagi warga Tionghoa di sini tidak jelas berupa kecenderungan dalam hal apa. Tetapi karena konteks kalimat ini yang sudah cukup jelas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tren yang dimaksud adalah tren semakin berkurangnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.

Penggunaan kata ‘memberanikan diri’ di bawah ini menunjukkan adanya presuposisi bahwa keadaan saat itu belum cukup kondusif, sehingga membuat Amien memerlukan keberanian lebih. Tahun 1999 yang adalah jangka waktu hanya satu tahun setelah turunnya Suharto, masih merupakan masa yang belum menentu dalam hal stabilitas politik, terutama juga karena pada tahun itu diadakan pemilu.

Dalam kaitan inilah saya pernah memberanikan diri untuk mendorong dipentaskannya kembali tarian barongsai di Solo pada 1999.

Sedangkan kata ‘kembali’ menunjukkan presuposisi bahwa dulunya tarian barongsai pernah dipentaskan di Solo. Presuposisi selanjutnya kembali terlihat dalam

Saya juga termasuk salah satu dari sekian banyak tokoh yang mendorong munculnya kembali koran berbahasa Mandarin.

‘Salah satu dari sekian banyak tokoh’ menunjukkan bahwa ada banyak tokoh yang mendorong munculnya kembali koran berbahasa Mandarin. Kata ‘kembali’ sekali lagi juga menunjukkan bahwa dulunya koran berbahasa Mandarin pernah terbit dengan bebas.

Presuposisi dalam kaitan dengan kata-kata ‘memberanikan diri’ kembali terlihat pada bagian berikutnya.

Lebih penting dari itu, seingat saya, saya telah memberanikan diri untuk melawan arus tatkala saya mengusulkan agar agama Konghucu menjadi agama resmi, menambah lima agama resmi yang sudah ada.

Kata-kata ‘melawan arus’ memberikan keterangan lebih lanjut bahwa presuposisi di sini menunjukkan, selain saat itu keadaan masih kurang kondusif bagi keberagaman, sehingga perlu keberanian lebih, diperjelas lagi bahwa saat itu arus utama yang berkembang adalah menolak mengakui Konghucu sebagai agama. Namun di sisi lain, modalitas ‘seingat saya’, digunakan untuk memperlunak kesan Amien yang ‘pemberani’.

Pada penutup esai, digunakan istilah dwi bahasa, Inggris dan Indonesia, untuk mengatakan kedudukan etnis Tionghoa yang sama dengan warga negara Indonesia dari etnis yang lain. Di sini digunakan retorika dengan bentuk idiom, yakni ‘duduk sama rendah, berdiri sama tinggi’, yang disandingkan dengan bahasa Inggrisnya, ‘*on equal footing*’.

2. Praktik Wacana

Sebagai sebuah esai, tidak terlihat adanya percampuran *genre* dengan gaya penulisan teks yang lain. Dari sisi isi wacananya, terlihat ada interdiskursivitas yang terwujud pada: wacana pertama yang dimunculkan oleh Amien Rais dalam esai ini adalah wacana

mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang dikatakannya, kesatuan dalam kemajemukan, kemajemukan dalam persatuan. Wacana ini kemudian dicampurkan dengan wacana utama dari teks ini, yakni penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Wacana anti diskriminasi ini diwujudkan dalam beberapa wacana lain sebagai contoh, yang meliputi diperbolehkannya penampilan seni dan budaya Tionghoa, toleransi dan pengakuan terhadap agama Konghucu, hingga hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain.

Sebagai sebuah esai tentang anti diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, esai ini terasa lebih berisikan apa saja yang telah dilakukan oleh Amien Rais untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak etnis Tionghoa sebagai warga negara. Maka terkesan bahwa esai ini terutama ditujukan bagi pembaca dari golongan etnis Tionghoa. Wacana yang paling dominan tentang hal ini adalah perjuangan Amien dalam mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Wacana ini dibenturkan dengan wacana keagamaan, dalam hal ini agama Islam, di mana tersirat bahwa banyak pemuka agama Islam yang tidak setuju mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Alasannya tidak dikemukakan dengan jelas. Namun pada akhirnya Amien menggunakan wacana ‘kembali kepada Alquran’, dan ia tidak menemui Alquran melarangnya melakukan perjuangan ini.

Di bagian akhir esai, muncul wacana ‘lama’ tentang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang terpaksa membuat mereka terkurung dalam bidang ekonomi dan perdagangan saja. Ini sebenarnya juga sebuah bentuk interteks, karena isu ini sudah banyak dibicarakan di teks-teks yang lain (isu tentang kesenian dan agama Konghucu di atas juga termasuk). Di sini Amien memunculkan wacana untuk menyetarakan hak dan kebebasan etnis Tionghoa sama seperti warga negara yang lain, yang berarti mereka bebas berkarir di bidang apa pun. Esai ditutup dengan wacana pembangunan negara, di mana etnis Tionghoa juga mempunyai tanggungjawab yang sama untuk ikut serta memajukan negara ini.

3. Praktik Sosial

Dalam rangka momen ditetapkannya Imlek sebagai hari libur nasional, yang merupakan momen bersejarah bagi etnis Tionghoa di Indonesia, *Jawa Pos* memuat esai dari Amien Rais tentang diskriminasi ini. Sesuai dengan momen ini, wacana penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa semakin berkembang. Esai ini juga bertemakan hal yang sama. Dalam hal ini, *Jawa Pos* telah menunjukkan ia ikut serta dalam ‘kampanye’ memperjuangkan kesetaraan hak-hak etnis Tionghoa sebagai warga negara Indonesia. Dipilihnya tokoh Amien Rais, yang waktu itu menjabat sebagai ketua MPR, menunjukkan bahwa figur pimpinan lembaga tertinggi negara, yang juga merupakan lembaga para wakil rakyat, dan sekaligus tokoh reformator, juga setuju terhadap wacana anti diskriminasi, dan bahkan ikut berjuang untuk menghapuskan diskriminasi itu, seperti yang ditunjukkan dalam esainya. Figur Amien Rais dianggap memiliki kuasa untuk bisa mempengaruhi pembaca, sehingga dipilih dalam produksi teks ini.

Kesan optimis terlihat melalui wacana bahwa kondisi etnis Tionghoa di Indonesia sudah semakin baik, dan suatu saat nanti diskriminasi akan bisa dihilangkan. Demikian pula dengan hendak dikikisnya stereotip bahwa etnis Tionghoa hanya bisa berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Wacana menatap hari depan yang lebih baik ini juga menjadi pesan teks ini.

4.2.3.2 *Rénxiéyì zhǎng chūnjié hècí: Huázú yǐ shùlì le liánghǎo de xíngxiàng yīng xiǎngyǒu gòngtóng děng de quányì yǔ yìwù* (人协议长春节贺词 华族已树立了良好的形象 应享有共同等的权益与义务, Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek dari Ketua MPR: Etnis Tionghoa telah Menciptakan Citra yang Baik, Seharusnya Mempunyai Hak dan Kewajiban yang Sama). 3 Februari 2003, *Harian Nusantara*

Artikel ini merupakan artikel yang sama dengan artikel di *Jawa Pos*. Sehingga analisis untuk artikel ini akan lebih fokus pada perbedaan artikel ini dengan *Jawa Pos*.

1. Analisis Teks

Perbedaan terlihat pada bagian judul artikel. Bila di *Jawa Pos* hanya ditulis sebagai esai Imlek, dengan judul singkat ‘Jangan Ada Diskriminasi’, maka di *Harian Nusantara*, artikel ini ditulis dengan judul lengkap, dan tidak ditulis sebagai ‘esai’, tetapi merupakan ‘ucapan selamat tahun baru Imlek’ oleh ketua MPR. Judul artikel lebih panjang, ditambahkan sebuah klausa ‘Etnis Tionghoa telah Menciptakan Citra yang Baik’, yang merupakan latar belakang mengapa etnis Tionghoa berhak untuk tidak mengalami diskriminasi, berhak atas hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. Sebenarnya bila ditelusuri pada isi teks artikel di *Jawa Pos*, klausa ‘Etnis Tionghoa telah Menciptakan Citra yang Baik’ ini tidak kita temukan.

Mengenai ‘Etnis Tionghoa telah Menciptakan Citra yang Baik’, dapat kita bandingkan dua kalimat berikut.

Namun, kita perlu bersyukur bahwa tren atau kecenderungan bagi warga Indonesia keturunan Tionghoa itu, Insya Allah makin lama makin bagus sehingga suatu saat tidak ada lagi diskriminasi. (*Jawa Pos*)

Sebenarnya kita seharusnya bersyukur, karena citra etnis Tionghoa semakin lama semakin baik. Insya Allah suatu saat nanti diskriminasi terhadap etnis Tionghoa akan hilang. (*Qíshí wǒmen yīnggāi gǎndào xīnwèi, yīnwèi huáyì de biǎoxiàn yuè lái yuè hǎo. Tuō zhēnzhǔ bǎoyòu, xiāngxìn, yǒuzhāoyīrì duì huáyì de zhè zhǒng qíshí jiāng huì xiāoshī.*)

Seperti pada analisis teks di bagian 4.2.3.1 di atas, ‘tren atau kecenderungan bagi warga Indonesia keturunan Tionghoa makin lama makin bagus’ tidak jelas mengacu kepada tren apa. Namun seperti sudah kita simpulkan, dari konteksnya, tren ini adalah tren semakin berkurangnya diskriminasi kepada etnis Tionghoa. Sedangkan di *Harian Nusantara*, bagian ini dimaknai menjadi ‘citra etnis Tionghoa makin lama makin bagus’. Kemungkinan karena ketidakjelasan mengenai ‘tren’ mengacu kepada apa, sehingga oleh *Harian Nusantara* dianggap sebagai ‘citra etnis Tionghoa makin lama makin bagus’, bahkan hingga ditarik menjadi judul artikel.

Perbedaan juga terlihat dari penerjemahan kalimat

Yang saya maksudkan semakin realistis adalah kesadaran bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan wacana dan sekaligus kondisi mendasar yang perlu kita pertahankan bersama-sama. (*Jawa Pos*)

Yang diterjemahkan menjadi

Yang saya maksudkan semakin realistis adalah pemerintah tidak hanya menjadikan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan di mulut saja, tetapi telah melaksanakannya secara nyata, sebagai kondisi mendasar yang perlu kita pertahankan bersama-sama. (*Wō shàngshù suǒ tí dào de yuè lái yuè néng miànduì xiànsí, shì zhǐ zhèngfǔ yǐ bǎ “shūtiútóngguī”bùzhǐ dāng zuò kǒutóuyǔ éryǐ, ér shì yǐjīng bǎ tā guàncè dào shíjiàn zhōng qù, zuòwéi wǒmen gōngtóng wéihù jīběn xūyào de zhūnzé.*)

Di *Harian Nusantara*, dikatakan bahwa pemerintah telah ‘melaksanakan’ Bhinneka Tunggal Ika secara nyata. Padahal di teks *Jawa Pos*, hanya dikatakan Bhinneka Tunggal Ika ‘disadari’ sebagai wacana.

Kemudian modalitas ‘seingat saya’ pada bagian berikut ini di *Jawa Pos*

Lebih penting dari itu, seingat saya, saya telah memberanikan diri untuk melawan arus tatkala saya mengusulkan agar agama Konghucu menjadi agama resmi, menambah lima agama resmi yang sudah ada. (*Jawa Pos*)

Di *Harian Nusantara* dihilangkan menjadi

Lebih penting dari itu, saya pernah melawan arus saat mengusulkan agar agama Konghucu menjadi agama resmi, menambah lima agama resmi yang sudah ada. (*Gèng zhòngyào de yīdiǎn, wǒ céng fǎn cháoliú dì zhǔzhāng bǎ kǒng jiào liè wéi zhèngfǔ gōngrèn de wǔdà zōngjiào yǐwài de héfǎ zōngjiào.*)

Sehingga di *Harian Nusantara* lebih terkesan tegas bahwa Amien Rais memang pernah memperjuangkan agar agama Konghucu diakui secara resmi.

2. Praktik Wacana

Melalui penambahan klausa ‘Etnis Tionghoa telah Menciptakan Citra yang Baik’, terkesan ada upaya memunculkan wacana bahwa etnis Tionghoa selama ini telah menjadi warga negara yang baik, sehingga layak mendapatkan kesetaraan hak dengan warga negara

dari etnis yang lain. Di sini *Harian Nusantara* terlihat merasa perlu untuk memberikan tambahan wacana ini, agar wacana tentang anti diskriminasi lebih memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian ucapan selamat tahun baru Imlek dari Amien Rais ini telah direkontekstualisasi oleh *Harian Nusantara* sehingga terkesan lebih kuat dari segi argumentasinya. Rekontekstualisasi yang lain terlihat pula dalam wacana implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Bila di *Jawa Pos* dikatakan bahwa kondisi sekarang sudah semakin baik karena Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi hal yang mendasar, maka di *Harian Nusantara* hal ini diperkuat lagi dengan mengatakan Bhinneka Tunggal Ika sudah ‘dilaksanakan’.

3. Praktik Sosial

Secara keseluruhan, artikel di *Harian Nusantara* ini mempunyai kesamaan ‘misi’ dengan *Jawa Pos*, yakni bertepatan dengan momen ditetapkannya tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional, maka diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga harus semakin dikikis. Namun dari segi kekuatan pesannya, tampak bahwa *Harian Nusantara* memberikan tekanan lebih kuat untuk menghapus diskriminasi tersebut lewat beberapa kontekstualisasi yang dilakukan dalam artikel ini. Letak artikel yang juga berada di halaman pertama, memiliki kesamaan kesan dengan *Jawa Pos*, bahwa artikel ini adalah sebuah artikel yang penting.

Harian Nusantara menambahkan wacana bahwa etnis Tionghoa telah menciptakan citra yang baik, sehingga layak mendapatkan pengakuan dan hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Argumentasi yang ditambahkan ini menguatkan ‘misi’ anti diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang menjadi salah satu agenda utama *Harian Nusantara*. Melalui produksi teks ini, diharapkan wacana bahwa etnis Tionghoa telah menciptakan citra yang baik, akan mempengaruhi pembaca sehingga mereka juga turut memperjuangkan citra etnis Tionghoa yang lebih baik lagi.

4.2.3.3 Istilah China Resmi Ganti Tiongkok, 21 Maret 2014, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Judul dari teks ini adalah “Istilah China Resmi Ganti Tiongkok”. Bila dilihat dari segi transitivitasnya, ada keambiguan dari makna kalimat ini. Kata kerja “ganti” bermakna ambigu, karena bisa menghasilkan dua makna, yakni (1) menggantikan, (2) berganti menjadi. Bila pembaca membaca judul sekilas, bisa jadi kata ‘ganti’ dimaknai ‘menggantikan’, sehingga judul ini malah bertolakbelakang dengan isinya. Sedangkan bila kata ‘ganti’ dimaknai ‘berganti’, kalimat ini tidak mengandung subjek, tidak disebutkan siapa atau apa yang mengganti istilah China.

Metonim “China” digunakan untuk mewakili tiga istilah yang diganti, yakni “Tjina, Cina dan China.” Pemilihan penggunaan “China”, yang relatif lebih lunak dari “Cina”, menyiratkan kesan bahwa perubahan dari “China” ke “Tionghoa” tidak terlalu drastis atau kontras.

Dari transitivitas yang digunakan oleh artikel ini, tersirat bahwa sosialisasi keppres ini masih belum berjalan. Ini terlihat dari tanggapan Christian Hadinata atas keppres.

Salah seorang tokoh bulu tangkis Indonesia Christian Hadinata mengaku belum ada sosialisasi terkait keppres soal penghapusan istilah China menjadi Tionghoa tersebut.

Kata ‘mengaku’ digunakan untuk menggantikan kata ‘mengatakan’. ‘Mengaku’ memiliki makna ‘membenarkan’, sehingga terasa penekanan bahwa di kalangan etnis Tionghoa itu sendiri, yang seharusnya paling mendapatkan manfaat dari keppres ini, ternyata belum ada sosialisasi.

Artikel ini juga menyebutkan bahwa

Seingat Ko Kris, perubahan namanya itu disertai surat ganti nama.

Di sini kata ‘seingat’ mengandung ketidakpastian. Menjadi janggal di sini bahwa peristiwa seperti perubahan nama beserta dokumen birokrasinya bisa sampai dilupakan oleh seseorang.

Peristiwa diskriminatif ‘pemaksaan’ ganti nama orang Tionghoa oleh Orde Baru beserta segala kesulitan birokratif yang mengikutinya, seakan disamarkan oleh penggunaan modalitas yang tak pasti ini. Di kalimat berikutnya Christian Hadinata mengatakan,

Saya nggak punya masalah lagi soal nama Tionghoa saya itu. Cuma, ingatnya, kalau dulu mengurus paspor, harus menyertakan surat ganti nama itu.

Kalimat kedua tidak bersubjek, tidak jelas siapa yang mengurus paspor, apakah Christian Hadinata sendiri, ataukah etnis Tionghoa secara umum. Subjek yang dihilangkan ini membuat makna dari narasi ini menjadi membingungkan. Setelah dilakukan pembacaan lebih hati-hati, maksud narasi tersebut mungkin seperti ini: Christian Hadinata tidak ingat apakah perubahan namanya disertai surat ganti nama atau tidak, yang jelas dia sekarang tidak mempunyai masalah (birokrasi) lagi dengan perubahan namanya itu (tersirat bahwa surat ganti namanya sudah tidak dibutuhkan lagi). Dan seingatnya, dulu orang Tionghoa (selain dia) ketika mengurus paspor, harus menyertakan surat ganti nama. Narasi ini akan membingungkan pembaca yang tidak mengetahui presuposisi adanya peristiwa ‘pemaksaan’ ganti nama oleh Orde Baru serta diskriminasi dalam hal birokrasi yang dialami etnis Tionghoa.

2. Praktik Wacana

Dari keseluruhan teks, dapat dilihat bahwa teks berita ini memiliki interdiskursivitas yang terwujud dari: (1) wacana pelaporan isi dari keputusan presiden No. 12 Tahun 2014, beserta alasan dikeluarkannya keputusan presiden tersebut, yang meliputi wacana tentang hak asasi manusia, diskriminasi, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, kewarganegaraan, sebagai sebuah jenis pemberitaan yang formal; (2) teks ini kemudian disambung dengan gaya pemberitaan reportase hasil wawancara, terhadap salah satu tokoh Tionghoa, Christian Hadinata, untuk meminta komentarnya terhadap diberlakukannya keppres ini, dan (3) wacana tentang ganti nama etnis Tionghoa.

Berita ini memparafrase isi dari keppres, yang juga mengutip/mempertimbangkan undang-undang lain, yakni UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu UUD 1945 juga dikaitkan dengan konteks sejarah saat UUD 1945 itu dibentuk, yang menggunakan frasa peranakan Tionghoa, bukan istilah China. Selain itu, ditambahkan pula wacana hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, sebagai salah satu faktor yang melandasi dikeluarkannya keppres ini.

Jadi intertekstualitas dalam berita ini jelas, karena teks berita ini memparafrase isi dari keppres. Berita ini juga melakukan rekontekstualisasi, salah satunya yakni menyebutkan ‘presiden SBY’ sebagai subjek dari pembuatan keputusan ini. Keputusan presiden yang diputuskan oleh ‘presiden’ sebagai sebuah lembaga pemerintahan, diparafrase ulang menjadi diputuskan oleh ‘presiden SBY’, sehingga terkesan individu SBY-lah yang melakukan pertimbangan dan memutuskan produk hukum ini. Rekontekstualisasi yang lain nampak pada dipakainya teks “mempertimbangkan pembentukan UUD 1945 yang menggunakan frasa peranakan Tionghoa”, yang kemudian di-rekontekstualisasi menjadi “mengubah istilah keturunan China menjadi peranakan Tionghoa”. Padahal di dalam ketetapan pada keppres itu sendiri sebenarnya tidak disebutkan “mengubah menjadi peranakan Tionghoa”, tetapi “mengubah istilah orang dan atau komunitas China menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa.” Maka dapat diketahui bahwa teks berita ini hendak memberikan penekanan pada wacana ‘peranakan’ Tionghoa, karena kalimat “mengubah ... menjadi peranakan Tionghoa” ini diletakkan di awal berita, meski di bagian tengah berita, kalimatnya kembali menjadi “mengubah ... menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa.”

Kemudian di dalam konteks wacana tentang tanggapan etnis Tionghoa, juga diselipkan wacana tentang ganti nama, yang dikaitkan dengan wacana perubahan istilah China menjadi Tionghoa, yakni apakah nama Tionghoa bisa dipakai kembali. Jadi teks berita

ini membawa wacana perubahan istilah China-Tionghoa ke dalam wacana yang lebih luas, yakni penanda Indonesia (dalam hal ini nama Indonesia) berubah kembali ke penanda Tionghoa (dalam hal ini nama Tionghoa).

Ditampilkannya wawancara dengan tokoh Tionghoa, menunjukkan bahwa berita ini terutama hendak menjangkau minat pembaca etnis Tionghoa. Tokoh Tionghoa yang diwawancara memberikan kesan bahwa ia adalah sebuah representasi dari orang-orang Tionghoa di Indonesia, untuk menunjukkan bahwa suara etnis Tionghoa telah didengar dan mereka layak bergembira untuk hal itu. Tetapi di sini tidak dijelaskan apa signifikansi Christian Hadinata, kenapa harus ia yang dipilih. Secara implisit memang kita tahu bahwa Christian Hadinata adalah pahlawan bulutangkis yang membela Indonesia, namun hal ini tidak dijadikan argumen lebih lanjut dalam kaitan dengan keputusan presiden ini. Selain itu, dari analisis tentang metonim “China” di atas, ada kesan memperlunak perubahan istilah yang terjadi. Ini juga menyangkut sasaran pembaca *Jawa Pos* yang lebih umum, dan bukan hanya dari etnis Tionghoa.

Selain itu ada wacana kewarganegaraan, bahwa frasa ‘peranakan Tionghoa’ digunakan “bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia”. Dalam hal ini, artikel ini mengambil contoh orang Tionghoa yang merupakan ‘pahlawan’ yang membela negara di bidang olahraga bulutangkis, seolah sebagai sebuah sosok yang mewakili ‘bersikap setia kepada negara Republik Indonesia’. Dengan demikian, sampel dari etnis Tionghoa yang diambil ini memperkuat wacana bahwa orang Tionghoa adalah juga warga negara Indonesia, dan juga setia kepada negara, sehingga layak untuk memperoleh sebutan yang sesuai, yang tidak diskriminatif.

3. Praktik Sosial

Artikel ini hendak menyampaikan bahwa telah dikeluarkan sebuah keputusan presiden yang memutuskan penggunaan kata Cina/China diubah menjadi Tionghoa dan Tiongkok. Ini adalah sebuah momen yang cukup penting bagi keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia. Karena dari isi keputusan presiden ini, dapat diketahui bahwa perlakuan diskriminatif kepada etnis Tionghoa telah semakin dikikis secara cukup signifikan. Dalam hal ini, artikel ini menyampaikan ulang isi keppres (dengan cukup lengkap) dengan diparafrase sebagai beberapa pertimbangan hingga akhirnya menjadi keputusan oleh individu presiden SBY.

Namun wacana penghapusan diskriminasi ini disambung dengan wacana bahwa sosialisasi peraturan ini masih belum berjalan dengan baik, bahkan ada tendensi mengaburkan perlakuan diskriminatif yang ada di masa Orde Baru. Dan ditampilkan pula bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari keppres ini tidak terlalu jelas. Artikel ini juga belum cukup jelas mengetengahkan aspek historis sedemikian hingga dipandang perlu mengeluarkan keppres ini. Pembaca yang bukan etnis Tionghoa atau etnis Tionghoa yang lahir setelah Orde Baru nampaknya tidak akan merasakan pentingnya momen ini, hanya dengan membaca artikel ini. Secara umum, momen yang penting ini seakan diwacanakan hanya menjadi sebuah hal biasa saja, di tengah-tengah wacana hak asasi manusia, demokrasi dan kesetaraan hak warga negara, yang semakin lama sudah menjadi hal yang wajar dan sudah sepatutnya.

Di sisi lain, wacana tentang ganti nama yang juga disajikan oleh artikel ini cukup memberikan warna baru dalam konteks perubahan istilah Cina menjadi Tionghoa. Kesan bahwa perubahan istilah ini diperkirakan juga akan membawa perubahan kembali nama Indonesia menjadi nama Tionghoa, adalah sebuah wacana multikultural yang cukup menarik. Ditambah pula dengan penekanan istilah 'peranakan Tionghoa', yang mencerminkan etnis

Tionghoa sebagai peranakan, yang berarti budayanya sudah melokal dan khas sebagai orang Indonesia-Tionghoa.

Maka secara keseluruhan, ‘kampanye’ anti diskriminasi terhadap etnis Tionghoa melalui artikel ini secara pesan memang cukup kuat, tetapi ada kesan melunakkan diskriminasi di masa Orde Baru. Masih ada ‘bayang-bayang’ kuasa Orde Baru yang ‘meredam’ kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dilakukan olehnya, yang mempengaruhi produksi teks ini. Namun dari sisi *Jawa Pos* sendiri, dimunculkannya wacana ganti nama kembali menjadi Tionghoa seakan memberikan persepsi lain kepada pembaca bahwa konsep multikultural semacam ini adalah hal yang wajar. Maka terlihat ada tarik-menarik kuasa ‘bayang-bayang’ Orde Baru dengan kuasa multikultural.

4.2.3.4 Zǒngtǒng: Zhōngzhǐ duì huárén “Cina” chēnghu (总统: 终止对华人“Cina”称呼, Presiden: Stop Sebutan “Cina” untuk Etnis Tionghoa). 24 Maret 2014, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Artikel ini memilih untuk hanya menggunakan istilah “Cina” sebagai metonim istilah yang harus diganti. Padahal sebenarnya di dalam isi keppres itu, tidak hanya istilah “Cina” yang disebutkan, tapi “Tjina/China/Cina”. Ini dikarenakan etnis Tionghoa lebih alergi dengan sebutan “Cina”, tapi relatif lebih toleran dengan istilah “China”, sehingga dari “Cina” menjadi “Tionghoa” terasa lebih kontras dan drastis perubahannya.

Dari segi transitivitas, dalam tiga paragraf artikel ini, semuanya memiliki subjek yang jelas, yakni Presiden SBY. Bahkan judul artikel ini juga menuliskan Presiden sebagai subjeknya. Di sini tampak penekanan individu presiden sebagai pemegang peran penting dalam mengeluarkan keppres ini. Penekanan individu presiden juga terlihat dari dipasangnya foto SBY di artikel ini.

Dalam mengutip kalimat SBY di *Facebook*, kata-kata “Tentu tidak *fair* jika mereka masih di-*stereotype*-kan”, diterjemahkan menjadi “.....*Cí nǎi fēicháng bù míngzhì*

de tàidù (此乃非常不明智的态度, sikap (stereotip) tersebut sangat tidak bijak)”. Di sini penggunaan kata-kata “sangat tidak bijak” sedikit berunsur hiperbola dibandingkan kata-kata aslinya “tidak *fair*”.

2. Praktik Wacana

Artikel ini menginformasikan bahwa Presiden SBY telah menerbitkan keputusan presiden yang berisikan perubahan istilah Cina menjadi istilah Tionghoa dan Tiongkok. Isi Keppres No. 12 Tahun 2014 tidak disebutkan secara eksplisit dalam artikel ini, namun bisa diketahui secara implisit, karena disebutkan bahwa presiden SBY menghimbau berbagai pihak untuk tidak membuat perlakuan diskriminatif kepada etnis Tionghoa di Indonesia, dengan mengganti sebutan Cina dengan Tiongkok dan Tionghoa, yang dituangkan dalam keputusan presiden secara resmi.

Kemudian artikel ini mengutip pernyataan presiden SBY dalam *page Facebook* presiden pada tanggal 23 Maret 2014, yang menjelaskan alasan kenapa perlu berubah kembali pada istilah Tionghoa dan Tiongkok. Maka terkesan bahwa artikel ini lebih condong untuk mengetengahkan sosok presiden SBY sebagai pencetus keppres ini, dengan menyuguhkan sisi pendapat dan himbauan personal presiden, daripada mengulas isi dari keppres itu sendiri. Himbauan presiden di *Facebook* ini mengatakan bahwa bagi mereka (etnis Tionghoa) yang sudah lahir besar, dan bekerja dan mengabdikan di bumi pertiwi Indonesia, sangat tidak bijak jika mereka masih di-*stereotype*-kan dengan penyebutan istilah etnis “Cina”. Jadi artikel ini memiliki interdiskursivitas yang nampak dari percampuran wacana formal tentang keppres, serta wacana himbauan presiden melalui media sosial, yang lebih bersifat non formal.

Untuk memenuhi segmen konsumsi pembaca yang sebagian besar adalah etnis Tionghoa, artikel ini menggunakan kontras yang kuat untuk menekankan pentingnya

keppres ini, melalui pemilihan kata “Cina” daripada “China”, dan “sikap yang sangat tidak bijak” untuk mengacu pada sikap diskriminasi pada etnis Tionghoa.

Intertekstualitas artikel ini selain terwujud melalui kutipan ucapan presiden, juga terwujud pada banyaknya artikel dengan tema serupa, terutama berupa opini pembaca yang mengomentari keputusan presiden ini. Maka artikel ini pun menjadi salah satu mata rantai interteks dalam konteks perubahan istilah ‘Cina’ menjadi ‘Tionghoa’ ini.

3. Praktik Sosial

Dari analisis teks dan praktik wacana, artikel ini nampak dibuat untuk menegaskan sebuah dasar hukum mengenai penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Momen berubahnya istilah “Cina/China” kembali menjadi “Tionghoa/Tiongkok” merupakan sebuah momen yang penting, sehingga artikel ini menggunakan kontras yang kuat untuk menunjukkan bahwa perubahan ini memang harus dilakukan. Sebagai surat kabar etnik, *Harian Nusantara* dalam hal ini menonjolkan wacana etnis Tionghoa sebagai bagian dari keberagaman bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, etnis Tionghoa berhak atas perlakuan yang adil, non-diskriminatif seperti halnya warga negara dari etnis yang lain.

Pemuatan wacana tentang etnis Tionghoa yang sudah lahir, besar dan mengabdikan di bumi pertiwi memberikan kesan yang senada dengan artikel 4.2.3.2 di atas, yakni etnis Tionghoa telah memiliki citra positif di tanah air. Argumen ini ditambahkan untuk menguatkan dasar penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Teks ini diharapkan dapat membangun persepsi pembaca mengenai etnis Tionghoa dengan identitas nasionalnya sebagai warga negara Indonesia, seharusnya mengabdikan bagi negara Indonesia.

4.2.4 Pemberitaan yang Berhubungan dengan Tiongkok

4.2.4.1 Tamu dari Yang Zhou. 22 Februari 2003, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Artikel ini menceritakan kunjungan rombongan pengusaha dari Yangzhou, Tiongkok ke Graha Pena. Dari judul artikel, meski hanya berupa frasa, bukan kalimat utuh, kita mengetahui secara tersirat bahwa artikel ini menceritakan tentang kunjungan tamu dari Yangzhou. Dari segi transitivitas, subjek dari kedua belah pihak, yakni pihak tamu dari Yangzhou, dan pihak dari Surabaya masing-masing hanya ditulis nama orang yang memegang jabatan yang dipandang paling penting. Dari pihak Yangzhou, ditulis nama pemimpin rombongan, yakni walikota Yangzhou sendiri, Ji Jian Ye. Sedangkan dari pihak Surabaya, ditulis nama Dahlan Iskan selaku Ketua Kadin Jatim Komite China dan CEO *Jawa Pos*. Rombongan dari Yangzhou berjumlah 16 orang, sedangkan dari Surabaya selain Dahlan Iskan, disebutkan ada juga pengusaha Surabaya yang menerima kedatangan rombongan Yangzhou ini. Namun dalam hal proses dalam transitivitas, hanya dituliskan apa saja yang dilakukan oleh rombongan Yangzhou, sedangkan apa yang dilakukan oleh pihak Surabaya, hampir tidak dituliskan sama sekali. Konstruksi yang digunakan untuk menggambarkan apa yang dilakukan pihak Surabaya adalah konstruksi pasif, yakni “Rombongan pengusaha Yang Zhou ini diterima oleh Ketua Kadin Jatim Komite China Dahlan Iskan yang juga CEO *Jawa Pos*, dan sejumlah pengusaha Surabaya.” Satu foto yang dipasang di artikel ini, juga merupakan foto yang memperlihatkan para anggota rombongan Yangzhou.

Dalam kunjungan kali ini, sebenarnya rombongan Yangzhou telah tiba di Surabaya sejak kemarin lusa, dan telah bertemu dengan sejumlah pengusaha. Dan kunjungan kali ini juga merupakan kunjungan balasan atas kunjungan sejumlah pengusaha Surabaya ke Yangzhou tahun lalu. Tidak disebutkan secara eksplisit apakah para pengusaha tersebut adalah pengusaha Tionghoa. Menindaklanjuti kunjungan dubes China, serta keramahan warga Surabaya, menandai presuposisi terkait dengan keterangan kedatangan rombongan Yangzhou ini. Dari keterangan tersebut, kita mengetahui presuposisi bahwa dubes China

pernah berkunjung ke Surabaya, dan rombongan Yangzhou ini telah berinteraksi dengan warga Surabaya dan warga Surabaya menunjukkan keramahan mereka.

Kedatangan mereka ini untuk menindaklanjuti kunjungan Dubes China ke Surabaya beberapa waktu lalu.

“Kunjungan ini sekaligus kunjungan balasan. Setahun lalu, rombongan pengusaha Surabaya juga berkunjung ke kota kami,” sambung Ji Jian Ye yang mengaku terkesan dengan keramahan warga Surabaya.

2. Praktik Wacana

Selain wacana kunjungan rombongan tamu dari Tiongkok ini, juga diselipkan wacana tentang hubungan kerjasama ekonomi Surabaya dan Yangzhou, yakni mengenai terbukanya peluang untuk melakukan investasi di Yangzhou. Tidak disebutkan secara eksplisit apakah kunjungan pengusaha Surabaya tahun lalu ke Yangzhou juga demi menjajagi kemungkinan kerjasama berupa investasi di Surabaya. Terdapat pula perbedaan wacana tentang tujuan kedatangan rombongan Yangzhou di dalam artikel ini. Di bagian awal artikel, diwacanakan bahwa tujuan mereka datang adalah untuk menindaklanjuti kunjungan dubes China ke Surabaya beberapa waktu lalu. Lalu di bagian tengah artikel, wacana ini berubah lewat interteks yang terwujud pada kutipan langsung perkataan Ji Jian Ye, bahwa kedatangan mereka sekaligus adalah kunjungan balasan karena pengusaha Surabaya tahun lalu juga berkunjung ke Yangzhou. Walau mungkin dua-duanya merupakan tujuan kedatangan mereka, namun penggunaan kutipan langsung untuk menyatakan kunjungan balasan, memperlihatkan penekanan kunjungan mereka kali ini adalah untuk membalas kunjungan para pengusaha Surabaya.

Dari analisis teks, didapatkan bahwa artikel ini hampir seluruhnya menggunakan sudut pandang rombongan tamu dari Yangzhou. Terkesan adanya penekanan bahwa subjek utama adalah mereka, sehingga wacana yang dominan adalah apa saja yang mereka lakukan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh pihak tuan rumah, Surabaya, hampir tidak diungkapkan,

selain hanya menerima kunjungan ini. Tidak terlalu jelas apa maksud dari penekanan wacana yang seperti ini, mungkin yang bisa kita simpulkan adalah bahwa Surabaya telah menjadi tuan rumah yang baik bagi mereka, sehingga dari sudut pandang mereka, segala aktivitas dan tujuan kunjungan yang lancar tanpa hambatan, menjadi fokus artikel ini.

3. Praktik Sosial

Bila ditinjau dari wacana yang ditonjolkannya, artikel di *Jawa Pos* ini terkesan ingin lebih menunjukkan impresi dari rombongan Yangzhou terhadap Surabaya. Agenda artikel ini seakan ingin memberikan kesan bahwa menurut rombongan dari Yangzhou, kota Surabaya adalah kota yang baik dan terbuka bagi mereka. Walau tidak terlalu banyak digunakan wacana tentang bagaimana Surabaya menyambut mereka, tetapi dari hal-hal yang mereka lakukan selama berada di Surabaya, dalam hal ini kunjungan ke Graha Pena maupun menemui para pengusaha Surabaya, terkesan tidak ada hambatan, semua berjalan dengan lancar. Tetapi secara keseluruhan, belum terlihat adanya wacana bahwa Surabaya adalah tempat investasi yang tepat, karena yang ditampilkan di sini justru wacana bahwa Yangzhou memiliki iklim investasi yang kondusif.

Konteks lebih luas dari artikel ini adalah hubungan bilateral Indonesia-Tionghok. Hubungan kedua negara yang semakin lama semakin baik, ikut ditunjukkan oleh artikel ini, melalui impresi baik yang ditunjukkan rombongan Yangzhou terhadap Surabaya. Terbersit kesan bahwa pengusaha Tionghoa di Indonesia berindak selaku mediator hubungan bilateral ini. Pentingnya membangun hubungan bilateral kedua negara merupakan agenda yang mendasari produksi teks ini.

4.2.4.2 *Dōng Zhǎowā Gōngshāng Huìguǎn Zhōngguó Wēiyuánhùi shè yàn huānyíng Yángzhōu shìzhèng jīng dàibiǎo tuán* (东爪哇工商会馆中国委员会设宴欢迎扬州市政经代表团, Kadin Jawa Timur Komisi Tiongkok Menjamu Rombongan Pemerintah dan Pengusaha Kota Yangzhou). 22 Februari 2003, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Dari segi detail subjek pada transitivitas dalam artikel, *Harian Nusantara* menuliskan nama para tokoh dengan detail, mencakup nama semua anggota rombongan dari Yangzhou. Dan terdapat perbedaan penulisan jumlah anggota rombongan dengan artikel di *Jawa Pos*, yakni di *Harian Nusantara* hanya tertulis sejumlah 15 orang, bukan 16 orang. Selain itu, artikel di *Harian Nusantara* mengatakan bahwa rombongan ini terbagi menjadi dua, yakni rombongan pemerintah kota, dan rombongan pengusaha. Ini juga berbeda dengan *Jawa Pos* yang menuliskan semua anggota rombongan sebagai pengusaha.

Narasi mengenai rute perjalanan rombongan ini juga diceritakan dengan cukup detail. Mulai dari tanggal 20 Februari mereka datang di Surabaya setelah mengunjungi Jakarta, hingga jadwal keberangkatan ke tujuan mereka selanjutnya yaitu Malaysia pada tanggal 21 Februari pukul 13.00. Keterangan waktu juga dicatat untuk menunjukkan narasi utama dalam artikel ini, yakni acara perjamuan untuk menyambut rombongan, yakni 20 Februari jam 19.00. Dari bagian awal artikel ini, sudah terlihat perbedaan dari segi konstruksi transitivitas yang digunakan. Mulai dari judul hingga paragraf awal tentang narasi perjamuan, konstruksi yang digunakan adalah konstruksi aktif dengan subjek utama adalah Kadin Jawa Timur Komisi Tiongkok. Mereka yang menjamu rombongan dari Yangzhou ini. Hal ini berbeda dengan konstruksi di *Jawa Pos*, yang menggunakan konstruksi pasif yang menyatakan rombongan diterima di Graha Pena.

Selain keterangan waktu, tempat diadakannya perjamuan juga dinyatakan dengan jelas. Para tokoh dari Surabaya yang hadir saat itu, meski tidak disebutkan namanya satu per satu, sudah cukup dijelaskan dengan detail, paling tidak dari komunitas jenis apa mereka berasal, yakni komunitas masyarakat Tionghoa, perkumpulan alumni, serta perkumpulan olahraga pagi. Dan sekitar puluhan orang dari pihak Surabaya yang hadir ini, bila melihat kelompok yang mereka wakili, maka semuanya adalah etnis Tionghoa. Yang dicatat bukan etnis Tionghoa hanyalah Dahlan Iskan yang ikut hadir saat itu.

Narasi tentang acara perjamuan diceritakan secara runtut per prosesi acara, yang dimulai dengan kata sambutan dari perwakilan Kadin Jatim Komisi Tiongkok, Alim Markus, dilanjutkan dengan kata sambutan dari pimpinan rombongan Yangzhou yang juga merupakan walikota Yangzhou, Ji Jianye, hingga pertukaran cendera mata oleh Dahlan Iskan, Ji Jianye serta Alim Markus. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan ramah tamah, yang dimeriahkan dengan penampilan tarik suara oleh masing-masing pihak, baik Yangzhou maupun Surabaya. Sekali lagi, keterangan waktu usainya acara malam itu kembali ditulis dengan jelas, yakni pukul 21.00. Narasi kemudian ditutup dengan mengatakan rencana kunjungan rombongan di keesokan harinya, yakni mengunjungi pabrik Maspion sebelum bertolak ke Malaysia.

Presuposisi bisa kita lihat pada bagian

Puluhan orang perwakilan komunitas masyarakat Tionghoa, perkumpulan alumni, perkumpulan olahraga pagi, memenuhi undangan hadir di acara tersebut. (*Shù shí míng Sishuǐ gè huá shè, xiàoyǒu huì, chén yùn huì de dàibǎo yìngyāo chūxí.*)

Di sini dipresuposisikan bahwa para hadirin dari pihak Surabaya hadir atas undangan. Namun tidak dijelaskan siapa yang mengundang mereka. Bila dilihat dari konteks penyelenggara acara, mestinya Kadin Jatim Komisi Tiongkok lah yang mengundang. Yang menarik adalah semua hadirin ini adalah etnis Tionghoa.

Selain itu di bagian lain

Saya mewakili pengusaha Jawa Timur berharap agar pengusaha Yangzhou bisa berinvestasi di Jawa Timur, membantu memulihkan perekonomian Indonesia. (*Wǒ dàibǎo Dōngzhǎowā qǐyèjiā xīwàng Yángzhōu qǐyè jiā néng zài Dōngzhǎowā tóuzī, xiézhù fūsū Yìnní de jīngjì.*)

Kata-kata “mewakili pengusaha Jawa Timur” menunjukkan presuposisi bahwa Alim Markus adalah representasi para pengusaha Jawa Timur. Walau tidak jelas apakah semua pengusaha Jawa Timur merasa terwakili oleh Alim Markus, tapi kata-kata ini memberikan nuansa bahwa undangan Alim Markus agar pengusaha Tiongkok datang berinvestasi ini bukanlah

untuk kepentingan pribadinya, tetapi dipresuposisikan memang merupakan harapan semua pengusaha Jawa Timur. Kemudian kata-kata “memulihkan perekonomian Indonesia” menandakan adanya presuposisi bahwa perekonomian Indonesia saat itu sedang tidak baik. Lima tahun sejak krisis moneter tahun 1998, tampaknya masih ada wacana bahwa perekonomian Indonesia masih belum pulih.

2. Praktik Wacana

Berbeda dengan artikel di *Jawa Pos*, yang hanya menyoroti Yangzhou sebagai tujuan investasi, maka poin utama dari artikel *Harian Nusantara* terletak di dua wacana, yakni isi dari sambutan Alim Markus, serta sambutan Ji Jianye. Bila *Jawa Pos* hanya mengungkapkan wacana dari Ji Jianye bahwa Yangzhou adalah kota dengan iklim investasi yang kondusif, maka di *Harian Nusantara* ini, Alim Markus mengungkapkan hal yang sama tetapi dari sisi sebaliknya, yakni Surabaya adalah kota yang memiliki iklim investasi yang kondusif, sehingga diharapkan pengusaha Yangzhou bisa turut melakukan investasi di Surabaya. Hal sebaliknya juga diungkapkan oleh Ji Jianye, yang mengenalkan kota Yangzhou, sebagai sebuah kota dengan iklim investasi yang baik, dan menyambut pengusaha Indonesia juga melakukan investasi di sana. Dua wacana yang mengungkapkan keterbukaan kota Surabaya dan Yangzhou untuk investasi, memberikan nuansa yang berimbang, sehingga apabila digabungkan, timbullah wacana tentang kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok yang saling menguntungkan.

Dari subjek pada transitivitas yang dipakai, terkesan pula bahwa dua sudut pandang, baik pihak Surabaya dan Yangzhou, disajikan dengan berimbang. Ini berbeda dengan wacana di *Jawa Pos* yang terkesan lebih condong pada sudut pandang delegasi tamu. Sedangkan dari segi intertekstualitas, hanya kutipan tak langsung yang digunakan untuk menuliskan perkataan dari Alim Markus dan Ji Jianye. Foto yang dipasang bersama artikel

ini juga ada beberapa, dan cukup beragam, tidak hanya memperlihatkan anggota rombongan dari Yangzhou saja.

3. Praktik Sosial

Seperti tipikal artikel tentang kunjungan rombongan dari Tiongkok ke Indonesia, *Harian Nusantara* memberikan penekanan pada hal menjalin hubungan baik serta meningkatkan kerjasama antara kedua negara. Pemberitaan tentang perjamuan makan malam yang diadakan oleh pihak Indonesia di sini juga menegaskan hal itu. Sikap terbuka dan menyambut delegasi Tiongkok ini terutama dilakukan oleh para pengusaha Tionghoa. Mereka bertindak selaku mediator dalam hubungan perekonomian kedua negara. Wacana inilah yang sering kita temui di dalam artikel-artikel *Harian Nusantara*. Walau hadir pula Dahlan Iskan di acara ini, namun tetap terasa para pengusaha Tionghoa dan hadirin dari etnis Tionghoa lah yang lebih dominan.

Hal yang menarik dari penyambutan delegasi dari Yangzhou oleh Kadin Jatim adalah penyampaian kata sambutan oleh Alim Markus. Mengingat bahwa Ketua Kadin Jatim Komisi Tiongkok, Dahlan Iskan juga ikut hadir dalam acara ini, secara logika seharusnya Dahlan Iskan lah yang memberikan kata sambutan. Tetapi menariknya yang memberikan kata sambutan justru adalah Alim Markus, yang hanya merupakan perwakilan dari pengurus Kadin Jatim Komisi Tiongkok, serta perwakilan pengusaha Jawa Timur. Tidak jelas apa penyebab hal ini, karena Dahlan Iskan sebenarnya juga bisa berbahasa Tionghoa, walau mungkin tidak sefasih Alim Markus. Ini hanya bisa diprediksi, kemungkinan karena masalah kemampuan berbahasa Tionghoa. Mereka yang lebih mampu berbahasa Tionghoa secara langsung tanpa penerjemah, mungkin akan terkesan lebih akrab dengan rombongan tamu dari Tiongkok ini. Dan senada dengan paragraf di atas, Alim Markus sebagai perwakilan pengusaha Tionghoa, di sini terlihat lebih memegang peranan aktif sebagai mediator kedua negara. Bahkan dari foto-foto yang dipasang bersama teks artikel ini, foto *close-up* Alim

Markus dipasang sejajar dengan Ji Jianye, sedangkan Dahlan Iskan hanya ditampilkan pada saat melakukan pertukaran cendera mata.

4.2.4.3 Dari Kunjungan Parlemen Jiangmen ke Wakil Rakyat di DPRD Surabaya. 16 September 2014, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Penggunaan kata “dari” pada judul artikel ini yakni “Dari Kunjungan Parlemen Jiangmen ke Wakil Rakyat di DPRD Surabaya”, memberikan kesan seolah artikel ini hendak menceritakan “apa yang didapat dari” atau “cerita dari” kunjungan parlemen Jiangmen ke DPRD Surabaya. Tersirat bahwa artikel ini hendak menekankan lebih pada pengalaman yang diperoleh oleh para wakil rakyat di DPRD Surabaya setelah dikunjungi oleh wakil parlemen Jiangmen. Sudut pandang yang ditampilkan adalah dari anggota DPRD Surabaya, bukan dari sudut pandang anggota parlemen Jiangmen. Atau bisa juga dari sudut pandang wartawan, yakni “apa yang didapat dari” kunjungan itu adalah pengalaman yang didapat oleh wartawan penulis berita ini, setelah meliput kunjungan parlemen Jiangmen.

Nama jabatan pemimpin rombongan Jiangmen ditulis menggunakan bahasa Inggris. Pemilihan penyebutan dengan bahasa Inggris ini memberikan kesan asing atau luar negeri, pada rombongan tamu ini. Namun artikel ini tetap memberikan tambahan penjelasan padanan jabatan tersebut di Indonesia.

Kata *sowan* digunakan untuk menyebut “berkunjung” ke walikota. *Sowan* adalah kata bahasa Jawa yang berarti menghadap atau berkunjung pada orang yang dianggap harus dihormati. Maka di sini secara implisit dikesankan bahwa rombongan parlemen Jiangmen ini telah santun dalam kunjungannya dengan terlebih dahulu mengunjungi walikota. Penggunaan kata bahasa Jawa ini juga menunjukkan kesan akrab kepada para tamu ini.

Kesan akrab juga ditunjukkan lewat narasi tentang perkenalan dengan anggota DPRD Surabaya. Secara khusus artikel ini menggambarkan suasana perkenalan ini, dengan

memberikan contoh beberapa anggota DPRD memperkenalkan diri mereka, terutama anggota dewan yang mencoba berbahasa Tionghoa, maupun yang memang bisa berbahasa Tionghoa, yang memungkinkan komunikasi lebih akrab dengan delegasi tamu tersebut. Menarik bahwa di artikel ini juga disebutkan bagaimana anggota DPRD Surabaya banyak yang terlihat canggung saat perkenalan. Tidak disebutkan dengan jelas apa penyebab mereka canggung, namun secara implisit terkesan karena kesulitan komunikasi atau halangan bahasa, dan bisa jadi karena anggota DPRD ini masih baru bertugas.

Presuposisi nampak melalui kalimat

'Karena saya belum fasih, saya ingin mengucapkan ni hao ma," ujar ujar legislator asal Partai Demokrat tersebut.

Ungkapan “ni hao ma” di sini adalah presuposisi, yakni “ni hao ma” adalah perkataan dalam bahasa Tionghoa. Meskipun pembaca *Jawa Pos* belum tentu semuanya mengerti apa arti “ni hao ma” itu, dan belum tentu mengetahui bahwa “ni hao ma” adalah bahasa Tionghoa.

Dari narasi yang disampaikan, tidak diketahui jelas apakah tujuan kunjungan atau pembicaraan dengan DPRD Surabaya membuahkan kesepakatan atau hasil tertentu. Artikel ini lebih memilih menggambarkan bagaimana anggota dewan lebih banyak bertanya berbagai hal kepada rombongan Jiangmen. Dan kata-kata yang digunakan untuk pertanyaan mereka lebih condong mempunyai makna “permasalahan”, seperti “problem”, “persoalan kualitas”, serta “fasilitas religi untuk menerima turis asing (para muslim untuk bisa mendapatkan makanan halal)”, yang cenderung bernada kritis. Tidak disebutkan mengenai jawaban dari rombongan Jiangmen. Sedangkan untuk hasil pertemuan ini sendiri, di bagian akhir artikel dituliskan bahwa rencana kerjasama tersebut masih digodok.

2. Praktik Wacana

Artikel ini memilih menyajikan berita kunjungan parlemen Jiangmen dari sudut pandang anggota DPRD Surabaya. Narasi yang disajikan juga lebih banyak melukiskan apa

yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menerima kunjungan ini, lebih dari apa yang dilakukan oleh rombongan Jiangmen. Dalam hal ini *Jawa Pos* lebih mengutamakan pada respon anggota DPRD sebagai tuan rumah. Dengan menggunakan gaya penulisan yang condong pada kesan yang didapat dari bagaimana DPRD Surabaya menerima kunjungan, daripada reportase murni tentang kunjungan ini, maka pembaca artikel ini kemungkinan akan lebih menyoroti perilaku atau kinerja anggota DPRD Surabaya, daripada tujuan kunjungan rombongan Jiangmen.

Intertekstualitas internal melalui kutipan para tokoh dalam berita ini nampak melalui kutipan langsung dan tak langsung perkataan para anggota DPRD, sedangkan perkataan rombongan Jiangmen hanya dikutip secara tak langsung. Ini sekali lagi juga menegaskan sudut pandang yang diambil oleh berita ini, yakni dari sisi DPRD Surabaya sendiri.

Sedangkan interdiskursivitas nampak lewat digunakannya wacana laporan formal dengan wacana non-formal yang berisikan cerita perkenalan dan interaksi para anggota DPRD dengan rombongan Jiangmen.

Jawa Pos juga merekontekstualkan pembicaraan formal antara delegasi kedua negara, menjadi pembicaraan yang terkesan informal, lewat adanya kesan canggung dalam perkenalan anggota DPRD, maupun anggota DPRD yang diceritakan mencoba berbicara dalam bahasa Tionghoa.

3. Praktik Sosial

Pemilihan sudut pandang dari sisi anggota DPRD Surabaya, memberikan kesan adanya batas antara 'kita' DPRD Surabaya dan 'mereka' rombongan Jiangmen. Dari negosiasi yang diberitakan dalam artikel, juga terkesan bagaimana tujuan rombongan Jiangmen untuk melakukan investasi di Surabaya, tidak jelas apakah tercapai. Artikel ini tidak menjelaskan apakah pihak 'kita' mau menerima penanaman modal dari pihak 'mereka' atau pihak 'asing' tersebut. Selain itu, artikel ini juga terlihat hendak menyoroti bagaimana

kinerja anggota DPRD Surabaya yang baru dilantik. Melalui pemberitaan ini, diharapkan masyarakat juga bisa menilai bagaimana kinerja para wakil mereka di pemerintahan.

Maka konteks lebih luas dari artikel ini adalah dua hal, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, yang diwujudkan melalui kerjasama antara Surabaya dan Jiangmen. Tetapi dalam wacana yang ditampilkan, terkesan ada sekat yang jelas antara pihak Surabaya dan Jiangmen. Tidak ditampilkannya peran etnis Tionghoa sebagai mediator, memperkuat wacana ini. Maka dari sudut arus utama, Tiongkok dipandang sebagai sebuah negara yang lain, sang Liyan dari Indonesia. Konteks kedua adalah kondisi DPRD Surabaya yang baru. Pembaca paling tidak mendapatkan sedikit gambaran bagaimana wajah DPRD Surabaya sekarang ini.

4.2.4.4 Zhōngguó Jiāngmén shì zhèngfǔ dàibiǎo tuán lǐlín Sìshuǐ jiāoliú fāngwèn: Jièshào Jiāngmén fāzhǎn qíngkuàng zēngjìn xiānghù liǎojiě yú jiāoliú xúnqiú jìnyībù wùshí hézuò (中国江门市政府代表团莅临泗水交流访问：介绍江门发展情况 增进相互了解与交流 寻求进一步务实合作, Rombongan Perwakilan Pemerintah Kota Jiangmen Tiongkok Mengunjungi Surabaya: Memperkenalkan Pembangunan Kota Jiangmen, Meningkatkan Hubungan dan Saling Pengertian, Mencari Kerjasama yang Lebih Nyata) 16 September 2014, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Artikel ini menggunakan judul yang cukup panjang dengan transitivitas yang lengkap meliputi subjek dan apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan cukup detil. Dan pada paragraf pembuka, yang merupakan inti dari seluruh teks, juga mengulang kembali apa yang diungkapkan pada judul, dengan menambah detil tempat-tempat yang dikunjungi oleh rombongan Jiangmen, serta hasil dari kunjungan tersebut. Ini memberikan perbedaan yang cukup kontras dengan artikel di *Jawa Pos*, yang cenderung menyoroti dari sisi DPRD Surabaya sebagai pihak yang dikunjungi.

Dari narasi teks keseluruhan, artikel di *Harian Nusantara* memberikan laporan kunjungan ini dengan lebih detil. Hampir satu halaman penuh diberikan khusus untuk laporan ini, plus foto-foto dengan jumlah yang cukup banyak. Berbeda dengan artikel *Jawa Pos* yang hanya fokus pada pemberitaan kunjungan ke DPRD, artikel *Harian Nusantara*

menuliskan semua kunjungan yang dilakukan pada hari itu, yakni mengunjungi Pemerintah Kota Surabaya, DPRD Surabaya, serta Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa cabang Jawa Timur. Dan pemberitaan tentang kunjungan ke DPRD sendiri ditulis hanya dalam satu paragraf.

Teks ini menyebutkan dengan detil siapa saja anggota rombongan Jiangmen, yang berjumlah tujuh orang (agak berbeda dengan teks di *Jawa Pos* yang menyebutkan enam orang, ini dikarenakan *Harian Nusantara* menyebutkan salah satu anggota rombongan ditemani dengan istrinya), lengkap dengan jabatan dan nama masing-masing orang. Ini berbeda dengan *Jawa Pos* yang hanya menyebutkan nama tiga orang, dengan hanya satu nama jabatan yang disebutkan. Dari konteks beritanya, ini bisa dipahami sebab *Jawa Pos* lebih fokus pada kunjungan ke DPRD, dengan demikian hanya menyebutkan nama orang-orang yang berhubungan dengan kunjungan ke DPRD itu (tiga orang). Di *Harian Nusantara*, nama jabatan masing-masing orang secara otomatis disebutkan dengan bahasa Tionghoa, langsung sesuai nama jabatan mereka di Tiongkok. Selain menyebutkan nama-nama anggota rombongan, artikel ini juga menyebutkan nama-nama pengusaha Tionghoa Surabaya yang turut menemani rombongan.

Narasi teks ini terlihat lebih menekankan kunjungan ke pemerintah kota Surabaya. Penceritaan hal-hal apa saja yang dibicarakan di pemerintah kota ditulis dengan cukup detil. Dan ditulis pula bahwa pemerintah kota Surabaya menyambut baik pengusaha Jiangmen untuk berinvestasi di Surabaya. Demikian sebaliknya, rombongan Jiangmen juga menyambut baik apabila delegasi dari Surabaya hendak berkunjung ke Jiangmen, demi mewujudkan kerjasama yang lebih konkrit. Perbedaan yang nampak dengan teks *Jawa Pos* adalah di *Harian Nusantara* dituliskan, rombongan diterima oleh asisten bidang perekonomian pemerintah kota dan kepala bagian kerjasama, berbeda dengan *Jawa Pos* yang menulis rombongan *sowan* ke walikota.

Sedangkan narasi tentang kunjungan ke DPRD Surabaya ditulis sangat singkat. Dan berbeda dengan teks di *Jawa Pos* yang menyebutkan bahwa rombongan Jiangmen diterima oleh dua orang wakil ketua DPRD, yakni Darmawan dan Ratih Setyowati, di *Harian Nusantara* hanya disebutkan satu orang wakil ketua DPRD, Ratih Retnowati, Dra., M.Si. Di sini *Jawa Pos* melakukan kekeliruan penulisan nama, karena nama yang benar seharusnya adalah Ratih Retnowati⁴. Baik *Harian Nusantara* maupun *Jawa Pos* melaporkan bahwa para anggota DPRD mengajukan berbagai pertanyaan tentang Jiangmen kepada rombongan tersebut. Bedanya adalah *Harian Nusantara* menyebutkan bahwa anggota DPRD memberikan penilaian yang baik kepada prestasi pembangunan kota Jiangmen, sedangkan di *Jawa Pos* tidak disebutkan. Dan *Harian Nusantara* juga menulis bahwa Li Zhaoyuan, wakil ketua DPRD Jiangmen memberikan jawaban dengan detil atas semua pertanyaan.

Setelah narasi kunjungan ke pemerintah kota dan DPRD, artikel menceritakan kunjungan ke Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa cabang Jawa Timur. Dituliskan bahwa kedua belah pihak menandatangani *letter of intent* kerjasama, dengan kesepakatan untuk bersama-sama memajukan perkembangan perekonomian di kedua tempat, serta mendorong investasi serta relasi perdagangan. Secara lengkap artikel ini juga menuliskan nama-nama siapa saja perwakilan dari pihak Surabaya yang hadir dalam penandatanganan ini.

Teks *Harian Nusantara* terlihat menekankan dan mengulang-ulang kata-kata seperti “kerjasama (*hezuo*)” (21 kali), “persahabatan (*youhao*)” (13 kali), dan “komunikasi (*jiaoliu*)” (14 kali). Begitu pula dengan kata-kata “kota (*chengshi*)” (14 kali) dan “pembangunan (*fazhan*)” (14 kali). Dari sini diketahui bahwa teks ini terkesan ingin menunjukkan hubungan bilateral dan kerjasama yang baik antara Surabaya dan Jiangmen.

⁴ Data dari dprd.surabaya.go.id/?pages=anggota&tipe=1. Diakses 26 November 2014.

Selain itu, dalam kalimat

Wakil Ketua Li Zhaoyuan sangat memuji sumbangsih dari komunitas Tionghoa Surabaya terhadap hubungan baik antara Tiongkok dan Indonesia. (*Lí Zhàoyuán fūzhūrèn....., bīng gāodù zànyáng Sīshuǐ huá shè wéi Zhōng Yīn yǒuhǎo suǒ zuò gòngxiàn.*)

terdapat presuposisi (yang diberi tanda garis bawah) bahwa komunitas Tionghoa Surabaya memiliki sumbangsih terhadap hubungan baik antara Tiongkok dan Indonesia. Di sini terlihat bahwa artikel ini membangun konsepsi umum yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bahwa komunitas Tionghoa memang telah berperan dalam hubungan bilateral Tiongkok dan Indonesia. Presuposisi lain terlihat dalam kalimat

Ia menekankan, pemerintah dan masyarakat Jiangmen dan Surabaya seringkali saling berkunjung, kedua kota memiliki banyak kesamaan, potensi kerjasama kedua pihak sangat besar, berharap ke depannya kedua belah pihak dapat meningkatkan kerjasama. (*Tā qiángdiào, Jiāngmén yǔ Sīshuǐ de zhèngfǔ hé mǐnjiān hù fǎng pínfán, liǎng shì yǒu xǔduō xiāngsì zhī chù, shuāngfāng hézuò qiánli jùdà, xīwàng jīnhòu shuāngfāng jìnyībù jiāqiáng hézuò.*)

Dari kata-kata yang digarisbawah, dianggap bahwa pemerintah dan masyarakat kedua kota selama ini sudah sering melakukan kunjungan. Dan kata “meningkatkan” mengimplikasikan bahwa selama ini sudah ada kerjasama yang terjalin.

2. Praktik Wacana

Berbeda dengan artikel *Jawa Pos*, artikel *Harian Nusantara* lebih menyoroti apa yang dilakukan oleh rombongan Jiangmen. Tidak nampak interdiskursivitas dari segi genre teks di sini, karena keseluruhan teks bernada laporan resmi. Intertekstualitas terwujud melalui kutipan tak langsung, yakni kutipan perkataan dari tiga orang, M. Taswin dari pemerintah kota, wakil ketua DPRD Jiangmen Li Zhaoyuan, serta ketua Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa cabang Jawa Timur Chen Yituan. Perlu diketahui bahwa teks berita media berbahasa Tionghoa pada umumnya memang jarang menggunakan kutipan langsung (D. Li 1993). Dari banyaknya penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan

kerjasama dan hubungan baik, terkesan adanya rekontekstualisasi yang bersifat menekankan adanya hubungan baik antara kedua kota.

Wacana bahwa etnis Tionghoa Surabaya bertindak sebagai mediator hubungan bilateral Surabaya dan Jiangmen tampak jelas di sini. Mereka berperan aktif menjembatani komunikasi antara kedua belah pihak. Hal ini tidak terlihat di *Harian Nusantara*.

3. Praktik Sosial

Teks ini nampak sebagai salah satu contoh teks tipikal di *Harian Nusantara* yang memberitakan kunjungan atau hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Teks semacam ini mendapat porsi yang cukup besar. Di *Harian Nusantara*, pada edisi keesokan harinya, tanggal 17 September 2014, kembali dimuat kunjungan delegasi Jiangmen ini ke tempat-tempat yang lain di Surabaya, yang juga dimuat besar-besaran. Hal ini menunjukkan salah satu agenda dari *Harian Nusantara* yaitu meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, terutama melalui peran etnis Tionghoa di Indonesia. Ini ditunjukkan melalui ditampilkannya pengusaha Tionghoa Surabaya di dalam teks ini sebagai mediator dan pendamping rombongan Jiangmen.

Seperti artikel-artikel lain yang sejenis, teks ini menempatkan etnis Tionghoa dalam citra positif, berkontribusi bagi terjalinnya hubungan baik antara Indonesia-Tiongkok. Tampaknya ini menjadi ‘sumbangsih’ etnis Tionghoa bagi Indonesia, yang bila ditarik ke konteks yang lebih luas, sekali lagi memberikan argumen bahwa etnis Tionghoa telah turut ‘berjasa’ bagi negara. Persepsi ini tampaknya hendak ditekankan kepada pembaca. Namun di sisi lain, konteks lain yang berlawanan juga muncul, yakni bahwa etnis Tionghoa dikesankan mempunyai afiliasi yang kuat dengan Tiongkok. Konteks ini berlawanan dengan wacana etnis Tionghoa sebagai warga negara yang baik. Terlihat masih adanya negosiasi antara kedua kuasa ini, dimana di satu sisi menarik etnis Tionghoa ke poros warga negara

Indonesia, sedangkan di sisi lain, menarik etnis Tionghoa ke dalam pan-Tionghoa, dengan identitas Tionghoa global.

4.2.5 Kriminalitas oleh Etnis Tionghoa

Topik tentang kriminalitas dipilih karena berita kriminal juga menunjukkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini khususnya yang berhubungan dengan etnisitas. Pelaku kejahatan dikonstruksi sedemikian rupa oleh media sehingga menarik perhatian pembaca, dan tak jarang menghasilkan stereotipe tertentu. Namun sebaliknya, konsumen media juga melakukan pemilihan dan penilaian sendiri atas konsumsi berita-berita kriminal seperti ini. Dari observasi awal di kedua surat kabar, secara kasar dapat diketahui bahwa *Harian Nusantara* jarang memuat berita kriminalitas yang dilakukan oleh etnis Tionghoa. Hal ini juga menjadi faktor lain mengapa topik ini dipilih.

4.2.5.1 Pembunuh Lydia Tertangkap. 2 Februari 2003, Jawa Pos

1. Analisis Teks

Artikel ini merupakan artikel pertama dari rangkaian artikel yang memberitakan tertangkapnya pembunuh Lydia Burhan Kartolo, seorang mahasiswa Universitas Kristen Petra, beserta penyidikan tentang kasus ini. Karena cukup lama, sekitar sembilan bulan, kasus ini baru menemukan titik terang dengan tertangkapnya pelaku pembunuhan, maka *Jawa Pos* memuatnya secara besar-besaran. Di halaman depan bagian Metropolis, selain artikel ini, masih ada dua artikel kecil lainnya yang juga berhubungan dengan kasus ini. Pelaku pembunuhan sendiri bukan etnis Tionghoa, tetapi yang menjadi tersangka otak pembunuhan adalah Erwin Jaya Seputra, seorang etnis Tionghoa yang juga adalah mantan pacar sang korban.

Judul berupa kalimat singkat ‘Pembunuh Lydia Tertangkap’, yang memang berkesan informatif dan mengena. Setelah sekian lama menunggu tertangkapnya sang pembunuh, maka judul yang digunakan ini cukup memberikan daya tarik yang kuat bagi pembaca. Sub

judul ditulis ‘Mengaku Disuruh Erwin, Dibayar Rp 250 Ribu’. Di sini tidak ditulis nama pembunuh, Bambang, tetapi yang ditulis sebagai subjek adalah Erwin, tersangka otak pembunuhan. Maka dari judul dan sub judul, terlihat fokus lebih mengarah ke Erwin sebagai otak pembunuhan.

Presuposisi terlihat pada *lead* berita, yakni

Kasus pembunuhan Lydia Burhan Kartolo yang terjadi April tahun lalu akhirnya terungkap.

Kemarin, polisi berhasil meringkus tersangka pembunuh mahasiswi UK Petra itu.

Dari kata ‘akhirnya’, ada presuposisi bahwa kasus ini sudah bergulir dan diselidiki cukup lama (sejak April tahun lalu) dan selama ini belum membuahkan hasil. Sedangkan kata ‘berhasil’ mengindikasikan bahwa polisi telah melakukan berbagai upaya untuk memecahkan kasus ini, dan pada akhirnya mereka berhasil.

Mengenai mengapa penyidikan sampai begitu lama (sembilan bulan), di artikel ini tidak dijelaskan. Sebaliknya, artikel ini lebih cenderung menghargai keberhasilan polisi dalam menangkap si pembunuh. Ini terlihat dari bagian berikut

Pembunuhan yang terjadi di toilet wanita lantai 9 gedung P UK Petra ini terbongkar berkat kerja keras tim khusus yang dibentuk Kapolwiltabes Surabaya Kombes Ito Sumardi.

Penggunaan kata-kata ‘berkat kerja keras’, memberikan kesan bahwa polisi telah bekerja keras dalam memecahkan kasus ini, sehingga layak untuk diapresiasi. Namun di bagian berikutnya kita melihat

Sejak 2 Januari 2003, tim yang dikomandani Iptu Agus Sugianto itu memintai keterangan 13 saksi yang diduga mengetahui kasus ini.

Keterangan waktu yang ditulis di sini, yaitu 2 Januari 2003, menunjukkan bahwa sebenarnya ‘kerja keras’ polisi itu baru dimulai sebulan yang lalu. Terkesan bahwa polisi kenyataannya

hanya bekerja secara efektif selama satu bulan. Dari narasi selanjutnya, dipaparkan bahwa penyelidikan yang dilakukan polisi juga hanyalah menanyai para saksi. Mereka juga bukanlah orang-orang yang istimewa sehingga memerlukan waktu yang begitu lama untuk mendapatkan mereka. Mereka merupakan *cleaning service* di UK Petra sendiri, yang mestinya pada saat kasus terjadi, sudah bisa dijadikan saksi. Padahal kasus ini terjadi pada April 2002. Dengan demikian pembaca yang jeli akan bertanya-tanya mengapa harus menunggu hingga Januari 2003 polisi baru membentuk tim khusus untuk menyelidiki secara intensif kasus ini. Alasan untuk hal ini lah yang tidak dijelaskan oleh artikel ini. Namun dari segi leksikal, kita jadi mempertanyakan makna dari istilah-istilah seperti ‘memeriksa secara maraton’, ‘penyelidikan yang intens’, ‘mengintensifkan penyelidikan’, ‘membawa dan menginterogasi’ terhadap para saksi. Apakah semua istilah ini sebenarnya adalah eufemisme untuk memperhalus hal yang sebenarnya dilakukan oleh polisi dalam menginterogasi saksi?

Istilah ‘pemuda keturunan’ digunakan untuk mengacu kepada (diduga) Erwin pada keterangan saksi berikut ini.

..... mengaku pernah mendengar ada pemuda keturunan yang memberikan amplop kepada seseorang berwajah Jawa, sore hari setelah pembunuhan itu.

Baik ‘pemuda keturunan’ maupun ‘berwajah Jawa’ tidak menunjuk secara jelas sebenarnya siapakah yang dimaksud dengan penanda fisik ini. Walau demikian, dari istilah ‘pemuda keturunan’ kita sudah bisa mengasosiasikannya kepada keturunan Tionghoa, karena artikel ini sudah memberikan konteks untuk itu (mantan pacar Lydia, yang merupakan etnis Tionghoa, serta foto Erwin yang berkulit kuning yang terlihat tipikal seperti etnis Tionghoa). Sedangkan ‘berwajah Jawa’, meski bisa saja seorang Tionghoa berwajah Jawa, juga cenderung mengacu kepada etnis Jawa. Kedua penanda identitas ini menggunakan wacana ras, yakni keturunan dan fisik, dan keduanya seolah dibuat untuk mengaburkan siapa sebenarnya yang dimaksud, karena memang ini hanyalah informasi dari saksi.

Pengakuan Bambang mula-mula menyebutkan yang menyuruhnya adalah seseorang bernama Kong. Tidak jelas mengapa Bambang sengaja mengaburkan identitas Erwin. Namun yang menarik adalah bagaimana penanda-penanda seperti nama tipikal Tionghoa, istilah ‘pria keturunan’, yang digunakan untuk mendeskripsikan seorang Tionghoa.

“Yang menyuruh saya itu Kong, pria keturunan bertubuh gemuk dan usianya sekitar 45 tahun. Saya tak tahu siapa nama aslinya dan di mana rumahnya karena saya kenal dengan dia di depan Petra,” kata Bambang kepada *Jawa Pos*.

Dari sini kita setidaknya bisa melihat bagaimana etnis bukan Tionghoa mengkonstruksi sebuah identitas Tionghoa. Ia menggunakan nama tipikal Tionghoa, yakni Kong, sehingga kita langsung mengacu pada individu Tionghoa. Penanda nama sebenarnya bukan penanda mutlak seseorang memiliki identitas Tionghoa, sehingga digunakan pula penanda bersifat fisik, status keturunan, yakni ‘pria keturunan’. Maka identitas si ‘Kong’ ini dikonstruksi dari wacana nama Tionghoa, serta wacana rasial (biologis keturunan). Dan dengan identitas seperti ini, ‘Kong’ bisa merupakan pria Tionghoa siapa saja, asalkan ia bertubuh gemuk dan berusia sekitar 45 tahun.

Narasi pada akhirnya menceritakan kalau ‘Kong’ ini sebenarnya adalah seorang mahasiswa, yaitu Erwin. Dan saat ditangkap, Erwin tidak mengaku kalau ia yang menyuruh membunuh Lydia.

Saat ditanya apakah dia yang menyuruh Bambang, Erwin yang kemarin terlihat pucat itu menggelengkan kepala. “Saya tak kenal dia,” akunya dengan keringat dingin menetes.

Artikel ini terlihat ingin membangun kesan bahwa Erwin memang adalah yang menyuruh Bambang melakukan pembunuhan. Ini diperlihatkan dari digunakannya deskripsi tentang diri Erwin, yakni ‘terlihat pucat’. Lalu hiperbola juga dipergunakan lewat kata-kata ‘keringat dingin menetes’. Bagian akhir artikel juga menguatkan bangunan kesan ini

Kabarnya, polisi terpaksa melepas Erwin karena saat itu belum mempunyai bukti kuat soal keterlibatan mantan pacar Lydia ini. Meski banyak petunjuk yang mengarah pada dirinya, Erwin tetap saja tidak mengaku membunuh Lydia.

‘Banyak petunjuk yang mengarah pada dirinya’ mengindikasikan bahwa Erwin memang merupakan yang diduga kuat sebagai otak pembunuhan.

Presuposisi terlihat kembali pada pernyataan polisi menanggapi Erwin yang tidak mau mengaku.

Menurut Kapolwil pengakuan Erwin tidaklah penting. ”Yang penting kami punya bukti, dan pengakuan tersangka utama. Tak ada rekayasa dalam kasus ini,” kata Ito yang segera menempati pos baru sebagai Irwasda Polda Bali itu.

‘Tak ada rekayasa’ mengindikasikan bahwa ada kemungkinan dugaan polisi merekayasa kasus ini sedemikian rupa sehingga Erwin yang dijadikan tersangka, dengan hanya berdasarkan pengakuan Bambang saja.

2. Praktik Wacana

Wacana utama yang dihadirkan oleh artikel ini adalah tertangkapnya Bambang, pembunuh Lydia, serta Erwin, yang diduga merupakan otak pembunuhan. Sebagian besar isi berita menuliskan kronologi penangkapan Bambang. Sedangkan di bagian akhir artikel ditambahkan wacana tentang Erwin yang tidak mengaku sebagai yang menyuruh melakukan pembunuhan. Namun wacana ini dibangun sedemikian rupa sehingga dikesankan bahwa Erwin memang adalah otak pembunuhan ini. Dari sini terkesan artikel ini hendak menggeser fokus wacana dari Bambang kepada Erwin, sebagai otak utama pembunuhan. Karena Bambang telah mengaku memang membunuh Lydia, maka hal yang belum terungkap adalah apakah benar Erwin memang menyuruh Bambang melakukan pembunuhan itu. Ini adalah hal yang ‘dijual’ oleh artikel-artikel kriminal semacam ini di surat kabar, karena bagaikan sebuah kisah misteri, pembaca akan tertarik untuk mengikuti terus jalannya penyelidikan ini hingga sang otak pembunuhan benar-benar terungkap. Jadi sebenarnya selain secara implisit

hendak menguatkan dugaan bahwa Erwin adalah otak pembunuhan Lydia, artikel ini beserta keseluruhan serial berita kasus ini, juga merupakan *selling point* bagi *Jawa Pos*, karena dipengaruhi oleh unsur komersial yang mendasari agar surat kabar ini laku dibaca. Dengan sendirinya artikel ini merupakan sebuah mata rantai interteks dalam rangkaian teks tentang pemecahan kasus pembunuhan ini.

Hal lain yang menarik juga adalah diselipkannya wacana tentang identitas Tionghoa di dalam pengakuan Bambang. Konstruksi identitas Tionghoa ‘palsu’ yang dibuat Bambang ini meski tidak nyata, namun menggambarkan dengan tepat konstruksi tipikal Tionghoa dari persepsi etnis non-Tionghoa. Namun demikian, tidak terasa ada stereotip negatif kepada etnis Tionghoa.

3. Praktik Sosial

Dari kasus pembunuhan mahasiswa Tionghoa dengan tersangka otak pembunuhan juga adalah orang Tionghoa ini, artikel *Jawa Pos* tidak menunjukkan kesan mengkonstruksi identitas pelaku kejahatan yang berhubungan dengan etnisitas, walau ada wacana tentang konstruksi identitas Tionghoa, namun ini tidak memiliki nilai kritis, dan bukan stereotip negatif. Artikel ini bersifat seperti artikel berita kejahatan pada umumnya, dengan dipasang seperti ‘serial’, berusaha menarik perhatian pembaca untuk mengikuti perkembangan berikutnya. Dengan demikian untuk kasus ini, tidak nampak adanya hal yang menyudutkan etnis Tionghoa sebagai pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan digambarkan sama dengan gambaran pada umumnya. Satu hal yang mungkin adalah cerminan stereotip terhadap etnis Tionghoa adalah janji uang yang diberikan kepada pembunuh oleh Erwin, yang pada kenyataannya tidak ditepati sebesar nominal yang dijanjikan, tetapi lebih kecil. Di sini tersirat masih adanya unsur materi atau finansial yang terkait dengan etnis Tionghoa.

4.2.5.2 *Lishí 9 gè yuè Petra dàxué xiōngshā àn zhēnpò* (历时 9 个月 Petra 大学凶杀案侦破, Kasus Pembunuhan di Universitas Petra Terpecahkan Setelah 9 Bulan). 3 Februari 2003, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Harian Nusantara tidak memuat pemberitaan mengenai penyidikan kasus ini secara berseri dan besar-besaran seperti *Jawa Pos*. Bahkan mengenai tertangkapnya pembunuh Lydia, hanya diberitakan pada satu artikel ini saja. Dari penyajian artikel, langsung terlihat perbedaan dengan *Jawa Pos*, yakni hanya dipasang foto Bambang, tanpa foto Erwin. Sedangkan pada judul, juga tidak terdapat subjek. Judul malah memuat keterangan waktu yakni sembilan bulan, yang terkesan menekankan betapa lamanya kasus ini baru terkuak.

Presuposisi yang sama dengan artikel di *Jawa Pos* juga terlihat di sini.

Kasus pembunuhan yang terjadi di UK Petra Surabaya 4 April tahun lalu akhirnya terpecahkan. (*Qùnián 4 yuè 4 rì fāshēng yú Sīshuǐ Petra dàxué de xiōngshā àn zhōngyú zhēnpò.*)

Kata ‘akhirnya’ menandakan kasus ini sudah dalam penyidikan untuk waktu yang lama. Sedangkan kronologis penangkapan Bambang, tidak diceritakan secara lengkap seperti di *Jawa Pos*. Hanya digunakan kalimat-kalimat singkat berikut ini

Hingga 1 Februari sore, polisi sekali lagi menangkap *cleaning service* itu, Bambang, dan saat ditunjukkan bukti-bukti, ia baru mengaku kalau membunuh Lydia atas suruhan Erwin. (*Zhízhì 2 yuè 1 rì xiàwǔ, jǐngfāng zàicì dàibǔ gāi qīngjié gōng Bambang bìng chūshì wùzhèng shí, tā cái chéngrèn shì shòu Erwin zhǐshǐ, qīnshǒu cì sǐ Lidia de.*)

Kapolwil Surabaya Ito Sumardi mengatakan, polisi berdasarkan keterangan seorang *cleaning service* UK Petra yang lain bernama Noor, menemukan pisau dengan bekas darah yang ditiptkan di rumah Noor oleh Bambang sebulan yang lalu, sehingga sekali lagi menangkap Bambang. (*Sīshuǐ jǐng zhǎng Ito Sumardi shuō, jǐngfāng shì gēnjù Petra dàxué líng yī míng qīngjié gōng Noor tígōng de xiāoxī, zài Noor de jiā zhǎodào Bambang yīgè yuè qián jìcún de dài yǒu xiējī de bǐshǒu ér zàicì jiāng Bambang jūbǔ de.*)

Kata ‘sekali lagi’ mengindikasikan presuposisi bahwa Bambang sebelumnya telah tertangkap, atau bisa juga berarti bahwa sebelumnya polisi telah berusaha menangkap Bambang.

Sama seperti *Jawa Pos*, artikel ini tidak menjelaskan etnisitas Erwin secara eksplisit. Di *Jawa Pos* masih dipampang foto Erwin serta pengakuan palsu Bambang yang mengatakan otak pembunuhan adalah seorang Tionghoa, yang secara implisit menyatakan bahwa Erwin adalah orang Tionghoa. Sedangkan di *Harian Nusantara*, pembaca yang tidak mengikuti kasus ini dari awal, hanya bisa menduga etnisitas Erwin, karena hanya ditulis Erwin adalah mantan pacar Lydia, dan konteks UK Petra yang mayoritas mahasiswanya adalah etnis Tionghoa.

2. Praktik Wacana

Berbeda dengan *Jawa Pos*, *Harian Nusantara* biasanya memang jarang memuat berita kriminalitas dengan pelaku etnis Tionghoa. Terkesan bahwa ia hendak membuat citra positif tentang etnis Tionghoa, sehingga tidak terlalu mengekspos citra negatifnya. Di lain pihak, berita-berita semacam ini sudah dimuat secara besar-besaran di *Jawa Pos*, sehingga mungkin pembaca *Harian Nusantara* sudah membaca *Jawa Pos* lebih dahulu (contohnya artikel ini, yang terlambat satu hari dibanding *Jawa Pos*, karena *Harian Nusantara* tidak terbit pada hari Minggu). Dengan demikian, tidak dipandang perlu menginformasikan kembali apa yang sudah diketahui oleh para pembacanya.

Rekontekstualisasi nampak pada deskripsi penangkapan dan pengakuan Bambang yang ditulis dengan sangat singkat. Di *Jawa Pos* dikatakan bahwa polisi sempat dua kali mencoba menangkap Bambang, baru berhasil. Sedangkan di sini hanya digunakan presuposisi bahwa polisi telah ‘sekali lagi’ menangkap Bambang, yang bisa menimbulkan kesan bahwa dulunya Bambang pernah ditangkap. Rekontekstualisasi juga meliputi tidak disebutkannya pengakuan awal Bambang yang mengatakan bahwa yang menyuruhnya membunuh Lydia adalah seseorang bernama Kong. Di artikel ini langsung ditulis bahwa Bambang mengaku yang menyuruhnya membunuh adalah Erwin. Rekontekstualisasi lain juga terlihat pada bagian artikel, yang menyebutkan bahwa Erwin telah membuat pengakuan

awal bahwa ia menyuruh membunuh Lydia setelah ia dan Lydia putus. Ini berbeda dengan *Jawa Pos* yang mengatakan bahwa Erwin tidak mau mengaku.

3. Praktik Sosial

Walau tidak terlalu jelas terlihat, *Harian Nusantara* cenderung lebih ‘mengecilkan’ berita kriminal ini. Secara keseluruhan *Harian Nusantara* memang jarang sekali memberitakan kriminalitas etnis Tionghoa. Dari segi hangat tidaknya berita, mungkin bisa dipahami dengan alasan *Jawa Pos* atau surat kabar arus utama lainnya lebih menyajikan berita yang lebih baru, yang sebagai akibatnya, memuat berita-berita kriminal semacam ini dengan besar-besaran tidak akan mempunyai nilai yang bisa lebih ‘menjual’ daripada surat kabar arus utama. Namun di sisi lain, sebenarnya *Harian Nusantara* bisa mengisi celah lewat tulisan yang lebih menyoroti argumen atau sudut pandang etnis Tionghoa sendiri mengenai peristiwa kriminal yang melibatkan etnis mereka.

Maka dari konteks yang lebih besar, tampaknya *Harian Nusantara* berusaha menciptakan citra etnis Tionghoa yang positif, yang apabila ditarik kepada konteks yang lebih besar lagi, ini juga berhubungan dengan kelangsungan hidup etnis Tionghoa itu sendiri di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, mempertahankan citra positif memberikan kontribusi bagi terus terjaganya kesamaan hak mereka dengan warga negara dari etnis lain. Dengan meminimalkan citra negatif, diharapkan citra positif tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak etnis Tionghoa sebagai warga negara masih dipengaruhi dan terkesan ‘diukur’ berdasarkan citra positif yang mereka tampilkan.

4.2.5.2 Diperiksa, Penganiaya PRT Bersandiwara. 25 Mei 2011, *Jawa Pos*

Dua artikel yang akan dianalisis ini merupakan berita tentang peristiwa penganiayaan pembantu rumah tangga oleh keluarga majikannya, yang merupakan keluarga Tionghoa. *Jawa Pos* memuat liputan seputar kasus ini secara ‘berseri’ sebagai topik utama. Tercatat

mulai 23 Mei 2011 hingga 27 Mei 2011 setiap hari ada beberapa artikel tentang kasus ini. Bahkan termasuk perkembangan persidangan dan pengajuan peninjauan kembali oleh terdakwa, mulai kisaran akhir 2011 hingga pertengahan 2014, *Jawa Pos* masih terus memberitakannya. Sedangkan *Harian Nusantara* tidak mengikuti terus perkembangan kasus ini. Untuk keperluan analisis perbandingan kedua surat kabar, digunakan artikel tahun 2011, di mana pada tahun itu *Harian Nusantara* masih memberitakannya.

1. Analisis Teks

Judul artikel ini, ‘Diperiksa, Penganiaya PRT Bersandiwara’ menggunakan metafora ‘bersandiwara’ untuk menggambarkan penganiaya PRT membuat ulah saat pemeriksaan. Bila hanya membaca judulnya, pembaca mungkin kesulitan mengerti secara konkret sebenarnya apa yang dimaksud dengan ‘bersandiwara’ ini. Namun secara garis besar, kita bisa memahami bahwa ‘bersandiwara’ bermakna konotatif yakni ‘berpura-pura’. Dengan membaca *lead* berita, kita baru mengetahui dengan pasti maksud kata ‘bersandiwara’ ini.

Pada transitivitas di dalam teks, subjek pelaku kejahatan ditulis dengan jelas dengan nama yang lengkap, yakni Tan Fang May. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit ia adalah etnis Tionghoa, namun melalui namanya, pembaca bisa langsung tahu bahwa orang ini adalah orang Tionghoa. Anggota keluarga yang lain juga demikian, walaupun tidak menggunakan nama dari bahasa Tionghoa, dari tipikal namanya, seperti Lidya, Tantor, bisa diketahui bahwa mereka juga adalah orang Tionghoa. Secara keseluruhan, artikel ini lebih fokus kepada Tan Fang May, yang merupakan tersangka utama, otak dari penyiksaan tersebut. Pada paragraf pertama hingga kesepuluh dari tiga belas paragraf artikel ini, selalu muncul transitivitas dengan melibatkan nama ‘Tan Fang May’, ‘Tan’, atau ‘Tan Fang’ sebagai partisipannya. Dengan demikian benar-benar terasa penekanan artikel ini pada sosok pelaku utama kejahatan ini.

Selain langsung menggunakan nama lengkap, artikel ini juga menggunakan bentuk penamaan lain untuk mengacu pada Tan Fang May, yaitu ‘perempuan bengis’. Demikian pula dengan kata-kata ‘kejam’, ‘biadab’ dan ‘sadis’ yang juga digunakan untuk melukiskan perilaku Tan Fang May. Penyebutan ini mengandung makna bahwa kejahatan yang sudah dilakukan oleh Tan Fang May tergolong kejahatan yang berat, sehingga hanya seorang yang ‘bengis’, ‘biadab’ dan ‘sadis’ lah yang mampu melakukan kejahatan seperti itu.

Metafora ‘tangis bak dalam sinetron’ digunakan untuk mendeskripsikan ‘sandiwara’ yang dilakukan oleh Tan Fang May ketika diperiksa. Demikian pula kata-kata ‘berlagak layaknya orang stres’, ‘seperti orang gila’. Sedangkan untuk menggambarkan bagaimana perilaku ‘bersandiwara’ itu, deskripsi proses transitivitasnya melalui kata-kata mental ‘histeris’, material intransitif ‘ngesot-ngesot’, ‘menangis minta ampun’.

Dia beberapa kali tiba-tiba histeris ketika penyidik melontarkan pertanyaan seputar penganiayaan kepada Marlina.

"Biasanya kalau diperiksa malah ngesot-ngesot gitu, Mas," ujar salah seorang polisi.

Menurut polisi itu, tangis bak dalam sinetron tersebut semakin menjadi-jadi ketika Kanit PPA Iptu Suratmi mendatangi Tan.

"Berkali-kali warga Jalan Darmo Permai Selatan itu menangis meminta ampun dan berniat bunuh diri," paparnya.

Dia memang berlagak layaknya orang stres agar proses hukum yang menjerat dia dan ketiga anggota keluarganya bisa digugurkan.

Menurut Anom, polisi tidak serta merta percaya atas kondisi kejiwaan Tan yang mendadak seperti orang gila.

Dari sini kita melihat melalui digunakannya beragam kata baik metafora, proses mental maupun material untuk menggambarkan tingkah laku Tan Fang May ketika diperiksa, menunjukkan upaya untuk mendeksripsikan secara menyeluruh tingkah laku tersebut. Dan memang hal ini adalah tema utama dari artikel ini.

Sementara itu, dalam menyebutkan nama Liem Oe Yen, ditulis lengkap dengan jabatannya, yakni Ketua Koordinator Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya. Selain itu, *Jawa Pos* juga sempat menyelipkan predikasi Liem Oe Yen, yaitu ‘pengusaha besi di kawasan Kembang Jepun’. Penambahan predikasi ini memberikan kesan bahwa Liem Oe Yen seperti orang Tionghoa pada umumnya, berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha.

Transitivitas yang digunakan dalam menceritakan kunjungan Liem Oe Yen cukup lengkap dengan partisipan, proses dan keadaan. Misalnya

Saat melihat kondisi Marlina, pengusaha besi di kawasan Kembang Jepun itu mengaku sangat sedih.

‘melihat’ merupakan proses material transitif, dengan objeknya adalah kondisi Marlina. ‘Mengaku sangat sedih’ sekaligus merupakan proses verbal dan mental. Jadi secara keseluruhan, simpati dari ketua PMT ini disampaikan cukup jelas. Transitivity berikutnya mengenai pertemuan dengan Kasatreskrim Anom Wibowo, menggunakan subjek ‘pihaknya’.

Selasa pagi (24/5) pihaknya bertemu Kasatreskrim Anom Wibowo.

Kata ‘pihaknya’ memberikan kesan bahwa ada beberapa orang yang merupakan perwakilan dari Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya yang bertemu dengan polisi. Namun tidak dijabarkan siapa saja yang ikut bersama dengan Liem Oe Yen.

Namun, akan muncul pertanyaan mengenai mewakili siapakah Liem Oe Yen. Misalnya dalam kalimat pernyataan sikap berikut

"Kami dari PMT mengutuk kebiadaban pelaku," ujarnya.

Kata ‘kami’ di sini kelihatannya mengacu kepada kata ‘pihaknya’ di atas, yakni kemungkinan adalah beberapa orang perwakilan PMT. Namun demikian, akan timbul pertanyaan, identitas Tionghoa golongan manakah yang diwakili oleh PMT? Ini tidak diberitahukan di dalam artikel. Lebih lanjut lagi dalam kalimat pernyataan sikap berikutnya

"Masyarakat Tionghoa tidak akan membela," tuturnya.

Di sini Liem Oe Yen menggunakan istilah ‘masyarakat Tionghoa’, yang juga tidak dijelaskan masyarakat Tionghoa yang mana yang diwakili suaranya oleh Liem Oe Yen. Apakah PMT sudah bisa mewakili seluruh masyarakat Tionghoa? Siapa sajakah anggota PMT itu? Hal-hal ini masih menjadi pertanyaan yang tidak dijelaskan jawabannya oleh artikel.

Maka terkesan bahwa artikel ini menggunakan suara dari satu orang tokoh Tionghoa untuk mewakili suara semua orang Tionghoa. Nama organisasi Paguyuban Masyarakat Tionghoa juga dikesankan merupakan representasi dari seluruh masyarakat Tionghoa. Dengan demikian pernyataan sikap dari paguyuban ini melalui ketuanya, pada artikel ini ditempatkan sebagai pernyataan sikap seluruh masyarakat Tionghoa.

2. Praktik Wacana

Artikel ini merupakan salah satu dari rangkaian interteks artikel mengenai kasus penganiayaan oleh keluarga Tan Fang May. Oleh karenanya, ia berhubungan dengan teks-teks sebelum dan sesudahnya. Kali ini wacana yang diangkat adalah pemeriksaan Tan Fang May di kantor polisi, yang dipersulit oleh tingkahnya yang berpura-pura histeris. Selain wacana ini, juga ada wacana tentang simpati kepada Marlina, pembantu rumah tangga yang menjadi korban.

Wacana tentang ‘sandiwara’ yang dilakukan Tan Fang May ketika diperiksa merupakan topik utama artikel ini. Penggunaan transitivitas dengan penyebutan partisipan ‘Tan Fang May’ yang berulang-ulang, menunjukkan fokus artikel ini kepada pelaku. Ini memberikan semacam kesan yang cukup dalam bagi pembaca, sehingga kemungkinan nama ‘Tan Fang May’ akan cepat diingat pembaca.

Wacana simpati kepada korban, yang berasal dari ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, terlihat sebagai sebuah bentuk perbenturan wacana. Tindakan kejahatan

yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, mendapat perlawanan wacana pernyataan sikap orang Tionghoa yang bersimpati dan berpihak pada sisi korban, dan tidak memihak pelaku, bahkan mengutuk kejahatan yang dilakukan orang Tionghoa ini. Suara simpati kepada korban ini melalui analisis teks di atas terlihat ditempatkan sebagai suara semua masyarakat Tionghoa. Namun terkesan bahwa wacana ini tidak terlalu dominan, karena baik dari judul artikel yang tidak menyebutkan hal ini, maupun tidak adanya foto pendukung, memperlihatkan bahwa wacana ini hanya sebagai wacana sampingan saja.

Selain kedua wacana di atas, pemuatan artikel ini sebagai salah satu mata rantai ‘serial’ artikel tentang kriminalitas ini, seperti kasus-kasus kriminalitas pada umumnya, juga mempunyai ‘nilai jual’ tersendiri. Sehingga *Jawa Pos* pun memuatnya dengan porsi cukup besar dan pemberitaannya terus-menerus selama beberapa hari. Namun di sini *Jawa Pos* juga sudah memberikan wacana tandingan yang cukup berimbang, yakni pernyataan sikap etnis Tionghoa yang mengutuk pelaku. Dengan demikian dalam hal ini, unsur komersialitas tidak melulu menjadi pertimbangan utama dalam penyajian wacana.

3. Praktik Sosial

Kasus penganiayaan pembantu rumah tangga ini berbeda sifatnya dengan kasus pembunuhan pada bagian 4.2.5.1 di atas. Kasus pembunuhan di atas korbannya adalah etnis Tionghoa, dan otak pelaku pembunuhan juga diduga etnis Tionghoa. Sedangkan kasus penganiayaan ini korbannya adalah pribumi, dengan pelaku kejahatan adalah orang Tionghoa, bersama dengan anggota keluarganya. Dilihat dari berat dan kejinya penganiayaan yang dilakukan, memang pantas bila identitas pelaku ini diekspos secara nyata. Oleh karenanya *Jawa Pos* pun tidak segan mengungkapkan nama pelaku dengan gamblang, meskipun ia tidak menyebutkan secara eksplisit dari etnis manakah si pelaku. Karena korban adalah pribumi, maka kasus ini terkesan rawan memicu konflik antar etnis. Sehingga, artikel ini memunculkan wacana ‘tandingan’ untuk menutupi kemungkinan munculnya wacana

pemicu konflik, yakni ditampilkannya simpati kepada korban dari pihak etnis Tionghoa, serta pernyataan sikap mereka yang mengutuk tindakan pelaku.

Maka sebenarnya selain wacana kriminalitas secara umum, sebagai sebuah pemberitaan ‘berseri’ yang dimuat besar-besaran untuk ‘menjual’ kasus ini kepada pembaca, di sini juga muncul wacana tentang menjaga keharmonisan antar etnis. Walau ini bukan menjadi wacana utama, tetapi paling tidak diharapkan bisa menekan kemungkinan timbulnya konflik. Sementara itu, meskipun kejahatan yang dilakukan pelaku sangat berat, artikel ini tidak membuat pernyataan atau konstruksi stereotipikal yang menyudutkan etnis Tionghoa, tetapi menyudutkan pelaku dengan pernyataan-pernyataan umum seperti ‘biadab’, ‘bengis’ dan sebagainya.

4.2.5.4 Sishuǐ huáyì liányì huì Lǐ Wǔyuán yánlì qiǎnzé nüèdài jiā yōng shìjiàn: Hūyù Yīnní huárén bǎochí jiǎnpǔ shēnghuó zuòfēng, duō wèi shèhuì fúli cishàn shìyè zuò gòngxiàn (泗水华裔联谊会林武源严厉谴责虐待家佣事件 呼吁印尼华人保持简朴生活作风 多为社会福利慈善事业做贡献, Lin Wuyuan dari Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya Mengutuk dengan Tegas Penyiksaan Pembantu Rumah Tangga: Menghimbau Etnis Tionghoa Indonesia Mempertahankan Gaya Hidup Sederhana, Banyak Memberikan Sumbangsih bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Kegiatan Amal). 26 Mei 2011, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Artikel ini berisikan berita kunjungan perwakilan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya ke korban penganiayaan oleh Tan Fang May sekeluarga. Berbeda dengan artikel di *Jawa Pos* di atas, yang lebih fokus kepada perkembangan penyidikan terhadap pelaku, artikel ini tidak memuat perkembangan kasus itu sendiri, tetapi hanya menekankan porsi tentang kunjungan, pernyataan sikap dan himbauan oleh ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, Lin Wuyuan (penulisan dengan *pinyin* dari Liem Oe Yen). Isi dari artikel ini sudah terangkum dengan cukup jelas melalui judulnya, yang ditulis panjang dengan transitivitas yang cukup lengkap.

Latar belakang pernyataan Lin Wuyuan, yaitu kasus penganiayaan pembantu rumah tangga, hanya ditulis secara singkat di *lead* berita. Dan penekanannya adalah lebih pada efek dari peristiwa ini, yakni menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, serta dieksposnya kasus ini secara besar-besaran oleh berbagai media. Seperti ditulis di bagian awal artikel

Tanggal 22 Mei, di Surabaya Barat terjadi peristiwa penganiayaan pembantu rumah tangga oleh majikannya. Peristiwa ini menimbulkan pembicaraan di kalangan masyarakat setempat dan media berlomba-lomba memberitakannya. (5 yuè 22 rì, Sishuǐ shì xīqū fāshēng le yī zōng gùzhǔ nièdài jiā yōng de shìjiàn, yīnqǐ dāngdì jūmín de yìlùn hé méitǐ jìngxiāng bàodào.)

Dengan demikian kembali terlihat bahwa fokus utama *Harian Nusantara* adalah bukan memberitakan kasus-kasus kriminal semacam ini, karena pembaca bisa mengikutinya dengan lebih *up to date* melalui media-media arus utama yang lain. Tetapi *Harian Nusantara* di sini lebih menyampaikan sudut pandang etnis Tionghoa terhadap kasus ini.

Berita atau hal yang hendak disampaikan oleh artikel ini ditulis pada kalimat berikutnya, dengan transitivitas yang lengkap, dan mencakup isi seluruh artikel.

Tanggal 25 Mei, Ketua Koordinator Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya Lin Wuyuan menyampaikan pandangannya atas kasus ini. Ia menyatakan tegas mengutuk kejahatan ini, menghimbau etnis Tionghoa Indonesia untuk selalu waspada, mempertahankan gaya hidup sederhana, banyak bersedek untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat. (5 Yuè 25 rì, Sishuǐ huáyì liányì huì tóngchóu zhūrén Lí Wūyuán jiù zhè yī shìjiàn fābiào le zìjǐ de kǎnfǎ, bìng duì cǐ cì shìjiàn biǎoshì yánlǐ qiǎnzé, tā hūyù Yīnní huárén yào jū'ānsīwēi, bǎochí jiǎnpù de shēnghuó zuòfēng, duō wèi shèhuì fúlì shìyè zuò gòngxiàn.)

Dari awal artikel, sudah terlihat jelas sudut pandang yang diambil oleh artikel ini. Ia tidak hendak memberitakan perkembangan kasus, tetapi lebih menyatakan sikap etnis Tionghoa terhadap peristiwa kejahatan ini. Kejahatan yang melibatkan etnis Tionghoa sebagai pelaku dan etnis pribumi sebagai korban, merupakan hal yang dipandang rawan memicu konflik antar etnis, sehingga *Harian Nusantara* sebagai surat kabar etnis, memandang perlu mengambil sikap terhadap hal ini, membentuk wacana tandingan, melalui pernyataan langsung ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya. Istilah ‘waspada’ (*jū'ānsīwēi*)

merupakan sebuah idiom Tionghoa, yang arti literalnya adalah ‘memikirkan bahaya di saat hidup aman’. Meletusnya berbagai peristiwa kekerasan anti Tionghoa di masa lalu, merupakan penyebab utama yang membuat etnis Tionghoa di Indonesia perlu senantiasa menjaga kewaspadaan. Perwujudan kewaspadaan ini ditunjukkan oleh kata-kata ‘mempertahankan gaya hidup sederhana’, serta ‘banyak bersumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat’.

Maka dari transitivitas di bagian awal artikel ini saja, sudah terlihat perbedaannya dengan *Jawa Pos*. Di *Jawa Pos*, dikesankan bahwa Lin Wuyuan mewakili sikap seluruh masyarakat Tionghoa, sedangkan di *Harian Nusantara*, Lin Wuyuan menghimbau seluruh masyarakat Tionghoa. Jadi jelas bahwa Lin Wuyuan di sini tidak ditempatkan sebagai representasi dari seluruh masyarakat Tionghoa, karena ia sebagai subjek, menghimbau masyarakat Tionghoa (masyarakat yang lain, atau paling tidak yang tidak tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Tionghoa, sebagai objek) untuk melakukan sesuatu. Pola transitif subjek A menghimbau B, menunjukkan bahwa A bukanlah B. Jadi meskipun artikel ini juga tidak menjelaskan siapa saja yang tergabung dalam PMT, tetapi hal ini tidak menjadi pertanyaan, karena di sini Lin Wuyuan tidak diposisikan sebagai wakil dari semua masyarakat Tionghoa.

Kemudian masih dari segi transitivitas, subjek yang menemui Kasatreskrim Anom Wibowo di sini ditulis ada tiga orang. Mereka adalah perwakilan dari PMT. Nama mereka masing-masing ditulis dengan lengkap. Ini juga salah satu perbedaan yang nampak dengan *Jawa Pos*, karena di *Jawa Pos* hanya ditulis ‘pihaknya’, tidak dirinci nama masing-masing orang yang menemui polisi. Tujuan mereka menemui polisi juga ditulis dengan lengkap, yaitu untuk mendapatkan penjelasan lengkap mengenai kasus ini. Dari pertemuan dengan polisi, mereka kemudian mengunjungi korban penganiayaan. Setelah dua paragraf pertama ini, sisa isi artikel adalah himbauan dari Lin Wuyuan selaku ketua PMT.

Perbedaan yang cukup mencolok dengan *Jawa Pos* dari segi penyebutan subjek adalah, di artikel ini sama sekali tidak ditemui penyebutan nama ‘Tan Fang May’. Hanya disebutkan ‘empat orang tersangka saat ini sedang ditahan polisi’. Maka terlihat bahwa artikel ini memang hanya ingin fokus kepada pesan yang disampaikan oleh Lin Wuyuan.

Presuposisi terlihat pada bagian penjabaran kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PMT untuk menjaga keharmonisan antar etnis.

Melalui usaha keras, etnis Tionghoa telah terintegrasi ke masyarakat Indonesia, menjadi warga negara Indonesia yang sebenarnya, dan adalah bagian dari multikultural Indonesia. (*Jīngguò bùduàn de nǚlì, huá zú yǐjīng róng rù le Yìnní shèhuì, chéngwéi le zhēnzhèng de Yìnní gōngmín, shì Yìnní duōyuán wénhuà zhōng de yībùfèn.*)

Dipresuposisikan bahwa etnis Tionghoa telah terintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia. Kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia saat ini memang sudah jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru, namun masih perlu dipertanyakan apakah memang *semua* orang Tionghoa telah terintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia. Kemudian dipresuposisikan juga bahwa Indonesia itu multikultural. Makna multikultural di sini sebenarnya juga perlu dipertanyakan lebih lanjut, karena paham multikultural yang seperti apakah yang diterapkan di Indonesia, masih belum jelas. Bahkan belum jelas juga apakah Indonesia memang menerapkan multikulturalisme. Dua presuposisi ini telah menunjukkan bahwa aspirasi etnis Tionghoa adalah menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dengan cara integrasi, dan dalam lingkup multikulturalisme.

2. Praktik Wacana

Dari judul artikel, sudah jelas bahwa wacana utama artikel ini adalah pernyataan sikap dan himbauan dari ketua PMT, Lin Wuyuan. Berbeda dengan *Jawa Pos*, yang memosisikan Lin Wuyuan sebagai representasi seluruh masyarakat Tionghoa, *Harian Nusantara* memosisikan Lin Wuyuan sebagai ketua sebuah organisasi, yang menghimbau kepada etnis Tionghoa yang lain. Bila ditarik lebih jauh, wacana yang lebih besar sebenarnya

adalah himbauan ini juga merupakan himbauan oleh *Harian Nusantara*. Maka lebih tepat bila dikatakan Lin Wuyuan dalam hal ini ‘dipinjam’ sebagai representasi suara dari surat kabar.

Dan dari artikel ini kita juga bisa melihat adanya wacana tersembunyi, yakni PMT bukan representasi dari seluruh masyarakat Tionghoa. Dengan kata lain, masyarakat Tionghoa Indonesia tidaklah seragam. Dari sudut ini, terlihat perbedaannya dengan *Jawa Pos* yang mewakili sudut pandang arus utama, yang mayoritas bukan Tionghoa. Dari sudut pandang luar kelompok etnis Tionghoa, etnis Tionghoa terlihat sebagai sebuah kelompok homogen, padahal tidak demikian. Sudut pandang etnis Tionghoa sendiri, melalui *Harian Nusantara* di sini, secara implisit menyatakan hal itu. PMT hanyalah sebuah organisasi Tionghoa, yang pasti memiliki perbedaan visi, perbedaan ideologi dengan organisasi-organisasi Tionghoa lainnya di Indonesia ini. Wacana tidak homogenya orang Tionghoa di Indonesia terkesan dari sini.

Dari isi himbauan Lin Wuyuan sendiri, berisikan beberapa wacana. Wacana pertama adalah pernyataan sikap mengutuk tegas perilaku kejahatan ini. Kemudian adalah wacana untuk tetap waspada, meski kondisi sekarang terlihat aman dan nyaman bagi etnis Tionghoa. Setelah itu adalah penjabaran bagaimana perwujudan waspada ini, yaitu mempertahankan gaya hidup sederhana, menjaga hubungan baik dengan pembantu rumah tangga, berusaha tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Di bagian akhir, juga disebutkan wacana tentang berbagai apa saja yang sudah dilakukan PMT terkait dengan usaha menjaga kerukunan antar etnis. Bagi elemen masyarakat yang lain, juga ada himbauan untuk tidak mengeneralisir kasus ini dengan bersikap anti-Tionghoa. Di paragraf terakhir, wacana untuk hidup sederhana, dan berperan aktif dalam kegiatan amal, kembali dimunculkan. Jadi cukup padat wacana yang dimasukkan dalam pernyataan dan himbauan Lin Wuyuan ini. Namun secara keseluruhan, sebenarnya intinya adalah etnis Tionghoa harus senantiasa waspada, menjaga

perilaku dan gaya hidup, serta ikut aktif dalam berbagai kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari segi intertekstualitas, teks ini sebenarnya juga termasuk salah satu teks dari rangkaian teks tentang kasus ini di *Harian Nusantara*. Walau pemberitaan kasus ini tidak sebanyak *Jawa Pos*, namun paling tidak selain artikel ini masih ada artikel lain berupa tulisan pembaca, yang juga berisikan himbauan untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan etnis pribumi. Sedangkan dalam isi artikel ini sendiri, kutipan perkataan hampir seluruhnya dari Lin Wuyuan, dan semuanya menggunakan kutipan tak langsung. Ada diselipkan satu kutipan perkataan Anom Wibowo, yang menjelaskan sekilas bahwa kasus ini sedang dalam penyidikan lebih lanjut. Apabila dibandingkan dengan *Jawa Pos*, ada beberapa kutipan langsung di *Jawa Pos* yang tidak ditemui di *Harian Nusantara*, yakni perkataan Lin Wuyuan bahwa ‘masyarakat Tionghoa tidak akan membela’, serta ‘ini bukan zaman perbudakan’. Dengan demikian entah *Jawa Pos* atau *Harian Nusantara*, telah melakukan rekontekstualisasi perkataan Lin Wuyuan. Di *Jawa Pos* perkataan Lin Wuyuan lebih dikontekstualkan dengan penekanan pada sikap etnis Tionghoa yang mengutuk pelaku, dan berpihak pada korban. Sedangkan di *Harian Nusantara*, walau juga dikatakan Lin Wuyuan mengutuk pelaku, namun penekanan lebih pada himbauan kepada seluruh masyarakat Tionghoa secara umum untuk menjaga perilaku, dan tidak ada kesan ‘pihak memihak’ atau ‘bela membela’.

3. Praktik Sosial

Harian Nusantara tampak tidak terlalu berfokus pada perkembangan kasus kriminalitas ini. Mungkin pertimbangannya seperti pada bagian 4.2.5.2 di atas, bahwa pembaca yang tertarik dengan perkembangan kasus ini bisa membaca berita terkininya di surat kabar arus utama. Agenda *Harian Nusantara* adalah lebih pada menyuarakan pandangan etnis Tionghoa sendiri terhadap kasus semacam ini. Potensi konflik sosial yang

ditimbulkan kasus ini karena menyangkut hubungan Tionghoa dan pribumi, menjadi perhatian yang lebih penting. *Harian Nusantara* berupaya meredam dan menjaga hubungan Tionghoa dan pribumi, dengan menghimbau warga Tionghoa untuk terus waspada dalam berperilaku, khususnya dalam hubungan antar etnis. Meski di *Jawa Pos* juga terlihat ada upaya peredaman kemungkinan konflik tersebut, namun di *Harian Nusantara* jelas terkesan lebih ditekankan, terutama terlihat dari isi artikel ini yang hampir seluruhnya berisi himbauan tersebut, serta ditemukan pula artikel lain tulisan pembaca, yang bertema senada, pada edisi 25 Mei 2011, yang juga diletakkan di halaman pertama.

Konteks artikel ini juga mengenai citra positif etnis Tionghoa, tetapi dalam kaitannya dengan hubungan yang harmonis dengan etnis yang lain. Konflik antar etnis menjadi hal yang sangat tidak diinginkan untuk terjadi, karena masih adanya trauma atas kerusuhan-kerusuhan anti Tionghoa di masa lalu. Konteks kerukunan dan persatuan antar etnis ini menjadi konteks sosial yang mendasari penulisan artikel tentang pernyataan sikap dan himbauan PMT ini.

4.2.6 Pemberitaan Komunitas atau Organisasi Tionghoa

Untuk perbandingan topik tentang komunitas atau organisasi Tionghoa, pada terbitan 2003, digunakan pemberitaan tentang reuni sekolah Lian He (di *Jawa Pos* ditulis Lian Huo), salah satu sekolah Tionghoa yang ditutup menjelang Orde Baru. Sedangkan pada terbitan masa kini, tesis ini menggunakan topik tentang acara dari organisasi alumni CHHS (Chung Hua High School, sekolah Tionghoa yang aktif sebelum Orde Baru, dan ditutup saat Orde Baru berkuasa). Artikel di *Jawa Pos* ditempatkan di bagian Life! Begin at 50, yang memberikan penekanan bahwa anggota komunitas ini kebanyakan berusia di atas 50 tahun. Artikel ini dimuat tanggal 7 April 2014. Sedangkan pemberitaan acara yang sama (acara tersebut sebenarnya adalah peringatan hari raya Imlek) di *Harian Nusantara* dimuat pada tanggal 14 Februari 2014. Dengan demikian sudah nampak perbedaan tanggal pemuatan, di

mana *Harian Nusantara* menjadikan acara ini sebagai berita hangat yang dilaporkan segera, sedangkan *Jawa Pos* menjadikannya sebagai artikel tentang komunitas usia di atas 50 tahun, sehingga tidak terlalu mementingkan kapan acara itu berlangsung.

4.2.6.1 Setelah Berpisah 45 Tahun, Alumni Lian Huo School Bereuni: Ada Ahli Bedah, Pengusaha, hingga Koreografer. 17 Februari 2003, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Foto yang dipasang bersama artikel ini menggambarkan suasana reuni. Keterangan foto ditulis: “REUNI: Suasana Mandarin amat kental mewarnai reuni Lian Huo High School Surabaya kemarin.” Menariknya, dalam foto itu sebenarnya tidak terlalu terlihat suasana “Mandarin” yang amat kental. Penanda yang berhubungan dengan suasana Mandarin hanyalah tulisan Mandarin di spanduk merah yang dipasang di tempat reuni dan satu orang yang mengenakan baju *qipao*. Selebihnya, adalah orang-orang yang hadir dalam acara itu, yang memang merupakan etnis Tionghoa. Mereka pun tidak memakai simbol-simbol “Mandarin”, karena mereka terlihat banyak yang mengenakan jas ala Barat. Hanya terlihat satu orang (kemungkinan pembawa acara) yang mengenakan *qipao* (baju khas Tionghoa). Maka bisa kita ketahui di sini, bahwa dari sedikit penanda ketionghoan yang terlihat, sudah bisa menimbulkan kesan kentalnya nuansa Mandarin di acara itu. Paling tidak dari sudut pandang arus utama, sedikit saja penanda ketionghoan yang muncul (yang dianggap esensial, tentunya) akan membawa orientasi arus utama kepada ketionghoan esensial yang kental. Dengan demikian dari kaca mata arus utama, ketionghoan masih dinilai secara esensial, dengan memperhatikan simbol-simbol ketionghoan yang dianggap esensial pula, seperti tulisan Tionghoa serta baju tradisional Tionghoa.

Narasi secara keseluruhan lebih banyak bercerita tentang para tokoh alumni yang hadir pada acara itu, meliputi para mantan guru, dan di akhir artikel ditambahkan kisah

sekolah Lian Huo di masa lalu, serta proses mereka mengumpulkan kembali data-data para alumni sehingga reuni ini bisa berjalan.

Presuposisi nampak pada pernyataan bahwa sekolah Lian Huo ini ditutup oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1958.

Tapi, sekolah itu hanya bertahan 12 tahun karena kemudian ditutup pemerintah Soekarno pada 1958.

Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang terjadi pada tahun 1958 sehingga mengakibatkan sekolah ini ditutup oleh pemerintah.

Presuposisi yang lain terlihat di bagian ini.

Sedemikian hebatnya, sampai pemerintah memberi pengakuan pada Lian Huo dengan memberi kesempatan kepada para siswa di sekolah ini menjadi mahasiswa pendengar di ITB. “Selanjutnya, bila mereka lulus ujian langsung diterima sebagai mahasiswa ITB,” urai pria yang masih buka praktik ini.

Dipresuposisikan bahwa ITB merupakan universitas terkemuka di Indonesia, sehingga para siswa sekolah Lian Huo yang bisa menjadi mahasiswa pendengar di ITB, menunjukkan bahwa sekolah Lian Huo adalah sekolah yang bermutu. Presuposisi di sini terletak pada “mahasiswa pendengar”, yang tidak terlalu jelas apa maksudnya. Lalu dipresuposisikan pula ada ujian tertentu, yang juga tidak dijelaskan ujian apa, yang menentukan siswa diterima sebagai mahasiswa ITB atau tidak.

Konjungsi antar kalimat terasa kontradiktif pada bagian berikut ini.

Para alumnus Lian Huo, lanjut mantan direktur RS Adi Usada ini, tersebar di seluruh Indonesia. Jumlahnya lebih 2 ribu orang. Tidak sedikit di antara mereka saat ini sudah menetap di luar negeri, seperti di Hongkong, Taiwan, Amerika, maupun Shanghai, China.

Di bagian awal disebutkan bahwa para alumni Lian Huo tersebar di seluruh Indonesia. Namun di bagian berikutnya dikatakan bahwa tidak sedikit dari para alumni yang menetap di luar negeri. Terkesan ada sedikit kontradiksi mengenai tempat tinggal para alumni.

Sebenarnya berapa banyak yang menetap di luar negeri, dan berapa banyak yang tinggal di Indonesia, tidak dijelaskan lebih lanjut.

Yang menarik adalah pada edisi tahun 2003 ini, *Jawa Pos* sudah menggunakan istilah ‘Tionghoa’ untuk menyebut etnis Tionghoa. Ini terlihat pada

Sekolah untuk warga Tionghoa itu dulu beralamat di sudut Jalan Undaan Wetan

“Sekolah untuk warga Tionghoa” di sini sekaligus juga berupa presuposisi bahwa di era itu ada sekolah khusus untuk etnis Tionghoa.

2. Praktik Wacana

Secara keseluruhan, artikel ini terasa bergaya non-formal, dengan menggambarkan suasana reuni seperti pada umumnya, ditambah dengan wawancara dengan beberapa alumni sekolah Lian Huo. Keakraban, semangat saling membantu antar alumni, menjadi warna utama dalam artikel ini. Wacana ini juga meliputi suasana haru yang timbul saat para mantan guru sekolah turut diundang dan mendapatkan penghargaan khusus. Selain wacana suasana reuni, artikel ini juga menambahkan wacana tentang sejarah sekolah Lian Huo ketika masih aktif. Namun wacana ini tidak menceritakan mengapa sekolah ini ditutup pada tahun 1958.

Intertekstualitas terwujud melalui kutipan langsung maupun tak langsung atas perkataan para tokoh alumni yang hadir. Kutipan-kutipan ini terasa sangat dominan di seluruh artikel, sebagian besar artikel berisikan kutipan semacam ini. Rekontekstualisasi perkataan mereka tidak dapat diketahui dengan jelas, walau beberapa pernyataan singkat mungkin dapat ditengarai mengandung penyingkatan, yang dengan demikian menyatakan adanya rekonstekstualisasi. Misalnya pada

Dengan keahliannya, Prof Satyanegara menawarkan diri kepada para alumnus Lian Huo yang membutuhkan bantuannya untuk mengontaknya. “Saya akan bantu gratis,” tuturnya disambut tepuk tangan riuh para alumnus.

Kalimat “Saya akan bantu gratis” di sini terkesan disingkat. Sebab kita harus melihat konteks di depan untuk mengetahui maksud “bantu gratis”. Namun demikian itu pun belum cukup untuk bisa mengetahui dengan jelas bantuan seperti apa yang akan diberikan. Pembaca hanya dapat mengira-ngira melalui konteks di depannya, bahwa bantuan tersebut berhubungan dengan bedah syaraf, atau konsultasi kesehatan. Beberapa perkataan alumni yang lain yang juga terkesan disingkat adalah

“Saya termasuk angkatan ketiga belas,” jelas Marlupi.

“Saya dulu guru senam,” ungkapnya dalam bahasa Mandarin.

“Saya sangat terharu,” papar bapak tiga anak dan dua cucu ini.

Walaupun dari semua kutipan di atas ini, telah diberikan konteks yang cukup membuat pembaca mengerti maksud kutipan pendek tersebut.

3. Praktik Sosial

Artikel ini memosisikan sebuah komunitas etnis Tionghoa sebagaimana sebuah komunitas masyarakat pada umumnya, khususnya dalam hal ini sebagai sebuah perkumpulan alumni. Reuni yang diadakan di sini diliput sebagai sebuah acara silaturahmi, acara temu kangen, dan merupakan sarana untuk terus menjalin komunikasi antar alumni. Ini merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan oleh komunitas di masyarakat. Dengan demikian, melalui artikel ini, tampak bahwa dari segi komunitas, etnis Tionghoa tidak diberikan perbedaan atau perlakuan khusus. Penuturan yang digunakan dalam artikel ini juga tidak menunjukkan hal yang begitu istimewa dari komunitas Tionghoa. Namun yang belum ditunjukkan oleh artikel ini, khususnya dalam hal komunitas alumni sekolah Tionghoa, adalah sejarah bagaimana sekolah-sekolah Tionghoa itu sampai ditutup. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi pembaca, terutama mereka yang berusia muda.

Maka konteks dari artikel ini adalah beragamnya komunitas dalam masyarakat, termasuk pula komunitas alumni sekolah Tionghoa ini. Komunitas Tionghoa di sini tidak dipandang sebagai suatu komunitas yang khusus, tetapi disejajarkan dengan komunitas di masyarakat lainnya. Secara sosial, hal ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa sudah diakui sebagai salah satu elemen bangsa tanpa dibedakan dengan anggota masyarakat yang lain. Namun di sisi lain, komunitas Tionghoa juga tidak mendapatkan ‘eksplorasi’ lebih lanjut, khususnya pada komunitas alumni ini terkait dengan sejarahnya. Aspek historis seperti ini walau juga ada dalam artikel, tetapi tidak cukup dikupas dengan mendalam.

4.2.6.2 *Sishuǐ liánhé zhōngxué xiàoyǒu huì chénglǐ: Xuǎn chū dì yī jiè lǐ jiānshì rényuán* (泗水联合中学校友会成立 选出第一届理监事人员, Perhimpunan Alumni Sekolah Lianhe Surabaya Berdiri: Telah Terpilih Badan Pengurus Periode Pertama). 17 Februari 2003, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Dari judul, kita bisa langsung melihat perbedaan penekanan pada artikel di *Harian Nusantara* dengan *Jawa Pos*. Dari liputan acara yang sama, *Harian Nusantara* terlihat lebih menekankan pada berdirinya perhimpunan alumni sekolah Lianhe (penulisan menggunakan *pinyin* yang benar adalah Lianhe), serta terbentuknya pengurus perhimpunan ini untuk periode pertama. Penekanan acara ini bukan pada reuni atau sekedar temu kangen, walau suasana reuni itu memang ditulis juga, namun penekanan adalah pada acara utama yakni pemilihan pengurus perhimpunan alumni.

Dari segi transitivitas, ada perbedaan penulisan waktu acara. Di *Jawa Pos* ditulis siang hari, sedangkan di *Harian Nusantara* ditulis dengan lengkap, yakni dimulai dengan registrasi pada hari Minggu tanggal 16 Februari jam 8.30 pagi. Untuk tiap-tiap prosesi acara, penulisan waktu juga ditulis lengkap, misalnya jam 10.00 acara dimulai, jam 11.00 pendeklarasian berdirinya perhimpunan alumni. Narasi kemudian dibuka dengan deskripsi suasana registrasi para hadirin, yakni mencari angkatan kelulusan yang sesuai dengan cara

melihat nama-nama yang tercantum di dinding, untuk mengingatkan para alumni apakah mereka pernah sekelas dengan nama-nama tersebut. Lalu narasi dilanjutkan dengan penggambaran suasana akrab, temu kangen antar alumni. Deskripsi ini pendek, hanya satu paragraf saja. Setelah itu, narasi menceritakan acara utama, yaitu pembentukan perhimpunan alumni serta pemilihan pengurus. Narasi tentang para mantan guru yang mendapatkan penghargaan khusus tidak tampak dalam isi teks artikel, namun ditunjukkan lewat foto, dan itu pun tidak dituliskan kalau mereka mendapatkan *angpao*, hanya ditulis ‘para guru berfoto bersama’.

Penulisan jabatan tokoh alumni di *Harian Nusantara* sedikit berbeda dengan *Jawa Pos*. Dr Wicaksono Suryohusodo MD di *Jawa Pos* ditulis sebagai Ketua Panitia Pelaksana Reuni, sedangkan di *Harian Nusantara* ditulis sebagai Ketua Panitia Pelaksana Sementara. Di sini tidak ditulis sebagai panitia pelaksana reuni, tetapi bila dilihat dari konteksnya, terasa lebih mengarah ke panitia pelaksana sementara perhimpunan alumni. Ini ditunjukkan dari digunakannya istilah *Sìshuǐ Lián zhōng línshí wěiyuánhùi lǐshì*, yang berarti pengurus sementara sekolah Lianhe Surabaya. Jadi ‘panitia pelaksana’ di sini lebih mengarah kepada ‘pengurus harian’ dari cikal bakal perhimpunan alumni.

Presuposisi terlihat pada bagian

.....menjelaskan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari perhimpunan alumni sekolah Lianhe kepada para hadirin. Karena rancangan AD/ART ini harus ditetapkan pada rapat anggota hari ini, maka dokter Zhu menjelaskan isi dari AD/ART ini secara panjang lebar. (*Jièshào gěi bīn kè men Lián zhōng xiàoyǒu huì de zhāngchéng cǎo'àn, yīnwèi zhāngchéng cǎo'àn yào zài jīntiān de huìyuán dàhuì shàng shěnhé tōngguò, suǒyǐ Zhū yīshēng dà piānfú de jiǎngshù yǒuguān zhāngchéng cǎo'àn nèiróng.*)

Dipresuposisikan bahwa rancangan AD/ART perhimpunan ini telah dibuat, namun tidak disebutkan dibuat oleh siapa. Dan direncanakan pula pada pertemuan hari itu AD/ART ini harus ditetapkan. Mengenai ketentuan ini, juga tidak dijelaskan mengapa harus demikian. Dalam penetapannya, tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana AD/ART itu ditetapkan, sekali

lagi ini dituliskan dalam bentuk presuposisi bahwa AD/ART telah berhasil disetujui dan ditetapkan.

Berikutnya, guru Su Zhencheng memimpin verifikasi dan penetapan AD/ART. AD/ART disetujui, maka perhimpunan alumni sekolah Lianhe Surabaya resmi berdiri. (*Jiē xiàlái shì Sū Zhènchéng lǎoshī shuàilǐng shěnhé bìng tōngguò zhāngchéng, zhāngchéng tōngguòle, Sishuǐ Liánhé zhōngxué xiàoyǒu huì yě yīn'ér chǎnshēng.*)

Deskripsi sambutan para alumni begitu perhimpunan alumni ini dinyatakan resmi berdiri, digambarkan sangat meriah. Penggunaan kata-kata seperti: “tepuk tangan membahana”, “para alumni yang berpisah selama 40 tahun lebih bersatu kembali”, “para alumni larut dalam kegembiraan”, melukiskan betapa pentingnya momen berdirinya perhimpunan alumni ini. Ini berbeda dengan nada di *Jawa Pos*, yang lebih menekankan pada kesulitan yang dihadapi para penggagas reuni di dalam mengontak para alumni yang tersebar.

2. Praktik Wacana

Dari gaya penulisan yang digunakan di artikel ini, terkesan liputannya bersifat lebih formal, dan lebih ke arah *hard news*. Wacana yang diangkat juga lebih serius dari *Jawa Pos*, yakni pembentukan perhimpunan alumni sekolah Lianhe, sekaligus pemilihan pengurus periode pertama. Penulisan jam yang detil dan seturut dengan perkembangan acara, turut memberi kesan artikel ini sebagai sebuah laporan resmi. Urutan acara peresmian perhimpunan alumni ini ditulis dengan cukup detil, mulai dari penetapan AD/ART organisasi, hingga hasil perhitungan suara pemilihan anggota pengurus.

Intertekstualitas muncul melalui kutipan langsung dan tak langsung dari para tokoh alumni. Menarik bahwa di sini ada satu kutipan langsung, yang biasanya jarang digunakan dalam artikel surat kabar Tionghoa. Kutipan langsung ini adalah perkataan dari Zhou Yongchang sebagai perwakilan alumni, yang karena begitu terharunya atas berdirinya perhimpunan alumni ini, berteriak, “Perhimpunan alumni sekolah Lianhe telah berdiri!” Di

sini sekali terlihat jelas bahwa penekanan wacana pendirian perhimpunan alumni sebagai sebuah hal yang sangat penting, hingga dipertegas dengan penggunaan kutipan langsung.

Selain itu, dari segi intertekstualitas, artikel ini merupakan artikel lanjutan dari artikel tanggal 9 Januari 2003 tentang pengumuman pembentukan perhimpunan alumni sekolah Lianhe, dan 8 Februari 2003 di *Harian Nusantara* dengan judul ‘Rapat Umum Alumni Sekolah Lianhe Diadakan Tanggal 16: Tanggal 4 Diadakan Konferensi Pers Pra Rapat’. Teks pada tanggal 8 Februari ini menceritakan konferensi pers sebelum diadakannya pertemuan peresmian perhimpunan alumni. Dalam konferensi pers ini diundang pula wartawan dari *Jawa Pos*. Bila kita melihat isi dari artikel ini, di dalamnya ada beberapa poin yang oleh *Jawa Pos* dimasukkan dalam artikel liputan reuni, seperti wacana tentang para alumni Lianhe yang berhasil, dan kerinduan untuk membentuk perhimpunan alumni. Maka bila kita bandingkan, artikel di *Jawa Pos* lebih merupakan perpaduan dari artikel tentang konferensi pers ini dengan artikel liputan reuni itu sendiri. *Jawa Pos* tidak memberitakan secara khusus acara konferensi pers ini. Dan lebih jauh, intertekstualitas di *Harian Nusantara* menunjukkan pentingnya pembentukan komunitas ini, sebab organisasi Tionghoa memang merupakan salah satu pilar budaya Tionghoa (Suryadinata 2010).

3. Praktik Sosial

Meskipun tidak dituliskan sejarah mengapa sekolah Lianhe ini ditutup pada tahun 1950-an, namun secara implisit melalui penggambaran suasana haru dan gembira menyambut pendeklarasian berdirinya perhimpunan alumni, pembaca dibawa untuk ikut menyadari betapa pentingnya momen ini. Momen berdirinya perhimpunan ini seakan menandakan ‘kembalinya’ para alumni yang tersebar di berbagai penjuru ke pangkuan almamater mereka. Di sini kita melihat komunitas alumni sekolah Tionghoa merupakan wadah atau organisasi yang dipandang sangat penting oleh etnis Tionghoa, dalam hal ini

terutama mereka yang dulunya pernah bersekolah di sekolah Tionghoa. Adanya organisasi seperti ini dianggap mempunyai nilai lebih daripada sekedar berkumpul untuk reuni.

Maka dalam konteks inilah artikel ini menjadi berbeda dengan artikel di *Jawa Pos*. Komunitas alumni memiliki aspek formal, dan bermakna penting bagi para alumninya. Nilai penting dari organisasi Tionghoa di sini ditunjukkan karena organisasi Tionghoa di masa kini yang mulai terbentuk kembali, mempunyai cerita sejarah masa lalu dimana saat Orde Baru organisasi-organisasi semacam ini tidak diperbolehkan hidup. Sehingga apabila kita tarik ke konteks yang lebih besar lagi, sebenarnya berita pendirian organisasi seperti ini masih berkaitan dengan euforia terlepasnya etnis Tionghoa dari kekangan Orde Baru, dan bersamaan dengan itu, juga konteks anti diskriminasi, perjuangan menyuarkan aspirasi masyarakat Tionghoa yang bisa diwadahi oleh organisasi-organisasi Tionghoa.

4.2.6.3 Kerukunan Alumni CHHS di Surabaya: Rutin Bertemu demi Pelestarian Budaya; Getok Tular, Anggota Tambah Banyak. 7 April 2014, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Liputan mengenai pertemuan alumni sekolah CHHS Surabaya ini terdiri dari dua artikel. Artikel utama lebih menyajikan liputan acara, sedangkan artikel yang lebih kecil, berjudul ‘Getok Tular, Anggota Tambah Banyak’, lebih menyajikan dinamika yayasan ini. *Lead* teks pada artikel utama menceritakan kesibukan dua orang anggota komunitas yang menyapa tamu-tamu yang hadir (mungkin yang dimaksud adalah mereka sebagai penyambut tamu). Selain itu juga sekaligus menceritakan keakraban antar anggota komunitas. Maka sesuai judul artikel, yakni kerukunan alumni, tercermin koherensi antara judul dan *lead* ini. Dan dari keseluruhan narasi juga terlihat bahwa tema kerukunan alumni menjadi tema utama. Ini juga sesuai dengan di mana artikel ini ditempatkan, yakni di bagian Life! Begin At 50.

Dari segi transitivitas, yang menjadi catatan adalah digunakannya konstruksi kalimat pasif pada

Melalui lembaga tersebut, mereka tidak hanya menginginkan hubungan silaturahmi yang langgeng. Tapi, juga melestarikan berbagai macam budaya Tionghoa, seperti bahasa Mandarin dan tari tradisional. "Anak-anak dan cucu diajari bahasa Mandarin dan tari tradisional," imbuh Gunawan.

Kalimat terakhir adalah kalimat pasif tanpa subjek, sehingga tidak diketahui siapa yang mengajari bahasa dan tari tersebut. Untuk pembelajaran bahasa, dari paragraf di bawahnya diketahui, bahwa ada guru yang didatangkan untuk mengajar mereka.

Caranya melalui guru yang sengaja diundang untuk mengajarkan bahasa tersebut.

Namun tidak disebutkan di mana dan dalam bentuk pertemuan seperti apa bahasa Mandarin itu diajarkan. Konstruksi pasif kalimat ini juga tidak menyebutkan subjek, atau siapa yang mengundang guru tersebut. Sedangkan tari tradisional tidak disebutkan siapa yang mengajar.

Presuposisi nampak pada kalimat

Meski sekolah tersebut sudah tiada lagi, mereka tetap bisa berjumpa.

Di sini sekolah CHHS dipresuposisikan sudah tidak ada lagi. Pembaca yang tidak mengetahui sejarah etnis Tionghoa di Surabaya beserta ditutupnya sekolah Tionghoa pada tahun 1965-1966, tentu tidak mengetahui kenapa sekolah ini tidak ada lagi. Dengan presuposisi ini, pembaca dibawa untuk menerima saja bahwa sekolah ini sekarang sudah tidak ada. Tetapi pada artikel kedua, di bagian awal kita menemukan kalimat

SEJAK 1966, Chung Hua High School (CHHS) resmi ditutup. Para alumnus merasa sedih dengan peristiwa itu.

Dari sini pembaca baru mengetahui bahwa CHHS pada tahun 1966 ditutup. Namun kita tetap tidak mengetahui sejarah di balik penutupan sekolah ini. Bahkan penggunaan kata 'resmi' cenderung mengaburkan 'pemaksaan' penutupan sekolah ini oleh pemerintah Orde Baru. Kata-kata 'resmi ditutup' ini mungkin akan terkesan bertolakbelakang dengan reaksi dari para alumnus yang merasa sedih.

Presuposisi juga terlihat pada

Tujuannya tentu saja agar mereka bisa menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti orang tua mereka.

Satu per satu anak-anak berbicara dengan lantang dalam bahasa yang dahulu dipakai saat ayah dan ibunya belajar.

Di sini dianggap bahwa orang tua dari anak-anak dan cucu alumni bisa dan menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain teks ini menganggap para alumni dan anak-anak mereka (orang tua dari cucu mereka) bisa berbahasa Mandarin dan menggunakannya sehari-hari. Padahal dalam kenyataannya belum tentu demikian. Generasi anak-anak mereka (orang tua dari cucu mereka) belum tentu bisa berbahasa Mandarin karena lahir dan besar di masa Orde Baru. Kata “ayah dan ibu” di kalimat kedua di atas sebenarnya mengacu kepada generasi kedua setelah generasi alumni ini, sehingga belum tentu generasi ini dulunya bersekolah Tionghoa, apalagi bersekolah di CHHS yang sudah tutup.

2. Praktik Wacana

Interdiskursivitas pada teks ini terwujud pada gabungan antara gaya penulisan reportase dengan gaya non-formal yang menonjolkan kutipan-kutipan hasil wawancara dengan para tokoh alumni. Sifat teks ini yang memang bukan *hard news*, membuatnya memang lebih sesuai menggunakan gaya penulisan tersebut. Namun reportase santai ini juga diwarnai dengan wacana tentang pelestarian budaya Tionghoa, yang cukup ditekankan dalam teks. Wacana lain yang ditampilkan pada artikel kedua, adalah tentang kegiatan yayasan ini, yakni ‘kegiatan yang bermanfaat’, ‘membantu sesama’, ‘kegiatan sosial’. Namun demikian kegiatan-kegiatan ini tidak dijabarkan lebih lanjut.

Intertekstualitas digunakan pada kutipan langsung dan tak langsung atas perkataan para alumni yang terlibat dalam acara ini. Kutipan langsung yang dipakai semuanya berupa perkataan pendek, yang tidak terlalu menunjukkan penekanan yang berarti, sehingga

terkesan perkataan mereka telah direkontekstualisasi dengan penyingkatan. Beberapa kutipan langsung pada teks adalah sebagai berikut:

"Beliau berdua itu guru kami," ungkap Hengky.

"Tiap tahun kami mengadakan *gathering*, kumpul-kumpul seperti ini," sambung Hengky.

"Anak-anak dan cucu diajari bahasa Mandarin dan tari tradisional," imbuah Gunawan.

"Kami berlatih dengan sungguh-sungguh untuk pentas ini," ungkap Fiyanti Soebyanto, 65, yang menjadi pengajar bahasa Mandarin.

Dan semua kutipan di atas terkesan sebagai jawaban atas pertanyaan dalam wawancara yang diajukan oleh wartawan peliput acara.

3. Praktik Sosial

Melalui presuposisi-presuposisi yang ditampilkannya, artikel ini merepresentasikan etnis Tionghoa generasi tua sebagai etnis yang masih berbahasa Tionghoa secara aktif sebagai bagian dari identitas mereka (sehingga dianggap wajar dan dipresuposisikan demikian). Dan generasi tua Tionghoa digambarkan sebagai penjaga budaya Tionghoa, dan melestarikan budaya Tionghoa itu dengan menurunkannya pada anak cucu mereka, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara mendatangkan guru untuk mengajar bahasa dan budaya Tionghoa. Namun karena segmen artikel adalah pada *Life! Begin at 50*, artikel ini tidak berbicara banyak tentang ketionghoan dari sudut pandang generasi muda Tionghoa (generasi anak-anak dan cucu mereka), sehingga tidak diketahui apakah mereka memiliki pandangan yang sama. Bila dilihat dari gambaran penampilan mereka di acara pertemuan tersebut, pembaca diberikan persepsi bahwa anak cucu etnis Tionghoa ikut berusaha belajar bahasa dan budaya Tionghoa dengan giat, terbukti bagaimana mereka bisa menampilkan atraksi budaya dengan baik.

Dan artikel ini juga memposisikan etnis Tionghoa seperti etnis lainnya di Indonesia, yang memang wajar dan perlu untuk melestarikan budaya mereka. Namun demikian, pembaca yang tidak memahami sejarah etnis Tionghoa mungkin akan menanyakan informasi yang tersirat di teks ini tentang bagaimana generasi tua bisa berbahasa Mandarin, sedangkan generasi selanjutnya harus diajari secara khusus. Teks ini juga hanya menyiratkan informasi bahwa sekolah CHHS ini dulunya sebenarnya merupakan sekolah Tionghoa, dan para alumni sekolah ini dulu belajar bahasa Tionghoa di sekolah tersebut. Latar belakang sejarah ini tidak diungkapkan secara eksplisit.

Maka senada dengan artikel 4.2.6.1 di atas, konteks pemuatan artikel ini adalah komunitas Tionghoa dipandang sebagai salah satu komunitas yang umumnya memang ada di masyarakat. Hal yang sedikit membedakan adalah adanya konteks pelestarian budaya etnis, yang sedikit memberikan nilai pentingnya komunitas seperti ini. Komunitas dianggap sebagai wadah bagi usaha-usaha pelestarian budaya.

4.2.6.4 *Sishuǐ Zhōng Zhōng Shǔguāng Fúli Jījīnhuì jǔxíng chūnjié liánhuān wǎnhuì* (泗水中中曙光福利基金会举行春节联欢晚会, Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera Surabaya Mengadakan Perayaan Tahun Baru Imlek). 14 Februari 2014, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Berbeda dengan teks di *Jawa Pos* yang tidak menyebutkan konteks pertemuan alumni (terkesan hanya sebatas kumpul-kumpul biasa), konteks pertemuan alumni CHHS di teks ini lebih jelas, yakni dalam rangka perayaan tahun baru Imlek. *Lead* berita diisi dengan penyebutan nama-nama serta jabatan tokoh-tokoh penting yang hadir dalam acara ini. Narasi kemudian bergerak menuju isi dari kata-kata sambutan dari beberapa tokoh, yang kemudian ditutup dengan uraian singkat berbagai penampilan yang memeriahkan acara ini. Porsi paling besar dari teks ini adalah pada isi dari kata sambutan empat orang, Chen Yanhui selaku perwakilan pengurus yayasan, Li Kewei selaku perwakilan mantan guru sekolah

CHHS, Chen Hengxi selaku ketua yayasan, serta Zhang Xingren selaku koordinator bagian arisan.

Penyebutan kepada mantan guru sekolah CHHS menggunakan kata “guru” (*laoshi*) yang terlihat pada penyebutan Li Kewei menjadi guru Li Kewei. Sedangkan tokoh lainnya tidak demikian, langsung disebutkan namanya saja, kecuali saat Chen Hengxi menyampaikan sambutan, digunakan sebutan ketua Chen.

Hiperbola terlihat pada isi kata sambutan dari Chen Yanhui

Pada tanggal 31 Januari kita telah bersama-sama merayakan tahun baru Imlek yang penuh kegembiraan, di setiap toko, hotel, restoran, rumah warga Tionghoa di Surabaya, di mana-mana dihiasi dengan lampion, kuplet/duilian warna merah. (*1 Yuè 31 rì wǒmen gòngtóng dùguò le yīgè hěn kuàilè de chūnjié, Sìshuǐ gèdì de shāngchǎng, jiǔdiàn, cāntīng, huárén zhùzhái qū, dào chù dōu xuánguàzhe hóngsè de dēnglóng, duìlián.*)

Untuk menggambarkan kemeriahan suasana tahun baru Imlek, disebutkan bahwa tiap toko, hotel, restoran dan rumah orang Tionghoa dihiasi dengan lampion dan kuplet. Ini untuk melebih-lebihkan gempitanya kemeriahan suasana, karena tentu tidak semua tempat yang disebutkan itu berhiaskan ornamen Imlek. Presuposisi sekaligus hiperbola masih nampak di kalimat berikutnya

Saat bertemu dengan sahabat dari etnis lain, mereka serempak mengucapkan kepada kita selamat tahun baru, *gongxi facai*. Ini membuat kita etnis Tionghoa merasakan kehangatan. (*Yù dào xiōngdì zúqún de péngyǒu, tāmen dōu yìkǒutóngshēng dì xiàng wǒmen dàohè xīnnián kuàilè, gōngxǐ fācái, zhè ràng wǒmen huáyì zúqún gǎndào hěn wēnxīn.*)

Ketika bertemu dengan sahabat dari etnis lain (dalam teks bahasa Tionghoanya digunakan istilah *xiongdizu* untuk menyebut etnis selain Tionghoa, yang bila diartikan literal artinya adalah etnis saudara), dikatakan mereka memberi selamat kepada kita etnis Tionghoa. Ini adalah presuposisi sekaligus hiperbola yang menyiratkan bahwa etnis lain *selalu* memberi ucapan selamat tahun baru Imlek kepada etnis Tionghoa. Kata-kata “serempak” juga menunjukkan hiperbola ini. Hiperbola ini memberikan kesan bahwa hari raya tahun baru

Imlek sudah semakin populer dan diterima oleh semua kalangan, tidak hanya dari etnis Tionghoa saja.

Hiperbola dan metafora terlihat pada isi kata sambutan Li Kewei

Yayasan berdiri pada tahun 1987, selama 20 tahun ini, Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera telah mengerjakan tak terhitung banyaknya kegiatan kesejahteraan/amal. (*Jīnhuì chénglì yú 1987 nián, 20 duō nián lái, Zhōng Zhōng Shǔguāng Fúli Jīnhuì suǒ zuò fúli gōngzuò bù jì qí shù.*)

Dalam bahasa Tionghoa, digunakan idiom *bu ji qi shu*, yang berarti jumlah yang tak terhingga, sebuah metafora untuk menggambarkan jumlah yang sangat banyak. Metafora melalui idiom ini juga sebagai hiperbola untuk menggambarkan banyaknya kegiatan kesejahteraan/amal yang dilakukan oleh yayasan ini. Tentu jumlah banyak atau tidak di sini relatif, dan lebih lanjut teks ini tidak menyebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan, tetapi hanya memberikan satu contoh yang paling berkesan, yakni memberikan dukungan dana bulanan bagi dua orang mantan guru sekolah CHHS yang sakit keras.

Presuposisi kemudian terlihat kembali dalam hal pendirian sekolah.

Berbicara tentang pendirian sekolah, guru Li dengan bersemangat berkata, “Bertahun-tahun telah lewat, para alumni bertemu dengan para guru, selalu sangat ramah dan hangat, bagaikan kembali ke kehidupan di sekolah puluhan tahun yang lalu. Rencana mendirikan sekolah telah lama disiapkan, namun sampai kini belum ada hasil yang jelas.” Guru Li yang merasa tak berdaya, suaranya tercekat, air matanya meluap. (*Tán dào jiàn xiào wèntí, Lǐ lǎoshī dòngqíng de shuō: “Zhème duōnián guòhòu, xiǎoyǒumen zài jiàn lǎoshī, yījiù nàme qīnqiè, hǎoxiàng yòu huí dào le jǐ shí nián qián de xiǎoyuán shēnghuó. Jiàn xiào jìhuà yǐ yùnniàng hēnjiǔ, dàn shǐzhōng wèi jiàn míngxiǎn chéngxiào.” Gǎndào wúnài de Lǐ lǎoshī yǒuxiē gěngyàn, yǎnjiǎo fàn lèi.*)

Di sini rencana pendirian sekolah dipresuposisikan telah diketahui oleh pembaca, sehingga tidak diberikan penjelasan lebih dulu. Kemudian pada kata sambutan Chen Hengxi, juga ditemukan beberapa presuposisi.

Guru Li adalah guru fisika dan kimia dari ketua Chen. Setelah sekolah Tionghoa tutup, guru Li sangat memperhatikan kehidupan para mantan guru CHHS, merapikan daftar nama seluruh guru dan menyerahkannya kepada yayasan, menemani pengurus yayasan bersama-sama meninjau keadaan para keluarga guru, berbuat banyak hal mendetil dan efektif bagi pekerjaan amal yayasan. (*Lǐ lǎoshī shì Chén zhǔxí de shùlǐ huà lǎoshī, huà*

xiào guānbì hòu, Lǐ lǎoshī fēicháng guānxīn yuán zhōnghuá zhōngxué lǎoshī de shēnghuó, zhēnglìle suǒyǒu lǎoshī míngdān jiāo jǐ jījīn huì, péitóng jījīn huì gōngzuò rényuán yīqǐ shēnrù lǎoshī jiāzhōng liǎojiě qíngkuàng, wèi jījīn huì de fúlì shìyè zuòle xùduō xīzhì yǒuxiào de gōngzuò.)

Seperti teks di *Jawa Pos*, di sini juga diketengahkan presuposisi bahwa sekolah Tionghoa telah ditutup (pada tahun 1966). Bedanya adalah di teks ini digunakan istilah “sekolah Tionghoa”, bukan spesifik sekolah CHHS saja. Kemudian adanya presuposisi untuk menceritakan kegiatan yayasan secara konkrit, yakni salah satunya meninjau keadaan para mantan guru sekolah CHHS.

Lebih lanjut mengenai pendirian sekolah, digunakan beberapa presuposisi dalam prosesnya yang sedang berlangsung

Ketua Chen mengatakan, pendirian sekolah adalah sebuah pekerjaan jangka panjang yang kompleks namun bermakna. Sekarang, tanah telah dibeli, gambar desain juga telah selesai. Ia berjanji kepada para alumni dan guru yang hadir, saat izin dari pemerintah kota turun, akan langsung memberitahu para hadirin. (*Chén zhǔxí hái shuō, jiàn xiào shì yī jiàn fūzá chángyuán dàn hěn yǒu yìyì de gōngzuò, xiànzài, dìpí yǐjīng mǎihǎo, guīhuà tú yě yǐ wánchéng. Tā xiàng zàizuò de lǎoshī xiàoyǒu chéngnuò, shì zhèngfǔ de pīwén xiànlái, jiāng huì dì yī shíjiān tōngzhī dàjiā.*)

Dipresuposisikan bahwa tanah untuk pendirian sekolah telah dibeli, dan desain juga telah selesai dibuat. Dan secara implisit juga disebutkan bahwa saat ini proses pembangunan sedang menunggu izin dari pemerintah kota.

Untuk menarasikan rangkaian acara atraksi Imlek, hanya digunakan satu paragraf. Dalam transitivitasnya, disebutkan bahwa acara penampilan 12 shio yang dimuat di *Jawa Pos* diperankan oleh para siswa Kursus Bahasa Tionghoa Cahaya Harapan Hidup Sejahtera. Di sisi lain, dari penempatan foto-foto liputan acara, foto-foto atraksi yang ditampilkan masih sangat dominan.

2. Praktik Wacana

Interdiskursivitas muncul saat wacana perayaan tahun baru Imlek bercampur dengan wacana pendirian sekolah. Bahkan wacana tentang pendirian sekolah cukup dominan dalam

teks ini, sehingga terkesan lebih ditekankan daripada isi perayaan tahun baru Imlek itu sendiri. Selain itu muncul pula wacana tutupnya sekolah Tionghoa (pada tahun 1966), yang secara implisit juga menyinggung tentang kehidupan para mantan guru sekolah ini yang sebagian dari mereka keadaan hidupnya kurang baik.

Intertekstualitas digunakan saat memunculkan wacana pendirian sekolah ini. Sebelumnya, teks ini sama sekali tidak menyinggung masalah pendirian sekolah, sehingga terkesan teks ini menganggap pembaca sudah paham tentang apa yang dimaksud dengan pendirian sekolah. Wacana pendirian sekolah (CHHS yang baru) telah ada dan dimuat di laporan-laporan tentang CHHS sebelumnya di surat kabar ini⁵. Sehingga wacana pendirian sekolah di teks ini merupakan salah satu mata rantai tekstualitas wacana tersebut di teks-teks sebelumnya (dan mungkin di berita-berita yang akan datang pula).

Menarik bahwa kutipan langsung digunakan dalam teks ini. Kutipan langsung digunakan saat mengutip perkataan Chen Yanhui, serta Li Kewei. Kutipan langsung ini memperkuat penekanan atas apa yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut, sekaligus mewakili dua tema besar dalam artikel ini. Isi kutipan dari Chen Yanhui lebih menonjolkan unsur perayaan tahun baru Imlek, sedangkan isi kutipan Li Kewei menonjolkan rencana pendirian sekolah CHHS yang baru. Tidak bisa ditentukan dengan jelas apakah perkataan mereka mengalami rekontekstualisasi, namun dengan adanya kutipan langsung, lebih menguatkan kesan bahwa teks ini memuat apa yang dikatakan mereka apa adanya, tanpa rekontekstualisasi. Dan berbeda dengan *Jawa Pos*, di mana kutipan perkataan lebih bersifat jawaban atas pertanyaan wartawan, di *Harian Nusantara* kita melihat bahwa semua kutipan sifatnya berupa hasil pengamatan langsung wartawan selama jalannya acara, bukan jawaban pertanyaan wartawan secara khusus.

⁵ Berita tentang peletakan batu pertama pembangunan sekolah dimuat di edisi 29 Oktober 2010, halaman 20. Beberapa berita selanjutnya juga menyinggung tentang pembangunan sekolah ini, seperti pada edisi 4 Desember 2012.

3. Praktik Sosial

Dari rangkaian interdiskursivitas tentang perayaan Imlek sekaligus juga tentang pendirian sekolah CHHS yang baru, terlihat bahwa teks *Harian Nusantara* sangat menonjolkan peran dari komunitas Tionghoa. Perayaan Imlek memang menjadi momen berkumpulnya para anggota komunitas ini, namun di balik itu, ada tujuan yang lebih penting, yakni bagaimana mengupayakan agar sekolah CHHS yang baru bisa segera selesai dibangun. Selain misi pendirian sekolah, komunitas juga dikatakan melakukan berbagai kegiatan sosial, terutama untuk para mantan guru sekolah CHHS lama yang mengalami kesulitan hidup. Dari sini dimunculkan citra komunitas Tionghoa sebagai organisasi yang berperan aktif di masyarakat, baik di bidang pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Ini merupakan konstruksi identitas yang cukup berbeda dengan pandangan stereotip tradisional terhadap orang Tionghoa (terutama yang dipupuk pada masa Orde Baru), yang dianggap lebih merupakan ‘binatang ekonomi’ yang hanya mengejar keuntungan finansial saja (Chua 2004).

Artikel ini juga senada dengan artikel 4.2.6.2, yang mengatakan bahwa komunitas Tionghoa memiliki nilai yang penting. Dalam jangka waktu sejak tahun 2003 hingga sekarang, dikatakan bahwa komunitas Tionghoa telah melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Konteks pelestarian budaya juga ikut mendasari artikel ini, dengan tekanan yang lebih kuat dari *Jawa Pos*, karena di sini dimunculkan wacana pendirian sekolah formal untuk pendidikan bahasa dan budaya Tionghoa, bukan hanya sekedar memberikan kursus.

4.2.7 Tokoh Tionghoa

Kedua surat kabar memuat artikel-artikel tentang tokoh Tionghoa yang cukup beragam. Untuk edisi 2003, tidak ditemukan tokoh Tionghoa yang sama yang diliput di dua surat kabar, sehingga analisis dilakukan untuk dua orang tokoh yang berbeda. Sedangkan untuk edisi masa kini, dipilih tokoh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, karena ia akhir-

akhir ini sangat fenomenal dengan membuat sejarah baru sebagai orang Tionghoa pertama dalam sejarah Indonesia yang menjadi gubernur. Sehingga menjadi menarik untuk menganalisis bagaimana identitas Ahok sebagai etnis Tionghoa ditampilkan di kedua surat kabar.

4.2.7.1 Dr S.L. Tedjasukmana, Ahli Jantung “Langka” di Surabaya: Boleh Cari Uang, Jangan Kebablasan; Puas, Muridnya jadi Profesor. 17 Februari 2003, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Artikel ini menceritakan seorang tokoh Tionghoa, yaitu dokter ahli jantung pertama di Indonesia yang lulusan luar negeri. Sebenarnya di sini ada dua artikel, satu artikel berupa isi wawancara wartawan dengan sang tokoh, sedangkan artikel kecil di sampingnya lebih bersifat biografi. Karena kedua artikel ini saling berhubungan, untuk keperluan analisis ini maka keduanya akan dipakai.

Dari segi predikasi subjek, pada kedua artikel ini tidak disebutkan secara eksplisit bahwa dr Tedja adalah orang Tionghoa, namun secara implisit kita bisa mengetahui lewat penyebutan nama Tionghoanya ‘Dr Tedjasukmana alias The Soey Liang’. Dari nama ‘The Soey Liang’ kita langsung mengetahui bahwa dr Tedja adalah orang Tionghoa. Narasi pada artikel ini lebih menceritakan latar belakang pendidikan dr Tedja, hingga karirnya di bidang kedokteran. Pendidikannya dimulai tahun 1952, dan hingga kini ia masih menjadi dokter ahli jantung di RS Adi Husada Surabaya.

Lebih lanjut, deskripsi sosok dr Tedja dilukiskan dengan positif, melalui penggunaan kata-kata bermakna denotatif, seperti ‘ramah dan humoris’, ‘sehat dan bugar’. Demikian pula lewat kata kerja dalam transitivitasnya, yaitu ‘mengabdikan diri’, dan ‘karir Tedja menanjak’. Selain itu, dr Tedja juga digambarkan telah mencetak murid-murid yang berhasil, beberapa di antaranya menjadi guru besar dan menduduki jabatan tinggi. Hal yang sama juga terlihat pada artikel wawancara. Pada *lead* berita, sudah ditemukan kata-kata ‘segar bugar’,

‘selalu bersemangat’, dan yang menjadi topik utama artikel ini, yakni ‘untuk pengabdianya ini dia tak mau dibayar sepeser pun’. Begitu pula dalam isi artikel, seperti dikatakan bahwa dr Tedja masih menerima pasien pada hari Sabtu. Dan dalam usia yang begitu lanjut, ia masih bekerja, karena tenaganya masih dibutuhkan untuk mengobati pasien.

Kebetulan, di rumah sakit ini, tenaga saya tetap dibutuhkan sebagai dokter ahli jantung. Jadilah saya terus bekerja, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan semua pemberian-Nya sampai sekarang. Terutama kesehatan. Prinsip saya adalah, *Jian Kang Shi Zui Jia de Li Wu*. Kesehatan itu adalah hadiah yang paling berharga.

Pengucapan kalimat bahasa Tionghoa, ‘*Jian kang shi zui jia de liwu*’ di sini menegaskan identitas dr Tedja sebagai etnis Tionghoa.

Kesan hiperbola terlihat pada

Menurut hemat saya, banyak di antara mereka yang kebacut (terlalu, red) mencari uang, dan hanya sedikit sekali yang bersikap idealis.

Kata ‘banyak’ dan ‘sedikit sekali’ tidak jelas mengacu kepada seberapa banyak dan seberapa sedikit. Sehingga di sini dikesankan bahwa kedua kata ini sedikit hiperbolik, dan terkesan mengeneralisir. Di bagian berikutnya, presuposisi terlihat pada

Begini, kata-kata atau sebutan “China” itu janganlah dianggap sebagai suatu hinaan atau cacu maki.

‘Sebagai suatu hinaan atau cacu maki’ menunjukkan adanya presuposisi bahwa sebutan “China” mengandung makna menghina. Demikian pula pada bagian ini

Dan, bagi orang China, jangan malu disebut “kamu China”.

‘Jangan malu disebut “kamu China”’ menunjukkan presuposisi adanya orang Tionghoa yang malu apabila disebut sebagai “China”. Secara implisit kalimat ini juga mengandung arti bahwa “China” memiliki makna negatif, yang membuat orang malu.

2. Praktik Wacana

Artikel berjudul ‘Puas, Muridnya Jadi Profesor’ berisikan biografi dr Tedja. Wacana yang ditampilkan adalah riwayat pendidikan dan karirnya. Penulisan deskriptif ini diselingi dengan kutipan langsung perkataan dr Tedja mengenai masa lalunya. Secara keseluruhan, baik artikel ini maupun artikel wawancara menggambarkan citra yang positif dari sosok dr Tedja. Wacana positif ini dipertegas pada artikel wawancara dengan judul ‘Boleh Cari Uang, Jangan Kebablasan’, dengan wacana utama bahwa dr Tedja rela mengabdikan di usia tuanya, tanpa dibayar. Wacana tentang semangat pengabdian ini digabungkan dengan wacana tentang idealisme, kritik terhadap dokter-dokter masa kini yang kurang mementingkan idealisme, tetapi lebih mengejar materi. Kedua wacana ini saling melengkapi, yakni pengabdian bisa ada karena adanya idealisme.

Wacana lain yang tampak dari artikel wawancara adalah wacana tentang China. Di sini terasa wacana ketionghoan mulai menyeruak. Dalam hal ini khususnya masalah penyebutan ‘China’ dan ‘Tionghoa’ atau ‘Tiongkok’. Penyebutan ‘China’ yang dianggap bermakna konotatif dan menghina etnis Tionghoa memang menjadi wacana yang merupakan polemik di waktu itu (di masa kini, masalah ini paling tidak sudah ‘diselesaikan’ dengan dikeluarkannya keppres untuk kembali pada penyebutan ‘Tionghoa’ dan ‘Tiongkok’). Wacana penyebutan ‘China’ dan ‘Tionghoa’ di artikel ini digabungkan dengan wacana tentang kelebihan atau keunggulan China, yang sebenarnya tidak terlalu memiliki hubungan logis dengan wacana kata ‘China’ yang dipandang berkonotasi negatif. Alasan yang ‘logis’ yang diungkapkan di sini, walau hanya sekilas, adalah karena di negara China, tidak dikenal istilah ‘Tionghoa’. Jadi terkesan artikel ini sedikit ‘menghindar’ dari perdebatan lebih jauh tentang yang mana yang lebih baik, menyebut ‘China’ atau ‘Tionghoa’, sebab ia tidak membahas makna konotatif yang dimiliki oleh kata ‘Cina’. Namun terlepas dari hal ini, wacana untuk ‘bangga menjadi China’ di sini memberikan kita gambaran sebuah identitas Tionghoa yang dibentuk dari wacana yang mengarah ke ketionghoan ‘pusat’, yakni negara

China. Ini ditunjukkan lewat contoh-contoh yang diberikan dr Tedja, semuanya mengarah kepada China sebagai negara.

Sebenarnya masih ada wacana lain yang tersembunyi, yakni mengenai karir orang Tionghoa. Artikel ini memang tidak mengungkapkannya secara eksplisit, namun seperti yang sudah menjadi wacana umum, etnis Tionghoa kebanyakan berkarir di perdagangan dan bisnis. Artikel ini mengangkat tokoh dr Tedja yang berprofesi sebagai seorang dokter, yang merupakan profesi ‘minoritas’ dalam kalangan Tionghoa, lebih-lebih pada masa itu. Hal ini bisa kita tempatkan sebagai wacana tandingan terhadap wacana umum etnis Tionghoa adalah pedagang.

3. Praktik Sosial

Artikel yang mengangkat tokoh Tionghoa yang berprofesi sebagai dokter ini memberikan wacana lain kepada pembaca, bahwa orang Tionghoa juga bisa berprofesi di luar perdagangan dan bisnis. Keberhasilan dr Tedja agaknya menjadi sebuah contoh yang hendak ditunjukkan *Jawa Pos* berkaitan dengan wacana tentang profesi tersebut. Artikel ini juga menyelipkan wacana tentang penyebutan ‘China’ atau ‘Tionghoa’. Namun artikel ini tidak mengangkat argumentasi dari masing-masing sebutan, tetapi malah lebih menyoroti sisi negara China, yang dipandang banyak memiliki kelebihan. Maka identitas Tionghoa di Indonesia di sini digeser untuk mengarah pada negara leluhurnya. Hal ini juga menunjukkan kita bahwa identitas Tionghoa di Indonesia sebagian masih ‘ditarik’ oleh identitas Tionghoa yang dianggap ‘asali’, yakni identitas nasional Tiongkok.

Konteks profesi etnis Tionghoa yang di luar stereotip biasanya, mendasari artikel tentang tokoh dokter Tionghoa ini. Bila ditarik lebih jauh, konteks ini juga berhubungan dengan konteks anti diskriminasi, melalui adanya kebebasan dan kesempatan bagi etnis Tionghoa untuk berkiprah di bidang-bidang lain di luar bidang perdagangan. Hal ini

diperkuat dengan latar belakang pendidikan dr Tedja yang waktu itu masih berada di masa Orde Lama dan Orde Baru.

4.2.7.2 *Zài fǎng sānlúnchē fū Guō Jīnfēng* (再访三轮车夫郭金峰, Mengunjungi Kembali Tukang Becak Guo Jinfeng). 31 Januari 2003, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Teks ini merupakan artikel lanjutan dari artikel tanggal 25 Januari 2003, berjudul ‘Mengunjungi Tukang Becak Tionghoa Guo Jinfeng’. Guo Jinfeng adalah seorang Tionghoa yang bekerja sebagai tukang becak. Penulis artikel ini karena tertarik dengan orang Tionghoa yang berprofesi langka ini, mengunjungi rumahnya, namun waktu itu ia belum bertemu dengan Guo Jinfeng. Ia berencana mengunjungi kembali, tetapi tak disangka Guo Jinfeng ternyata yang datang mengunjunginya. Artikel ini ditulis dengan gaya wawancara, berupa tanya jawab antara penulis dengan Guo Jinfeng.

Deskripsi penampilan Guo Jinfeng dengan pakaian rapi waktu itu membuat penulis artikel ini terkejut, karena penampilannya mencerminkan stereotip penampilan pria Tionghoa pada umumnya, setidaknya dari sudut pandang sang penulis.

Dari penampilannya, benar-benar seperti *image* orang Tionghoa, tidak seperti tukang becak.

Dari sini tercermin bahwa stereotip terhadap orang Tionghoa, termasuk oleh penulis artikel yang juga orang Tionghoa sendiri, umumnya mengkonstruksi orang Tionghoa sebagai golongan yang mapan, dengan dandanan dan pakaian yang necis. Sebenarnya sang penulis artikel berharap ia bisa bertemu dengan sosok Guo Jinfeng sehari-hari, dengan pakaian sebagai tukang becak. Namun sayangnya, karena alasan kepatutan, Guo Jinfeng sengaja berpakaian yang di luar kebiasaannya saat mengunjungi si penulis. Dan karena alasan itu pula, Guo Jinfeng tidak menaiki becaknya datang ke sana, tetapi naik bemo.

“Saya naik bemo. Tadinya ingin naik becak kemari, tetapi dari rumah saya ke sini jaraknya 15 km. Kalau saya mengayuh becak, pasti berkeringat, kotor dan bau, tidak

enak bertemu dengan Anda.” (*“Wǒ zuò běi mó, běnlái xiǎng tà běi zhā lái, dàn cóng wǒjiā lái zhèlǐ 15 gōnglǐ yuǎn, wǒ ruò tà běi zhā, dīng mǎn tóu dà hàn, yòu zàng, yòu chòu, zěnme hǎoyìsi jiàn nǐ.”*)

Citra Guo Jinfeng yang tidak seperti dia biasanya ini dipertegas dengan bagian selanjutnya, yang mengatakan bahwa ‘duduk dengan mengenakan pakaian yang bukan biasanya, membuatnya merasa tidak nyaman.’

Narasi kemudian bergerak dengan ‘panduan’ pertanyaan dari si penulis artikel. Dimulai dengan latar belakang pendidikan Guo Jinfeng, pengalaman kerjanya hingga harus berprofesi sebagai tukang becak, pengalamannya ketika mengayuh becak, hingga masalah penghasilan dan kondisi serta pengaturan keuangan keluarganya. Narasi ditutup dengan tekad penulis artikel, yang ingin membantu putra Guo Jinfeng memperoleh pekerjaan.

2. Praktik Wacana

Intertekstualitas artikel ini jelas, karena ini merupakan artikel lanjutan dari artikel tanggal 25 Januari 2003. Di artikel saat itu, Guo Jinfeng belum pulang ke rumah, sehingga penulis belum sempat mewawancarainya, maka setelah ia mengunjungi kembali (dikunjungi oleh) Guo Jinfeng, baru bisa bertemu dengan menuliskan kunjungannya ini. Dan setelah artikel ini dimuat, masih ada dua artikel lain yang ditulis pembaca, yang merupakan komentar terhadap sosok atau keluarga Guo Jinfeng, dimuat pada tanggal 8 dan 13 Februari 2003. Sedangkan bentuk interteks juga terwujud lewat penulisan bergaya tanya jawab atau wawancara, sehingga kutipan yang disajikan merupakan kutipan langsung.

Wacana yang secara implisit dinyatakan melalui artikel ini, maupun melalui artikel sebelum dan sesudahnya, bahwa selain kesan simpati, juga sebuah wacana ‘tandingan’ yang melawan wacana umum yang stereotipikal, yakni orang Tionghoa biasanya merupakan kelompok ekonomi menengah ke atas. Wacana tandingan ini mengetengahkan bahwa di kalangan etnis Tionghoa pun, sebenarnya banyak yang tergolong miskin. Wacana ini mencoba membongkar konstruksi identitas Tionghoa yang stereotipikal, bahwa Tionghoa

identik dengan kaya, padahal kenyataannya banyak juga yang hidup miskin, bahkan tak layak. Terhadap profesi tukang becak itu sendiri, tampaknya wacana dari berbagai artikel ini, seperti wacana pada umumnya, masih memandang profesi tersebut sebagai profesi kelas rendah.

Selain itu, juga ada wacana gesekan antar etnis, atau lebih tepatnya perlakuan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Ini dimunculkan lewat pengalaman Guo Jinfeng saat menerima ancaman dari tukang becak etnis lain untuk menyingkir dan tidak mengambil ‘jatah’ nafkah mereka. Namun wacana ini diimbangi dengan wacana toleransi dari etnis Jawa yang menjadi tetangga Guo Jinfeng di lingkungan tempat tinggalnya.

Dari tulisan tanya jawab penulis artikel dengan Guo Jinfeng, terkesan bahwa pertanyaan dan jawaban yang ada telah direkontekstualisasi. Pertama, kemungkinan besar terjadi alih bahasa, karena di dalam teks disebut latar belakang pendidikan Guo Jinfeng yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah Tionghoa. Sehingga kemungkinan besar wawancara ini dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kedua, dari segi bahasa yang digunakan, jawaban Guo Jinfeng terkesan sudah dialih bahasa menjadi bahasa tulis yang formal. Dengan demikian gaya penulisan wawancara ini lebih bersifat formal.

3. Praktik Sosial

Artikel tentang tukang becak Tionghoa ini (dan beberapa artikel yang berhubungan dengannya), hendak menampilkan sosok Tionghoa yang berbeda dari identitas Tionghoa stereotipikal. Pertama, tidak berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha, kedua, kelas sosialnya merupakan kelas masyarakat miskin, bukan menengah ke atas. Dengan adanya konstruksi identitas Tionghoa yang ‘berbeda’ seperti ini, pembaca dibawa untuk memahami dan membuka wawasan bahwa ketionghoan di Indonesia tidaklah homogen seperti yang dibayangkan. Paling tidak dari wacana profesi, serta kelas, sudah terdapat perbedaan-perbedaan. Sebagai surat kabar etnis, selain untuk membuka wawasan pembaca, di balik

penyajian wacana seperti ini tampaknya juga mengandung agenda untuk meningkatkan solidaritas di antara sesama anggota kelompok etnis Tionghoa.

Konteks yang mendasari artikel ini juga tidak jauh berbeda dengan artikel di *Jawa Pos*, yakni luasnya pilihan profesi etnis Tionghoa, tidak terbatas pada perdagangan saja. Namun di sini sekaligus dimunculkan wacana yang lain, yakni etnis Tionghoa juga tidak terbatas pada kelas sosial atas, ada juga yang merupakan masyarakat miskin. Maka konteks artikel di sini lebih mengarah kepada usaha menghilangkan stereotip bahwa etnis Tionghoa selalu merupakan golongan yang kaya. Apabila ditarik lebih jauh, hal ini akan membawa kita pada konteks kerukunan antar etnis, yakni meminimalkan kecemburuan sosial dari etnis yang lain, karena etnis Tionghoa pun sebenarnya juga tidak semuanya kaya.

4.2.7.3 Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta. 28 Januari 2014, *Jawa Pos*

1. Analisis Teks

Presuposisi muncul pada *lead* artikel ini

Basuki Tjahaja Purnama memilih jalan yang berbeda dengan orang keturunan Tionghoa di Indonesia pada umumnya, yakni menjadi pengusaha. Memang, pada 1990-an dia sempat menggeluti dunia itu. Namun, setelah reformasi, ketika dunia politik mulai membuka diri pada warga Tionghoa, dia memilih menjadi politikus

“Menjadi pengusaha” dipresuposisikan sebagai jalan hidup orang Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Dengan kata lain, etnis Tionghoa diidentikkan dengan profesi pengusaha.

Tetapi selanjutnya teks ini juga “mendobrak” pandangan umum ini dengan memunculkan narasi yang berlawanan

Dia pernah berkata kepada Ahok kecil, dalam tradisi Tiongkok, tujuan termulia bukanlah menjadi pedagang, tapi pejabat.

Dari bagian yang digarisbawah di atas, kita mengetahui bahwa ternyata di dalam tradisi Tiongkok, menjadi pejabat lebih mulia daripada menjadi pedagang.

Presuposisi selanjutnya dinyatakan lewat

Zaman itu memang tidak memungkinkan bagi seorang keturunan Tionghoa untuk terjun di dunia politik.

“Zaman itu” di sini mengacu kepada masa ketika Ahok masih kecil dan mendapat wejangan dari ayahnya itu, atau lebih tepatnya masa Orde Baru. Di sini Orde Baru dipresuposisikan sebagai masa di mana orang Tionghoa tidak mungkin terjun di dunia politik. Dan presuposisi ini memang benar (Chua 2004: 473).

Ungkapan “pandangan sebelah mata” digunakan untuk menggambarkan tekanan, atau sikap rasialis terhadap diri Ahok baik saat ia menjadi bupati maupun gubernur. “Pandangan sebelah mata” yang berarti menganggap remeh, terkesan bermakna terlalu halus untuk menggambarkan tekanan tersebut, yang lebih bernada tidak suka. Ini terlihat dari narasi di bawahnya yang mengatakan adanya tekanan untuk dirinya berpindah agama.

Beberapa presuposisi terlihat dari kata-kata Ahok berikut ini

"Sejak jadi bupati. Kalau mau main proyek pasti ribut. Saya nggak mewakili orang Tionghoa. Saya Ahok, ya Ahok. Nggak perlu sebut saya Tionghoa, semua orang tahu saya Tionghoa. Saya nggak merasa mewakili siapa-siapa. Jadi, nggak boleh mengklaim," tegasnya.

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “main proyek” di sini. Namun dari konotasi pada umumnya, “main proyek” berarti berhubungan dengan *tender* proyek pemerintah, yang bisa diwarnai dengan “permainan” menyuap pejabat pemerintah untuk mengutak-atik anggaran proyek demi kepentingan tertentu. Lalu tidak jelas juga apa yang dimaksud dengan “pasti ribut”. Siapa yang ribut, dan mengapa ribut, tidak dijelaskan lebih lanjut. Relasi antara kalimat ini dengan kalimat berikutnya juga tidak jelas. Kalimat berikutnya adalah “Saya *nggak* mewakili orang Tionghoa.” Terkesan tidak ada korelasi dengan kalimat sebelumnya “Kalau mau main proyek pasti ribut.” Maka presuposisi yang disajikan di sini memberikan kesan ambigu.

Presuposisi selanjutnya, “Saya *nggak* mewakili orang Tionghoa,” mengisyaratkan bahwa ada yang menganggap Ahok mewakili orang Tionghoa (saja). Negasi “*nggak*” di sini menekankan hal itu. Lalu disambung dengan “*nggak* perlu sebut saya Tionghoa”, yang juga mengesankan banyak yang mengatakan Ahok sebagai Tionghoa. Presuposisi berikutnya, “Saya *nggak* merasa mewakili siapa-siapa,” juga senada dengan presuposisi “*nggak* mewakili orang Tionghoa” di atas, namun dengan penekanan lebih tegas, yaitu tidak mewakili golongan mana pun. “*Nggak* boleh mengklaim” mengesankan ada yang mengklaim Ahok mewakili golongan tertentu. Dilihat dari rangkaian kalimat ini, teks ini menginformasikan bahwa ada golongan tertentu yang mengklaim Ahok mewakili orang Tionghoa (saja), namun tidak dikatakan golongan tertentu yang mana. Sedangkan Ahok sendiri menegaskan dirinya tidak mewakili (tidak berpihak pada) golongan mana pun.

Lebih jauh bisa kita analisis paragraf berikutnya

Dia mengatakan, tidak semua pengusaha atau politikus keturunan Tionghoa adalah orang baik. Ahok tidak menutup mata kalau ada orang-orang keturunan yang memang tujuannya adalah mengeruk keuntungan pribadi. "Tionghoa yang seperti itu juga tidak berguna kalau hanya untuk korup," ungkapnya.

Kata-kata negasi “tidak semua” di sini menyiratkan ada pandangan umum bahwa pengusaha atau politikus keturunan Tionghoa adalah orang baik. Namun Ahok tidak beranggapan demikian. Pandangan Ahok ini dijelaskan lebih lanjut di kalimat selanjutnya, yang menegaskan kalau ada orang Tionghoa yang memang hanya ingin “mengeruk keuntungan pribadi” atau “korup”. Bila kita hubungkan dengan paragraf sebelumnya, juga secara implisit paragraf ini menegaskan kembali “Ahok tidak mewakili golongan Tionghoa (saja)”, dengan membeberkan citra pengusaha atau politikus Tionghoa yang tidak semuanya baik, sehingga tidak perlu mewakili golongan mereka.

Lebih jauh lagi penegasan Ahok disampaikan melalui paragraf berikutnya

Banyak warga Tionghoa yang memilih menjadi pengusaha, menurut dia, karena persoalan kesempatan. Dia tidak melihat itu sebagai masalah yang muncul karena rasialisme. Itu pula yang membuat anak-anak pandai memilih untuk pergi dari Indonesia dan menetap di luar negeri.

Presuposisi bahwa warga Tionghoa banyak yang memilih menjadi pengusaha adalah karena alasan rasialisme, ditolak oleh Ahok. Ini pun merupakan penegasan lebih jauh lagi dari paragraf-paragraf sebelumnya, sehingga bila kita tarik konjungsi antar paragraf ini, maka kita temukan bahwa (1) Ahok tidak mewakili golongan Tionghoa (saja), (2) pengusaha dan politikus Tionghoa tidak semuanya baik, sehingga tidak perlu diwakili, dan pada paragraf ini, (3) bukan masalah rasialisme yang menyebabkan etnis Tionghoa banyak yang memilih jadi pengusaha (sehingga Ahok tidak perlu khusus mewakili etnis Tionghoa). Namun secara logika, masalah kesempatan di sini sebenarnya berhubungan dengan masalah rasial, karena justru diskriminasi di masa Orde Barulah yang membatasi kesempatan orang Tionghoa berprofesi di bidang politik atau militer.

Transitivitas dengan konstruksi pasif tanpa subjek digunakan pada paragraf berikutnya

"*Nggak* dikasih kesempatan. Bukan hanya anak Tionghoa, tapi yang non-Tionghoa juga *nggak* mau balik karena percuma di sini," tuturnya.

Tidak diketahui siapa yang tidak memberi kesempatan. Sayangnya tidak diketahui jelas apakah Ahok memang tidak menyebutkan subjeknya, ataupun penghilangan subjek ini dilakukan oleh editor *Jawa Pos*.

Seperti sudah menjadi pengetahuan umum, metonim "Imlek" biasa digunakan untuk mewakili tahun baru Imlek. Makna "Imlek" yang sebenarnya adalah penanggalan tradisional Tionghoa, kini memiliki makna baru yakni tahun baru Imlek. Metonim ini juga digunakan di artikel ini, bahkan dijadikan neologisme dengan dicampur unsur bahasa Jawa menjadi "Imlekan".

Beberapa presuposisi mengenai simbol-simbol yang terkait dengan perayaan tahun baru Imlek dipaparkan di bagian berikutnya, seperti: tidak boleh menyapu, tidak boleh masak, tidak boleh bekerja (sebenarnya ritual lengkapnya tidak hanya demikian, karena ritual ini dilaksanakan sesuai dengan tanggal-tanggal tertentu menjelang Imlek, bisa berubah sesuai tanggalnya, misalnya pada tanggal tertentu malahan harus membersihkan rumah), *angpao*, aksesoris lampion, makanan manis, jeruk, ramalan *shio*. Presuposisi lain terkait dengan agama Kristen, yang dipresuposisikan tidak memperbolehkan penganutnya melakukan berbagai ritual Imlek.

2. Praktik Wacana

Wacana etnis Tionghoa umumnya berprofesi pengusaha atau pedagang, pada teks ini dimunculkan dan dibenturkan dengan wacana bahwa etnis Tionghoa menurut tradisi Tiongkok seharusnya menjadi pejabat, karena pejabat dianggap profesi yang termulia. “Kontradiksi” wacana ini telah secara kritis mengoreksi konsepsi pembaca umum, bahwa ketionghoan “asali” ternyata tidak memandang profesi pedagang sebagai hal yang mulia.

Wacana diskriminasi rasial yang menimpa etnis Tionghoa di masa Orde Baru, oleh teks ini diperlunak melalui kutipan perkataan Ahok, bahwa bukan masalah rasial yang menyebabkan etnis Tionghoa banyak memilih menjadi pengusaha, melainkan masalah kesempatan. Ini kelihatannya direkontekstualisasikan oleh artikel ini untuk memperlunak wacana diskriminasi, karena beberapa kemungkinan sebab yang bisa kita telusur, yakni (1) masalah kesempatan sebenarnya pun disebabkan karena masalah rasial, (2) kutipan perkataan Ahok di sini bukan kutipan langsung, (3) di bagian teks berikutnya, dikatakan Ahok berbicara tentang masalah kesempatan itu dalam konteks putra-putri bangsa Indonesia yang pandai, yang memilih pergi ke luar negeri, karena di Indonesia mereka tidak diberi kesempatan. Jadi sebenarnya konteks perkataan Ahok tentang kesempatan adalah mengacu pada anak-anak Indonesia yang pindah ke luar negeri.

Dari wacana tentang pilihan hidup Ahok sebagai pejabat, karena masih dalam rangka menyambut tahun baru Imlek, artikel ini kemudian menampilkan wacana bagaimana Ahok merayakan hari raya Imlek. Wacana tahun baru Imlek sebagai bagian budaya Tionghoa, dicampurkan dengan wacana agama, dalam hal ini agama Kristen yang dianut Ahok. Digambarkan bahwa ritual dalam tahun baru Imlek bertentangan dengan iman Kristen. Namun ditunjukkan pula bahwa ketionghoan Ahok dalam kaitan dengan hari raya Imlek masih mengakomodasi tradisi memberikan *angpao*. Akan tetapi, di dalam wacana tentang pemberian *angpao* ini pun juga dicampur dengan wacana perubahan pandangan generasi muda Tionghoa terhadap *angpao*, yakni lebih mementingkan isinya, daripada memperhatikan warna pembungkusnya.

3. Praktik Sosial

Teks ini menyajikan beberapa versi ketionghoan yang ‘berbeda’ dengan ketionghoan esensial pada umumnya. Perbedaan pertama adalah, dengan menampilkan sosok Ahok, yang berprofesi sebagai pejabat, dikontraskan dengan wacana etnis Tionghoa yang biasanya memilih berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha. Dari sini diketahui bahwa teks ini turut membangun persepsi sosial bahwa etnis Tionghoa tidak harus hanya berkecimpung di bidang bisnis. Perbedaan kedua, simbol-simbol perayaan tahun baru Imlek, dipertentangkan dengan kekristenan. Diperlihatkan bahwa orang Tionghoa tidak selalu merayakan tahun baru Imlek dengan segala ritualnya, serta tidak selalu mempercayai peruntungan berdasarkan *shio* dan *fengshui*, karena ketionghoan orang Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh agama yang dianutnya. Perbedaan ketiga, muncul pandangan baru mengenai *angpao*, yaitu tidak lagi mementingkan pembungkusnya, tapi lebih mementingkan isinya, yang secara tidak langsung memberitahu kita bahwa prinsip materialisme telah ikut merasuk dalam bangun ketionghoan generasi muda Tionghoa.

Di sisi lain, teks ini, seperti halnya beberapa teks *Jawa Pos* lain dalam pembahasan bab ini, cenderung ‘memperlunak’ diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa pada masa Orde Baru. Wacana diskriminasi dipertentangkan dengan wacana bahwa tidak hanya etnis Tionghoa yang kurang mendapat kesempatan berkembang di Indonesia, tetapi juga dari etnis yang lain.

4.2.7.4 *Yīgè huáyì zhèngzhì jiā zài Yìnní de juéqǐ zhī lù* (一个华裔政治家在印尼的崛起之路, *Bangkitnya Seorang Politisi Tionghoa di Indonesia*). 26 November 2014, *Harian Nusantara*

1. Analisis Teks

Pada *lead* berita, identitas Ahok disoroti dari dua aspek, yakni etnisitas, dan agama, plus aspek temperamennya. Semuanya ini dirangkum menjadi satu kesimpulan bahwa orang seperti ini sekarang menjadi gubernur ibukota negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sungguh ‘sukar dipercaya’.

Perbedaan Basuki Tjahaja Purnama dengan pendahulunya tidak hanya terletak pada gayanya yang keras, tetapi ia juga adalah seorang Kristen, seorang Tionghoa. Namun ia telah menjadi pemimpin ibukota negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Ini sukar dipercaya. (*Zhōng Wānxué (Basuki Tjahaja Purnama) yǔ qiánrèn de qūbié bùjīn zàiyú tā de qiángyìng fēnggé, hái zàiyú tā shì yī míng jīdū tú, yī míng huáyì. Èr tā jūrán zài zhǎngguān shìjiè shàng rénkǒu zuìduō de mùsīlín guójiā de shǒudu, zhè lìng rén nányǐ zhìxìn.*)

Strategi kontras yang digunakan oleh *lead* ini hendak menekankan bahwa seorang minoritas (bahkan dobel minoritas) telah menjadi pemimpin tempat yang mayoritas penduduknya ‘berbeda’ dengan dirinya. Hal yang seharusnya bertolakbelakang ini ternyata mampu berjalan bersamaan, menjadi sebuah paradoks, sehingga sukar dipercaya. Kata ‘sukar dipercaya’ bisa bermakna positif, juga bisa bermakna negatif. Untuk mengetahui maknanya, pembaca harus membaca keseluruhan artikel ini.

Kata ‘berbeda’ ini kemudian diperlunak dengan penyebutan bahwa sebenarnya dulu Jakarta pernah mempunyai gubernur Kristen, dan Tionghoa (Henk Ngantung). Namun masa jabatannya hanya sementara. Artikel ini tidak menyebutkan nama gubernur ini. Ia

melanjutkan penekanan bahwa Jakarta dalam jangka waktu yang lama tak pernah punya gubernur Tionghoa dan Kristen. Lalu strategi kontras kembali digunakan, yakni melalui pandangan Ahok sendiri.

Meskipun Indonesia memiliki sejarah diskriminasi—kadang kekerasan brutal—terhadap etnis Tionghoa, namun Ahok menyatakan, ia merasa agama dan etnisitasnya tidak menjadi hambatan dalam politik. (*Jīnguǎn Yīnní yǒu qíshì—yǒushí huì yěmǎn bàolì duìdài—huáyì de lìshǐ, dàn Zhōng Wànxué biǎoshì, tā juédé zìjǐ de xìnyǎng hé zhōngzú méiyǒu chéngwéi zhèngzhì zhàng'ài.*)

Lebih jauh, Ahok menegaskan dengan mengutip perkataan ayahnya

“Ketika orang memberitahu saya ‘Tionghoa adalah minoritas’, ayah saya akan berkata, bilang kepada mereka, kami lebih cinta negara.” Kata Ahok saat diwawancarai baru-baru ini. “Ayah saya juga berkata, kalau Indonesia suatu hari dijajah oleh negara lain, ia akan maju ke garis paling depan, sekali lagi berperang demi kemerdekaan.” (*“Dāng rénmen gàosù wǒ ‘huáyì zhàn shǎoshù’ de shíhòu, wǒ fùqīn huì shuō, gàosù tāmen, wǒmen gèng àiguó.” Zhōng Wànxué zuìjìn jīeshòu cǎifǎng shí shuō. “Wǒ fùqīn shuō, rúguǒ Yīnní yǒu yītiān bèi wàiguó zhànlǐng, tā huì chōngdào qiánxiàn de zuì qiánduān, zàicì wèi dùlì ér zhàn.”*)

Walau di sini sebenarnya Ahok hanya mengutip perkataan ayahnya, namun karena strategi kontras di atas, pembaca seakan dibawa pada kesan bahwa Ahok juga akan mengikuti ayahnya, membela Indonesia sampai mati. Pandangan Ahok pribadi mengenai nasionalisme, dapat ditemui di bagian berikutnya.

Meskipun sebagian keluarga Tionghoa yang kaya setelah kerusuhan usai meninggalkan Indonesia, mengungsi ke Singapura, namun keluarga Ahok tetap tinggal di Indonesia. Ia mengatakan, “Kami adalah keturunan Tionghoa, tapi tanah air kami Indonesia.” (*Suīrán yīxiē fūyǒu de huárén jiāting zài sāoluàn jiéshù hòu táo dào le lín guó Xīnjiāpō, dàn Zhōng Wànxué jiā liú zài le Yīnní. Tā shuō, “Wǒmen shì Zhōngguó rén de hòudài, dàn wǒmen de zǔguó shì Yīnní.”*)

Maka secara keseluruhan dari makna beberapa bagian teks ini, kata-kata ‘sukar dipercaya’ di *lead* artikel, memberikan kesan ‘sukar dipercaya’ yang bermakna positif.

Naiknya Ahok sebagai gubernur digunakan sebagai metafora simbol keberhasilan politisi Tionghoa sejak reformasi. Sejak diberlakukannya pemilu dan pilkada secara

langsung, maka etnis Tionghoa yang terjun ke dunia politik semakin banyak. Ahok menjadi simbol dari keberhasilan mereka semua.

Naiknya Ahok melambangkan keberhasilan yang diraih politisi Tionghoa sejak tahun 199 Indonesia menuju demokrasi, terutama sejak dilaksanakannya pemilihan langsung di tiap tingkat pemerintahan. (*Zhōng Wànxué de juéqǐ biāozhìzhè huáyì zhèngzhì rénshì zì yìnní yú 1999 nián xiàng mǐnzhǔ zhìdù guòdù yǐlái suǒ qǔdé de chéngjiù, tèbié shì zài gè jí zhèngfǔ shíxiàn zhíjīe xuǎnjǔ yǐlái.*)

2. Praktik Wacana

Dari segi intertekstualitas, artikel ini merupakan terjemahan artikel dari situs The New York Times yang ditulis oleh Joe Cochrane. Artikel aslinya berjudul ‘An Ethnic Chinese Christian, Breaking Barriers in Indonesia’. Dari judul ini, terlihat *Harian Nusantara* telah melakukan rekontekstualisasi menjadi ‘Bangkitnya Seorang Politisi Tionghoa di Indonesia’. Kata ‘Christian’ tidak dimasukkan dalam judul, sedangkan kata ‘breaking barriers’, walaupun bermakna mirip dengan ‘bangkit’, juga tidak sepenuhnya sama. *Harian Nusantara* menambahkan kata ‘politisi’, yang tidak ditemukan di artikel asli. Maka terkesan bahwa konteks yang hendak ditampilkan oleh *Harian Nusantara* adalah ‘politisi Tionghoa’, sebuah konstruksi identitas yang dipandang lebih mendobrak wacana umum, dimana Tionghoa sangat jarang menjadi politisi. Kata ‘politisi’ juga dirasa dapat langsung memberikan acuan yang jelas kepada pembaca, daripada prediksi ‘Tionghoa Kristen’. Karena berupa terjemahan, maka artikel ini memuat cukup banyak kutipan langsung, yang biasanya jarang ditemui pada artikel berbahasa Tionghoa.

Sedangkan dari segi interdiskursivitas, beberapa wacana yang saling kait-mengkait disuguhkan melalui artikel ini. Pertama adalah wacana tokoh Tionghoa sebagai minoritas memimpin mayoritas. Ini yang disebut oleh artikel sebagai hal yang ‘sukar dipercaya’. Wacana ini dikaitkan dengan nasionalisme, rasa cinta tanah air dari etnis Tionghoa, yang berkaitan pula dengan isu rasial, dengan menggabungkannya menjadi wacana nasionalisme yang ‘mengalahkan’ rasialisme. Wacana rasialisme dikembangkan lagi dengan wacana

adanya protes dari beberapa pihak terhadap naiknya Ahok menjadi gubernur, yang berkembang ke arah wacana agama, meliputi juga isu ras dan agama (Tionghoa Kristen) yang menghinggapi Jokowi menjelang pemilihan presiden 2014. Kemudian ada pula wacana tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, yang setelah melaksanakan pemilihan wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan secara langsung, memungkinkan politisi-politisi Tionghoa untuk ikut terjun dan bersaing dalam politik. Wacana tentang transparansi, figur pemimpin yang jujur dan bersih yang diidamkan rakyat, juga ikut muncul dalam artikel ini. Dan terakhir, ditutup dengan wacana yang implisit mengatakan, apabila demokrasi di Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik, maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti Ahok juga naik menjadi presiden.

Wacana keberhasilan demokrasi di Indonesia, secara tak langsung juga memberikan wacana bahwa, yakni etnis Tionghoa jadi memiliki lebih banyak kesempatan untuk terjun di bidang profesi politik, yang berada di luar wacana stereotipikal, yakni pedagang dan pengusaha. Teks ini mengatakan secara eksplisit, bahwa meskipun kesempatan menjadi politisi sebenarnya tidak dibatasi, namun dalam perkembangannya, tidak banyak warga Tionghoa yang terjun dalam politik pada puluhan tahun terakhir, karena berbagai kepentingan. Namun perkembangan terakhir yang ‘menggembirakan’ (dengan pemilihan langsung), telah memungkinkan etnis Tionghoa berkiprah lebih banyak di bidang politik, bahkan beberapa telah memenangkan pemilihan di daerah dimana mereka menjadi minoritas.

3. Praktik Sosial

Artikel terjemahan dari The New York Times ini menyoroti naiknya Ahok menjadi gubernur Jakarta, yang merupakan sesuatu yang sulit dipercaya. Identitas Ahok sebagai Tionghoa Kristen, dikontraskan dengan situasi Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, menunjukkan kemustahilan itu. Namun lewat ketidakmungkinan yang menjadi mungkin ini, artikel ini hendak mengetengahkan informasi bahwa demokrasi di

Indonesia telah mencapai sebuah keberhasilan besar. Pesan yang ingin disampaikan oleh *Harian Nusantara* melalui artikel ini adalah bahwa politisi Tionghoa telah mendapatkan ‘jalan’ untuk berkiprah secara nyata di dunia politik, bahkan bisa jadi hingga ke tingkat yang tertinggi, yakni presiden. Dengan demikian artikel ini hendak menggugat wacana dominan yang mengurung etnis Tionghoa dalam lingkup profesi pedagang dan pengusaha, melalui contoh nyata keberhasilan Ahok. Sedangkan wacana tentang hambatan atau gangguan yang mengangkat isu rasial dan agama yang saat ini masih merongrong Ahok, juga ditunjukkan oleh artikel ini, namun tidak ditunjukkan bahwa hal-hal tersebut bersifat serius.

Selain itu, konteks demokrasi di Indonesia yang ‘berhasil’ juga mendasari artikel ini. Keberhasilan demokrasi di Indonesia di sini ditandai dengan diberlakukannya sistem pemilihan wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan secara langsung. Dengan demikian, artikel ini turut mendukung demokrasi di Indonesia, agar terus berkembang lebih baik.

4.3 Konstruksi Identitas Tionghoa dalam Perspektif Stuart Hall

4.3.1 Esensialisme Strategis

Dari perbandingan kedua surat kabar, pada tahun 2003, didapatkan bahwa melalui pemberitaan tentang hari raya Imlek, *Jawa Pos* cenderung menggambarkan etnis Tionghoa sebagai kelompok ekonomi kuat, yang merayakan Imlek dengan mewah, lengkap pula dengan pernak-pernik yang berhubungan dengan kekayaan, seperti hujan sebagai penanda keberuntungan, dan pembagian *angpao* lengkap dengan nominalnya. Sedangkan dalam liputan dengan tema yang sama, *Harian Nusantara* cenderung menekan wacana semacam itu. *Harian Nusantara* lebih menonjolkan kesederhanaan dalam perayaan Imlek, serta pengakuan dari etnis yang lain maupun dari khalayak umum, akan posisi mereka sebagai bagian dari bangsa, lewat diakuinya tahun baru Imlek sebagai salah satu hari libur nasional.

Seperti yang dikatakan Hall (1996c) bahwa identitas merupakan titik temu, titik jahitan yang tak stabil, antara wacana dan praktik yang menempatkan kita sebagai subjek

sosial dari sebuah wacana, dengan proses yang mengkonstruksi kita sebagai subjek yang dapat ditempatkan (1996c: 5), maka dalam hal ini terlihat bahwa identitas Tionghoa merupakan titik temu tak stabil antara wacana Tionghoa sebagai golongan ekonomi kuat, wacana Tionghoa sebagai kelompok yang sederhana, wacana Tionghoa sebagai bagian resmi dari bangsa Indonesia, serta wacana Tionghoa sebagai kelompok yang terbuka, di samping juga wacana religius etnis Tionghoa. Bagaimana etnis Tionghoa diposisikan pada titik ini, bila dilihat dari artikel di *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara*, tidaklah sama. Tarik-menarik antara berbagai wacana, dengan kekuatan yang berbeda-beda, menghasilkan posisi yang berbeda pula. Secara sementara (karena tidak stabil), titik ini di *Jawa Pos* lebih condong pada posisi etnis Tionghoa sebagai kelompok ekonomi kuat, mewah, yang cukup religius dan cukup terbuka. ‘Strategi’ yang menentukan titik ini tampaknya masih dipengaruhi oleh stereotip yang dibangun pada masa Orde Baru, bahwa etnis Tionghoa adalah golongan kelas atas. Sedangkan di *Harian Nusantara*, lebih condong pada posisi etnis Tionghoa sebagai kelompok yang sederhana, cukup religius dan merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Strategi ini berusaha mendobrak citra stereotipikal etnis Tionghoa pada masa Orde Baru.

Pada terbitan masa kini, *Jawa Pos* sudah terlihat mengurangi kecenderungan strategi stereotipikal ini. Misalnya pada artikel tentang peringatan hari kemerdekaan RI tahun 2013. Artikel ini memang masih menganggap etnis Tionghoa sebagai kelompok pengusaha, namun dalam artikel ini sudah ditambahkan wacana yang lain, yakni bagaimana etnis Tionghoa bisa berbaur dengan golongan masyarakat ekonomi lemah. Strategi penentuan titik identitas di sini menjadi lebih kompleks, dengan melibatkan wacana pembauran dan kepedulian tersebut. Ini berarti dalam jangka waktu sepuluh tahun ini, sudah ada perubahan persepsi mengenai ketionghoan oleh arus utama, dimana penekanan stereotipikal meskipun masih ada, tetapi terkesan berkurang karena adanya wacana ‘tandingan’ berupa kepedulian dan berbaurnya etnis Tionghoa dengan masyarakat ekonomi lemah. Konteks reformasi yang berjalan

sepuluh tahun ini memang lebih mengesankan prinsip pluralisme. Sehingga hal ini memunculkan wacana seperti berbaurnya etnis Tionghoa ini.

4.3.2 Identitas Hibrid versus Identitas Tunggal

Melalui analisis artikel tentang kunjungan delegasi Tiongkok ke Indonesia, baik tahun 2003 dan masa kini, diketahui bahwa menurut *Harian Nusantara*, meskipun etnis Tionghoa kebanyakan sudah menjadi warga negara Indonesia, namun hidup mereka di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Ini sudah terlihat pada masa Orde Baru, dimana sejak hubungan diplomatik kedua negara pulih, kondisi etnis Tionghoa di Indonesia pun sedikit mendapat angin segar (Kaboel 2010). Namun ini tidak berarti bahwa nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia selalu berorientasi ke Tiongkok, tetapi ini lebih menunjukkan adanya unsur hibrid dalam identitas Indonesia Tionghoa, yakni identitas nasional sebagai warga negara Indonesia (mewakili Indonesia dalam hubungan diplomatik dengan Tiongkok), juga identitas global pan-Tionghoa. Di sinilah unsur *multiple* dari identitas menurut Hall itu terlihat, identitas tak pernah menyatu, tetapi semakin terbelah (Hall 1996c). Hibridnya identitas ini mengandung dua aspek, yang pertama yakni tetap ada *sense of belonging* kepada ketionghoan ‘asal’ yakni Tiongkok sebagai pusatnya. Dan aspek yang kedua adalah aspek menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, di mana etnis Tionghoa Indonesia mengambil peran aktif.

Hal ini senada dengan perbedaan struktur yang muncul pada *Harian Nusantara* dan *Jawa Pos*, dimana berita tentang Tiongkok di *Harian Nusantara* mendapat porsi yang cukup besar, termasuk pula pan-Tiongkok seperti Taiwan dan Hongkong, juga konten khusus tentang etnis minoritas seperti Tibet dan Uyghur. Pemberitaan mengenai kegiatan konsul jenderal Tiongkok di Surabaya, atau kunjungan delegasi dari Tiongkok ke Indonesia, juga cukup sering diberitakan. Ini menekankan bahwa *Harian Nusantara* sebagai representasi etnis Tionghoa, juga mempunyai tugas sebagai pendukung hubungan bilateral Indonesia-

Tiongkok, dengan memberikan gambaran yang jelas tentang Tiongkok masa kini kepada pembacanya. Di sisi lain, pemberitaan tentang Tiongkok juga menunjukkan adanya *sense of belonging* etnis Tionghoa kepada ‘akar’ identitas Tionghoa, yaitu ketionghoan asli, ketionghoan pusat. Rasa memiliki peradaban Tionghoa tidak bisa hilang sepenuhnya, walau di kalangan Tionghoa peranakan maupun diaspora. Ini sesuai dengan cara pandang Hall mengenai identitas, bahwa sisi esensial tidak bisa hilang begitu saja (Hall 1990: 223). Selain itu, unsur transnasionalisme juga merupakan unsur yang biasanya melekat pada komunitas diaspora. Dan ini tampaknya juga berlaku bagi etnis Tionghoa di Indonesia, sebagai sebuah ‘komunitas yang dibayangkan’ (Anderson 2006), yang berhubungan dengan etnis Tionghoa lain yang tersebar di seluruh dunia. Komunitas ini juga difasilitasi oleh konsumsi media dengan konten yang sama di komunitas tersebut (Karim 2003: 2), dalam hal ini konten tentang Tiongkok. Media berperan dalam mempertahankan kesamaan dalam ‘bayangan’ tersebut, serta sebagai jembatan dalam hubungan di dalam komunitas yang dibayangkan itu (Bailey, Georgiou, & Harindranath 2007: 3). Jadi nampak di sini adanya identitas global di antara komunitas bayangan etnis Tionghoa di seluruh dunia, diwarnai oleh unsur ketionghoan Tiongkok sebagai asal.

Hal lain yang juga menunjukkan identitas global adalah berita-berita olahraga. Ada kecenderungan *Harian Nusantara* lebih memuat berita olahraga internasional, khususnya tentang atlet Tionghoa (terutama atlet Tiongkok). Ini adalah perbedaan yang cukup kontras dengan *Jawa Pos*, yang memberitakan berita olahraga dalam negeri dan internasional dengan cukup berimbang, dan tidak spesifik pada etnis tertentu. Selain transnasionalisme, kemungkinan penyebab lainnya adalah *Harian Nusantara* mencoba membangun sebuah wacana tandingan mengenai kiblat olahraga, yaitu yang lebih mengarah kepada Tiongkok daripada Barat, karena memang beberapa tahun terakhir ini, Tiongkok memiliki kemajuan prestasi yang cukup pesat di kancah olahraga internasional.

Identitas global yang menghasilkan identitas hibrid ini adalah seperti yang dikatakan oleh Hall (1992: 619) tentang kemungkinan pengaruh globalisasi. Walau kita tetap tidak bisa mengabsolutkan identitas hibrid yang baru ini, namun paling tidak beberapa pertanda tentang identitas seperti ini terlihat pada konten di *Harian Nusantara*. Kita masih perlu menelaah lebih lanjut bagaimana identitas hibrid pada sebagian etnis Tionghoa di Indonesia ini bisa berkembang di dalam pergeseran makna yang terjadi terus-menerus, seperti yang dikatakan Hall (1996c), ‘jalan menjadi’ lebih penting daripada ‘kondisi meng-ada’.

Konstruksi identitas hibrid semacam ini tidak muncul pada konstruksi identitas Tionghoa di *Jawa Pos*. Dihilangkannya peran etnis Tionghoa sebagai mediator dalam hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok menunjukkan hal ini. Dan *Jawa Pos* di dalam memberitakan Tiongkok, maupun mengenai hubungan bilateral Indonesia Tiongkok, terkesan tidak berbeda dengan pemberitaan negara asing lain. Identitas nasional Indonesia dan Tiongkok dibedakan dengan jelas, sehingga tidak ada kesan hibrid di dalamnya. Dalam hal identitas nasional, *Jawa Pos* lebih memandang etnis Tionghoa sebagai orang Indonesia, dengan identitas nasional yang tunggal dan homogen.

4.3.3 Budaya Tionghoa sebagai Unsur Identitas

Perbedaan yang juga menonjol pada konten *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara* adalah pada konten tentang komunitas dan budaya Tionghoa. *Harian Nusantara* memiliki porsi yang lebih besar mengenai pemberitaan komunitas Tionghoa. Hal ini menunjukkan sisi ‘etnik’ dari *Harian Nusantara*, dengan memberikan konten ‘etnik’ lebih banyak di dalam surat kabar tersebut. Selain itu *Harian Nusantara* juga memiliki ‘misi budaya’ untuk memberikan sebuah pembelajaran tentang bahasa dan budaya Tionghoa. Komunitas Tionghoa yang bergerak di bidang pendidikan, seperti sekolah maupun yayasan atau perkumpulan lainnya cukup sering diberitakan. Selain itu, konten budaya juga disajikan secara teratur dengan topik yang cukup bervariasi.

Penekanan pada budaya Tionghoa (yang esensial, seperti bahasa Tionghoa) ini contohnya tercermin pada artikel tentang komunitas Tionghoa. Teks di *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara* memunculkan wacana tentang pelestarian bahasa dan budaya Tionghoa. Namun teks di *Jawa Pos* lebih terkesan menyoro ti segi pragmatismenya, misalnya pada artikel tahun 2014, tentang para alumni sekolah CHHS mengundang guru untuk mengajar anak cucu mereka. Sedangkan teks di *Harian Nusantara* lebih menekankan pelestarian budaya Tionghoa jangka panjang, melalui rencana pembangunan sekolah oleh para alumni. Dan teks di *Harian Nusantara* juga menyebutkan dengan jelas bahwa yayasan CHHS telah memiliki kursus bahasa Tionghoa, sehingga lebih jelas mengenai identitas siapa yang tampil dalam perayaan kali itu, yakni para siswa di kursus ini.

Maka kita bisa menilai bahwa identitas etnis Tionghoa yang ditampilkan di *Jawa Pos* untuk topik ini adalah bahwa etnis Tionghoa tak ubahnya seperti etnis yang lain, yang perlu menjalin relasi dan hubungan baik antar sesama anggota etnis tersebut. Mereka juga perlu menjaga identitas etnis dengan cara melestarikan budaya etnis mereka. Sehingga, dari sudut pandang arus utama, sebenarnya etnis Tionghoa sudah dipandang sebagai sebuah etnis bagian dari bangsa Indonesia. Namun cara pandang seperti ini hanya bersifat umum, karena cenderung hanya mengamati etnis Tionghoa dari permukaan. Sedangkan *Harian Nusantara* sebagai harian etnis, menyajikan liputan dengan lebih mendalam, mulai dari pentingnya pendirian organisasi alumni, ditekankannya dasar hukum organisasi, proses demokrasi dalam pemilihan pengurus, hingga ditampilkannya agenda-agenda utama dari komunitas tersebut, yang bukan hanya sebatas permukaan luar yakni kumpul-kumpul dan menjalin silaturahmi saja, tapi mereka juga mempunyai misi sosial yang lebih penting, dalam hal ini salah satu contohnya adalah kegiatan sosial yang mereka lakukan dan rencana memajukan pendidikan, atau melestarikan bahasa dan budaya Tionghoa melalui membangun sekolah. Perkumpulan alumni sekolah Tionghoa merupakan salah satu jenis organisasi Tionghoa

yang muncul pasca Orde Baru. Dan memang perkumpulan alumni seperti ini biasanya bergerak dalam kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan (Dawis 2010: 64). Cara pandang kedua Hall tentang identitas (Hall 1990: 225) yang dikonstruksi dari perubahan, ketidaksinambungan, dan transformasi, terjadi saat sekolah mereka ditutup. Orde Baru yang melarang budaya Tionghoa, telah memutus kesinambungan pengalaman kolektif generasi tua dengan generasi berikutnya. Bagi generasi tua, ini membangkitkan kembali kenangan atas masa lampau, dan timbul keinginan untuk kembali mewariskan budaya Tionghoa bagi generasi yang lebih muda (Hoon 2012: 81). Tetapi bagi generasi muda, mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi mereka belajar bahasa dan budaya Tionghoa, bukan hanya tentang kesadaran diri sebagai orang Tionghoa (2012: 83). Dan perlu dicatat bahwa sekolah yang hendak didirikan oleh perkumpulan ini kemungkinan besar tidak sama bentuknya dengan sekolah Tionghoa pada masa sebelum Orde Baru, tetapi lebih mungkin kepada bentuk sekolah dwi bahasa atau tri bahasa (2012: 80).

Wacana tentang budaya tradisional juga nampak pada artikel tentang Basuki Tjahaja Purnama di *Jawa Pos* tahun 2014. Pertentangan antara budaya tradisional dengan wacana agama Kristen ditampilkan di sini. Sekali lagi kita melihat identitas budaya yang terpecah dan diartikulasikan oleh berbagai wacana (Hall 1990). Cara pandang identitas budaya secara esensial terkesan melalui pelestarian budaya Tionghoa (yang esensial), namun pelestarian budaya ini di *Jawa Pos* dipertentangkan dengan cara pandang identitas budaya anti-esensial, yang terwujud melalui retaknya identitas budaya esensial, karena wacana-wacana yang lain, seperti agama, telah ikut mengkonstruksi identitas itu.

Selain kontestasi budaya tradisional versus wacana modern, aspek historis serta filosofi Tionghoa juga mempengaruhi sudut pandang *Harian Nusantara*. Misalnya dari segi perbedaan konten surat kabar, *Harian Nusantara* di halaman pertama hampir selalu memuat berita kegiatan presiden. Hal ini cukup kontras dengan *Jawa Pos*, yang memiliki konten

berita halaman pertama yang bervariasi. Dalam hal ini presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, memiliki tempat yang penting pada sudut pandang etnis Tionghoa. Sejak era Sukarno hingga kini, berbagai presiden di Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda-beda dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup etnis Tionghoa. Ini membuat etnis Tionghoa menempatkan presiden sebagai sebuah sosok yang berpengaruh, sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Selain aspek historis ini, aspek budaya Tionghoa sendiri, khususnya etika Konfusianisme, yang menekankan kesetiaan dan bakti kepada pemimpin, dan pemimpin haruslah menjadi teladan dan memiliki moral yang baik (Chan 2008: 15), turut memberikan pengaruh. Sejak reformasi tahun 1998, pemimpin negara berperan penting dalam menjalankan reformasi, termasuk mengikis diskriminasi. Secara keseluruhan, etnis Tionghoa menaruh harapan besar pada presiden.

Pengaruh budaya Tionghoa juga terlihat pada materi non-editorial seperti iklan. *Jawa Pos* memuat lebih banyak iklan-iklan komersial. Karena segmen pembaca yang lebih umum dan dari beragam kalangan, maka pemasang iklan komersial akan lebih diuntungkan bila memasang iklannya di *Jawa Pos*. Sedangkan segmen pembaca *Harian Nusantara* yang hampir semuanya adalah etnis Tionghoa, kurang menarik pemasang iklan komersial umum. Namun di lain pihak, kita justru menemukan bentuk-bentuk iklan yang berbeda di *Harian Nusantara*, seperti dominannya iklan yang dipasang oleh pembaca, namun bukan bersifat komersial, melainkan bersifat ucapan, baik ucapan selamat maupun belasungkawa. Maka terjadi komodifikasi terhadap peristiwa-peristiwa selebrasi maupun dukacita ini, menjadi sebuah komoditas. Kentalnya pengaruh budaya Tionghoa yang menekankan *face (mianzi)* atau ‘rasa *self-respect*’, membuat aspek *face* ini pun mengalami komodifikasi.

4.3.4 Ketionghoan Esensial

Aspek ketionghoan esensial masih cukup kental terlihat di *Harian Nusantara*. Misalnya pada topik tentang komunitas atau organisasi Tionghoa. Pada terbitan 2003, pada

artikel liputan tentang komunitas alumni sekolah Lianhe Surabaya di *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara*, terdapat perbedaan di kedua artikel tersebut. Artikel di *Jawa Pos* lebih bersifat non-formal, dengan gaya liputan yang santai. Sedangkan artikel di *Harian Nusantara* lebih bernada formal, dengan penekanan bukan pada sekedar temu kangen reuni, tetapi pada agenda pendirian organisasi alumni pada acara tersebut. Artikel di *Jawa Pos* lebih menekankan pada reuninya, dengan menjabarkan bagaimana mereka bertemu kembali setelah berpisah sekian lama, serta suasana haru yang muncul dari kalangan mantan guru, hingga bagaimana proses mereka mencari kembali kontak para alumni yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Sedangkan di *Harian Nusantara*, fokus artikel jelas kepada pentingnya organisasi alumni. Pendirian organisasi ini adalah momen khusus yang sangat penting bagi para alumni. Organisasi alumni merupakan wadah mereka mengidentifikasi diri dalam identitas kolektif, sebagai alumni sebuah sekolah, dan bersama-sama memiliki warisan budaya kolektif, yakni budaya Tionghoa yang diajarkan di sekolah tersebut. Ini ditandai pula dengan sambutan meriah para alumni saat organisasi alumni resmi berdiri, sehingga mampu mewadahi mereka untuk ‘kembali’ ke sekolah mereka itu. Identitas generasi tua di sini bisa dianggap mewakili cara pandang pertama tentang identitas menurut Hall (1990), yakni memiliki pengalaman sejarah yang sama sebagai alumni sekolah yang sama. Penekanan tentang kegiatan komunitas yang berbeda juga menunjukkan hal ini. Di *Jawa Pos*, digambarkan kegiatan komunitas ini hanya sekedar silaturahmi, sebagai sarana menjaga hubungan antar alumni, dan hanya sekilas disebutkan tentang kegiatan sosial yang dilakukan komunitas ini, tapi tanpa penjelasan konkrit. Sedangkan di *Harian Nusantara* dikatakan bahwa kegiatan yayasan ini sangat berarti, karena kegiatan sosial yang dilakukan telah banyak membantu rekan-rekan guru yang mengalami kesusahan. Selain tentunya mereka juga mempunyai misi besar yayasan yakni membangun sekolah.

Pada analisis artikel di *Jawa Pos* tentang etnis Tionghoa di yang berprofesi sebagai dokter, pada argumen tentang penyebutan ‘Tionghoa’ atau ‘China, juga dimunculkan kembali sumbu ketionghoan esensial (sumbu persamaan dan kesinambungan (Hall 1990: 230)), yang masih berpusat pada Tiongkok. Kerangka referensi yang diajukan oleh orang Tionghoa di Indonesia dalam hal ini masih pada negara Tiongkok, yang dipandang sebagai pusat ketionghoan (esensial).

4.3.5 Etnisitas yang Kuat

Pada analisis artikel tentang kriminalitas oleh etnis Tionghoa, perbedaan yang langsung terlihat dari kedua surat kabar adalah *Harian Nusantara* sangat jarang memberitakan berita semacam ini. Alasan yang mungkin bisa menjelaskan adalah, sebagai surat kabar etnis, yang tentunya menyuarakan aspirasi etnis Tionghoa, surat kabar ini cenderung akan menjaga citra positif dari etnis Tionghoa. Selain itu, pemberitaan kriminalitas semacam ini biasanya sudah banyak diekspos di surat kabar arus utama, sehingga pembaca dapat mengikuti perkembangannya dengan lebih cepat dari surat kabar arus utama. *Harian Nusantara* lebih memfokuskan pada pandangan etnis Tionghoa terhadap kasus semacam ini.

Dalam peristiwa penganiayaan pembantu rumah tangga oleh etnis Tionghoa, kita juga menemui perbedaan serupa, bahwa *Harian Nusantara* cenderung untuk mengecilkan citra negatif etnis Tionghoa. Untuk meredam hal ini serta secara bersamaan meredam pula kemungkinan munculnya konflik antar etnis, *Harian Nusantara* memunculkan wacana ‘tandingan’ yakni pernyataan sikap mengutuk perilaku kejahatan dan himbauan kepada etnis Tionghoa untuk terus menjaga hubungan baik antar etnis.

Sedangkan *Jawa Pos* cenderung memunculkan citra positif pada etnis Tionghoa yang telah berjasa atau berperan besar bagi masyarakat. Keempat artikel tentang tokoh Tionghoa, baik di *Jawa Pos* maupun di *Harian Nusantara* menggambarkan sosok orang Tionghoa

dengan citra yang positif (termasuk *Harian Nusantara* yang menampilkan profesi tukang becak sekalipun).

Bila kita melihat proses pembentukan citra positif di atas, maka citra positif sebagai sebuah ‘identitas’ etnis Tionghoa ternyata juga dibentuk oleh titik temu wacana-wacana tertentu, seperti kerukunan antar etnis, peran serta dan sumbangsih etnis Tionghoa bagi bangsa. Citra positif ini pun juga bersaling-silang dengan wacana sisi negatif etnis Tionghoa, misalnya kriminalitas yang dilakukan oleh mereka. Dan kita lihat di sini bahwa ‘penentuan’ citra positif ini adalah yang dikatakan oleh Hall (1996c) sebagai ‘signifikansi politis’ dari identitas. Sifat identitas yang plastis, membuatnya bisa ‘digeser’ dan ‘diarahkan’ karakteristiknya. Etnisitas pun menjadi ‘kontekstual’, dikonstruksi secara historis, budaya dan politis.

4.3.6 Tionghoa sebagai Kelompok Etnis yang Homogen versus Heterogen

Pada analisis artikel tentang bagaimana etnis Tionghoa menyikapi pemilu 2004, kita mengetahui bahwa *Harian Nusantara* mengkonstruksi ketionghoan sebagai suatu entitas yang heterogen. Heterogenitas ini ditunjukkan lewat adanya beberapa jenis ketionghoan yang berbeda melalui sikap mereka terhadap pemilu. Aspek historis berperan besar di sini, karena histori membentuk identitas yang khusus. Ini ditunjukkan lewat berbagai peristiwa anti Tionghoa di Indonesia di masa lalu, yang turut membentuk identitas Tionghoa yang berbeda. Di satu sisi, muncul ketionghoan yang menolak ikut serta dalam politik, di sisi lain, muncul pula ketionghoan yang menghendaki berperan aktif dalam politik.

Sedangkan di *Jawa Pos*, tidak ada wacana semacam ini. Pada analisis artikel tentang penganiayaan pembantu rumah tangga, *Jawa Pos* cenderung mengkonstruksi subjek etnis Tionghoa dengan identitas yang homogen sebagai ‘satu masyarakat Tionghoa’, namun bisa ‘berpindah’ identitas menjadi bagian dari pribumi (dari tarikan wacana keberpihakan, dalam hal ini memihak korban, memihak yang lemah). Diambilnya tokoh Lin Wuyuan sebagai

‘wakil’ dari seluruh masyarakat Tionghoa menunjukkan homogenitas ini. Sedangkan *Harian Nusantara* tidak memosisikan Lin Wuyuan sebagai wakil seluruh masyarakat Tionghoa, tetapi hanya mewakili satu komunitas Tionghoa. Sehingga *Harian Nusantara* mengkonstruksi identitas Tionghoa yang heterogen, namun perlu bersatu (atau, meminjam istilah Hall (1996b), *diartikulasikan*) dengan wacana-wacana yang sama yakni integrasi sebagai bangsa, toleransi dan multikultural.

Artikel tentang upacara bendera di Pasar Atom, yang dimuat di *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara* pada tahun 2013, juga menyatakan hal yang serupa. Di *Jawa Pos*, etnis Tionghoa cenderung diidentikkan dengan kelompok pengusaha, dan mereka dipandang sebagai sebuah entitas yang homogen. Sedangkan di *Harian Nusantara*, dideskripsikan perwakilan etnis Tionghoa dari kelompok mana saja yang hadir pada upacara tersebut, sehingga etnis Tionghoa dikonstruksikan sebagai etnis yang heterogen.

Kontestasi persepsi etnis Tionghoa yang homogen dan heterogen di sini menunjukkan konsepsi Hall tentang identitas yang ‘kurang esensialis’ (Hall 1990). Persepsi bahwa etnis Tionghoa adalah homogen merupakan sebuah pandangan esensialis, yang terutama berasal dari sudut pandang golongan pribumi. Bila kita telaah lebih jauh, ini tentu berhubungan juga dengan sejarah panjang etnis Tionghoa yang dijadikan ‘kambing hitam’ di masa kolonial, hingga menimbulkan sekat tebal dan kecemburuan sosial dari kaum pribumi. Dilanjutkan pula dengan politik Orde Baru yang juga mengesensialkan etnis Tionghoa sebagai ‘binatang ekonomi’. Pandangan ini tidak bisa sepenuhnya hilang, karena konteks etnis Tionghoa di Indonesia yang selalu berada dalam wacana sejarah seperti ini. Namun persepsi heterogen muncul menjadi sebuah pandangan anti esensialis, yang telah ‘memecah’ ketionghoaan menjadi banyak versi. Walau tentunya ragam ketionghoaan yang ditampilkan oleh *Harian Nusantara* juga masih bisa didekonstruksi, karena *Harian*

Nusantara tentunya tidak bisa mewakili semua golongan Tionghoa, tetapi juga akan ‘bias’ dalam taraf tertentu ke suatu atau sekelompok golongan.

4.3.7 Negosiasi Sekat Antar Etnis, Integrasi versus ‘Pembauran’

Pada analisis artikel tentang budaya Tionghoa, di masa kini, didapatkan bahwa artikel *Jawa Pos* lebih menyetengahkan aspek kesamarataan antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya. Ini ditunjukkan dengan lebih kuatnya wacana tentang kerukunan dan keberagaman, daripada wacana tentang keagamaan dan budaya Tionghoa itu sendiri, yang kurang dijelaskan dengan detil. Maka dari sudut pandang arus utama (atau etnis selain Tionghoa), etnis Tionghoa dipandang sebagai etnis yang memiliki budayanya sendiri, tetapi bisa secara luwes saling berinteraksi dengan budaya etnis lainnya, bahkan hingga terjadi percampuran unsur kesenian dari agama yang lain sekalipun. Interaksi ini lebih menjurus kepada pembauran tanpa batas. Sedangkan *Harian Nusantara* lebih mengemukakan posisi etnis Tionghoa sebagai etnis dengan budaya yang khas, namun tidak serta merta berakulturasi dengan budaya yang lain. Wacana tentang kerukunan yang ditampilkan adalah lebih pada: etnis Tionghoa bisa berinteraksi secara sosial dengan elemen masyarakat lainnya, namun tetap ada sekat yang cukup jelas untuk membedakan masing-masing budaya, dan kerukunan ini masih berupa proses, tidak langsung terjadi. Maka dalam konteks identitas, melalui artikel ini, *Harian Nusantara* membangun identitas etnis Tionghoa dengan tetap memberikan sekat antara etnis tersebut dengan sang Liyan. Kemungkinan melintasi sekat ini tetap ada, namun masih berupa proses. Sedangkan *Jawa Pos* mencoba membangun kesan ketionghoan yang sangat cair, dengan sekat yang sangat samar.

Pada analisis artikel tentang peringatan hari kemerdekaan di tahun 2013, *Jawa Pos* sekali lagi menampakkan ketionghoan yang cair, yang mampu berbaur dengan etnis yang lain tanpa adanya sekat, bahkan dengan masyarakat kalangan bawah sekalipun (ditunjukkan dengan kontras ‘pengusaha dan tukang becak’). Ini berbeda dengan *Harian Nusantara*, yang

meskipun juga menunjukkan foto pembagian bingkisan kepada tukang becak, namun di dalam artikel tidak disebutkan masyarakat golongan bawah yang hadir.

Sedangkan pada analisis artikel tentang penganiayaan pembantu rumah tangga, *Jawa Pos* cenderung memposisikan etnis Tionghoa berpihak pada korban yang Pribumi, tidak memihak pelaku yang Tionghoa. Sedangkan *Harian Nusantara* tidak memunculkan wacana keberpihakan seperti ini. Dengan wacana keberpihakan di *Jawa Pos*, terlihat adanya dinamika pada sekat antar etnis. Dengan memihak pada korban yang Pribumi, maka etnis Tionghoa (di sini diwakili oleh Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya) telah melintasi sekat itu. Secara implisit, ini adalah apa yang diharapkan oleh kalangan arus utama, atau Pribumi. Menilik teori Hall, hal ini bisa dipahami sebagai perlintasan batas-batas wacana seperti kelas, gender dan etnisitas, dalam bentukan artikulasi sebagai subjek (sebagai sebuah identitas) (Hall 1996a: 444). Tetapi di *Harian Nusantara*, sekat ini relatif dipertahankan, terlebih karena wacana yang dimunculkan adalah wacana integrasi, serta multikulturalisme. Maka terlihat bahwa sekat perbedaan antar etnis masih dipertahankan, namun ada negosiasi atau dinamika pada sekat tersebut, dengan artian bahwa sekat itu melanggengkan perbedaan atau menghargai perbedaan.

Pada analisis dua artikel tahun 2003 tentang nasionalisme etnis Tionghoa, artikel di *Jawa Pos* mengangkat wacana kerukunan antar etnis dan antar kelas sosial. Wacana ini menyoroti bahwa dalam keseharian, kesempatan etnis Tionghoa ‘berbaur’ dengan etnis yang lain masih kurang. ‘Pembauran’ melalui interaksi antar etnis yang akrab ini perlu diperkuat dan digalakkan lagi. Wacana integrasi juga dimunculkan, walaupun tidak terlalu eksplisit. Sedangkan pada artikel di *Harian Nusantara*, konsep integrasi sekali lagi menjadi wacana utama. Etnis Tionghoa dipandang sebagai bagian penting dari bangsa Indonesia. Oleh karenanya, etnis Tionghoa perlu berperan aktif bersama etnis-etnis yang lain dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih demokratis. Bentuk persatuan dengan

etnis lain di sini berbeda dengan artikel di *Jawa Pos*, karena di sini lebih berarti ‘bersama-sama berjalan ke arah yang sama’, dan tidak terlalu nampak makna ‘berjalan bergandengan’, seperti wacana kerukunan di *Jawa Pos*.

Pada analisis artikel peringatan hari kemerdekaan RI tahun 2013 di *Harian Nusantara*, penampilan kesenian Tionghoa seperti *wushu* dalam upacara bendera menunjukkan pula kesan multikultural dan semangat integrasi, bukan asimilasi. Maka konsep identitas Tionghoa dalam kaitannya dengan identitas nasional, dalam *Harian Nusantara* jelas diungkapkan melalui menempatkan identitas Tionghoa sebagai salah satu bagian dari identitas nasional, dan etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini tentu masih merupakan sebuah proses konstruksi, seperti yang dikatakan Hall (1990), identitas terus mengalami konstruksi di dalam permainan sejarah, budaya dan kekuasaan. Titik penempatan yang dihasilkan dalam permainan ini, antara berbagai wacana (1990: 226) (dalam topik ini wacana pembauran dan wacana multikultural serta integrasi) menghasilkan konstruksi identitas Tionghoa yang tertentu. Pengajuan konsepsi identitas Tionghoa dalam konteks multikulturalisme dan integrasi juga masih bergantung pada faktor pemegang kekuasaan, apakah bisa diterima atau tidak (Suryadinata 1998).

4.3.8 Etnis Tionghoa sebagai Warga Negara Indonesia

Topik ketiga analisis wacana adalah mengenai hak etnis Tionghoa sebagai warga negara. Pada terbitan 2003, topik yang digunakan adalah momen diakuinya hari raya Imlek sebagai hari libur nasional. Dari kedua artikel yang sebenarnya adalah artikel yang sama, yakni esai tahun baru Imlek oleh Amien Rais, tetap terdapat beberapa perbedaan. Yang paling terasa adalah lebih kuatnya kesan anti diskriminasi pada *Harian Nusantara*, serta ditekankannya adanya kontribusi warga Tionghoa bagi bangsa. Walau demikian, secara keseluruhan, kedua koran dalam hal ini mempunyai agenda yang sama, yakni memang seharusnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dihilangkan.

Di *Harian Nusantara*, pada artikel tahun 2003 tentang sikap etnis Tionghoa menjelang pemilu 2004, tampak pula tampilan beberapa jenis ketionghoan yang berbeda pada etnis Tionghoa di Indonesia, terkait dengan aspek nasionalisme, mulai dari yang merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, hingga yang tidak merasa menjadi bagiannya. Dalam konteks pemilu ini, dalam ‘pertarungan ideologi’, dalam pergeseran makna mengenai menjadi Tionghoa, yang terus-menerus terjadi, posisi strategis yang diambil oleh masing-masing potret ketionghoan, merupakan perwujudan dari identitas nasional etnis Tionghoa yang beragam coraknya. Di sini kuasa budaya yang berpengaruh dalam pembentukan identitas adalah wacana identitas nasional. ‘Bagaimana sesungguhnya menjadi bagian bangsa Indonesia’ merupakan pertanyaan yang melandasi bentukan identitas nasional di sini. Berbagai perbedaan yang ada mengenai ‘rasa menjadi bangsa’, dipengaruhi oleh pertanyaan ini. Di sini politik identitas (nasional) mempengaruhi etnis Tionghoa ‘memilih’ taraf rasa kebangsaannya (Hall 1996c).

Pada analisis artikel tentang perubahan istilah “Cina” menjadi “Tionghoa”, di *Harian Nusantara* lebih ditekankan sosok presiden SBY yang menghimbau agar istilah Tionghoa kembali dipakai. Wacana antidiskriminasi juga dengan tegas lebih ditekankan di sini. Maka kita melihat bahwa *Jawa Pos* membangun wacana tentang etnis Tionghoa adalah warga negara Indonesia, dan keberagaman dalam konteks kebhineka-tunggal-ika-an. Sedangkan *Harian Nusantara* membangun wacana antidiskriminasi khususnya kepada etnis Tionghoa, dengan didukung oleh keputusan presiden sendiri, secara legal.

Artikel mengenai dr Tedja di *Jawa Pos* menyelipkan wacana tentang pro dan kontra penyebutan “China” atau “Tionghoa”. Dr Tedja dalam hal ini merupakan salah satu yang pro sebutan “China”, namun tidak diketengahkan alasan yang cukup logis dalam mendukung argumentasi ini. Pun, tidak diungkapkan mengapa dan asal-usul kata “China” bisa berkonotasi menghina. Hal yang serupa juga tampak di terbitan masa kini, pada artikel

tentang Ahok di *Jawa Pos*, melalui pernyataan bahwa bukan masalah rasial yang menyebabkan etnis Tionghoa sulit berkecimpung di bidang selain bisnis, tetapi masalah kesempatan. Maka masalah diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa pada masa Orde Baru terkesan ‘diperlunak’ oleh *Jawa Pos*.

Pada analisis artikel upacara bendera peringatan hari kemerdekaan, *Harian Nusantara* lebih menyoroti para tokoh penting yang hadir, dalam hal ini dengan penekanan pada petinggi polisi dan militer yang ikut menghadiri upacara, yang dijadikan sub judul artikel. Agenda *Harian Nusantara* melalui artikel ini bukanlah kepada penekanan kerukunan antar etnis, melainkan lebih kepada nasionalisme etnis Tionghoa. Selain perwujudan nasionalisme melalui upacara, diadinkannya acara oleh para petinggi militer dan anggota muspida, seolah hendak menunjukkan bahwa posisi etnis Tionghoa sebagai warga negara yang loyal kepada Indonesia telah paling tidak mendapatkan ‘pengakuan’. Secara tak langsung, tersirat pula konsep anti diskriminasi, bahwa etnis Tionghoa adalah warga negara Indonesia dan bagian dari bangsa Indonesia, memiliki hak yang setara dengan warga negara yang lain.

4.3.9 Stereotip terhadap Etnis Tionghoa

Dari perbandingan kedua surat kabar, pada tahun 2003, didapatkan bahwa melalui pemberitaan tentang hari raya Imlek, *Jawa Pos* cenderung menggambarkan etnis Tionghoa sebagai kelompok ekonomi kuat, yang merayakan Imlek dengan mewah, lengkap pula dengan pernak-pernik yang berhubungan dengan kekayaan, seperti hujan sebagai penanda keberuntungan, dan pembagian *angpao* lengkap dengan nominalnya. Sedangkan dalam liputan dengan tema yang sama, *Harian Nusantara* cenderung menekan wacana semacam itu. Di sini kita melihat masih adanya stereotip bahwa etnis Tionghoa adalah golongan ekonomi menengah ke atas, dan cenderung mengejar ‘keuntungan finansial’ belaka, yang ditampilkan oleh *Jawa Pos*.

Dari kedua artikel pada terbitan masa kini tentang peringatan hari kemerdekaan RI tahun 2013, terdapat perbedaan kesan mengenai etnis Tionghoa mengikuti upacara bendera. Dari sudut pandang *Jawa Pos*, hal ini terkesan sebagai sesuatu yang ‘luar biasa’, yang ditunjukkan dengan penggunaan kata-kata seperti ‘uniknya’, ‘tak tanggung-tanggung’. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana stereotip dari arus utama terhadap etnis Tionghoa yang masih sedikit ‘meragukan’ nasionalisme mereka.

Dari berita tentang tertangkapnya pembunuh Lydia di tahun 2003, mahasiswa UK Petra, kita mengetahui persepsi stereotipikal dari etnis lain terhadap etnis Tionghoa, dalam hal mengkonstruksi sebuah identitas Tionghoa menurut mereka. Dari persepsi ini, terlihat konstruksi mereka masih mengarah ke hal-hal fisik, seperti ras dan keturunan, serta nama tipikal dari bahasa Tionghoa. Dan memang menurut Hall (1997a), stereotip mereduksi, mengesensialisasikan, mengalamiahkan dan menetapkan perbedaan-perbedaan (1997a: 258), sehingga stereotip turut menentukan siapa ‘kita’ dan siapa ‘mereka’. Namun demikian tidak ditemukan stereotip negatif terhadap etnis Tionghoa lewat pemberitaan kriminalitas etnis Tionghoa semacam ini.

Pada topik mengenai tokoh Tionghoa, terbitan 2003 mengambil artikel tentang dua orang tokoh Tionghoa yang berbeda, artikel di *Jawa Pos* mengulas seorang dokter Tionghoa, sedangkan di *Harian Nusantara* mengulas seorang tukang becak Tionghoa. Sedangkan pada terbitan masa kini, diulas tokoh Ahok di kedua surat kabar. Dari keempat artikel, semuanya menyiratkan wacana bahwa etnis Tionghoa tidak harus hanya berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha. Mereka juga bisa berkiprah di berbagai bidang yang lain. Sehingga semua artikel ini mendukung wacana anti diskriminasi dalam hal profesi orang Tionghoa. Dari keempat artikel, profesi tukang becak yang disajikan oleh *Harian Nusantara* mungkin adalah yang paling unik. Wacana yang disajikan di sini selain menggugat stereotip umum Tionghoa sebagai pedagang, juga mendobrak stereotip mengenai kelas sosial orang

Tionghoa yang umumnya dianggap merupakan masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas. Wacana ini hendak menunjukkan bahwa sebenarnya banyak juga orang Tionghoa miskin.

4.4 Interpretasi Keseluruhan terhadap Temuan dan Diskusi

Dari keseluruhan temuan melalui analisis wacana serta pembacaan dengan referensi teori identitas Stuart Hall, kita bisa melihat bagaimanakah makna menjadi Tionghoa di masa kini, melalui wacana yang dibentuk oleh dua jenis surat kabar, yakni surat kabar arus utama dan surat kabar Tionghoa. Dari perbandingan kedua surat kabar, ada berbagai pertentangan atau oposisi biner yang muncul, baik antar surat kabar, maupun di dalam surat kabar yang sama, terkait dengan konstruksi ketionghoan. Dari analisis, terkesan bahwa *Harian Nusantara* mengambil posisi ‘kita’ Tionghoa, yang bermakna produsen dan konsumen serta isi teks adalah Tionghoa, sedangkan *Jawa Pos* mengambil posisi ‘mereka’ Tionghoa, yang bermakna produsen dan konsumen teks adalah semua etnis namun lebih condong kepada yang ‘bukan Tionghoa’, dan isi teks adalah tentang ‘mereka’ Tionghoa. Aspek peliyanan ini masih terlihat di kedua surat kabar, walau ada beberapa hal yang sama di antara kedua surat kabar, misalnya wacana tentang pluralisme, kerukunan antar etnis.

Dalam hal esensialisme strategis, terlihat ada perbedaan antara *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara* dalam ‘strategi’ menentukan titik temu identitas dalam berbagai pertarungan wacana. *Jawa Pos* masih memiliki jejak-jejak stereotipikal warisan Orde Baru, yang memandang etnis Tionghoa berdasarkan esensialisasi kelas dan ras. Sedangkan *Harian Nusantara*, walau menunjukkan bahwa etnis Tionghoa itu tidaklah homogen, namun karena kentalnya wacana integrasi, multikulturalisme yang dibawa oleh *Harian Nusantara*, konstruksi ketionghoan heterogen yang dimunculkan terkesan mengabaikan persepsi Pribumi, atau lebih cenderung untuk ‘heterogen di dalam homogen’ ketionghoan esensial yang masih mengacu pada ‘akar’ yakni Tiongkok. Ia heterogen bila diperhadapkan dengan persepsi Pribumi yang homogen tentang ketionghoan, namun menjadi homogen bila

diperhadapkan dengan ragam ketionghoan ‘terakulturasi’ yang sudah menjadi ‘daun’ yang jauh dari ‘akar’. Maka di sini kita melihat adanya kesadaran atas sub etnis, atas keragaman di dalam etnis, yang lebih kuat pada internal kelompok etnis itu sendiri, dan cenderung lebih lemah atau tidak terlihat dari sudut pandang eksternal kelompok. Sedangkan di dalam internal kelompok etnis Tionghoa sendiri, tidak selalu mengakui dan menyetujui ketionghoan yang beragam, tetapi lebih mengakui wacana ketionghoan menurut versi mereka sendiri, yang sebenarnya juga homogen esensial.

Berkaitan dengan ketionghoan ‘akar’ atau esensialis tersebut, identitas hibrid muncul pada konstruksi ketionghoan di *Harian Nusantara*, yang meleburkan identitas ‘akar’, identitas transnasionalisme atau global pan-Tionghoa, serta identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan dari sudut pandang arus utama, ketionghoan hibrid semacam ini tidak muncul. Sehingga dari sudut pandang *Jawa Pos*, ketionghoan masih terkesan sebagai identitas tunggal, yang berbeda dengan identitas etnis lainnya, namun seiring perkembangan reformasi, yang lebih menekankan wacana multikultural dan pluralisme, identitas ‘tunggal’ tersebut sudah dianggap sebagai bagian dari kebhinekaan Indonesia. Maka selain adanya kesadaran sub etnik, kesadaran sebagai bagian dari diaspora Tionghoa di seluruh dunia, ikut membentuk ketionghoan yang dipersepsi oleh internal kelompok etnis Tionghoa. Sedangkan dari sisi eksternal kelompok etnis, lebih cenderung melakukan stereotipikasi yang menghasilkan ketionghoan yang tunggal.

Polarisasi yang lain terlihat pada wacana tentang pembauran versus integrasi. *Jawa Pos* lebih mengedepankan ‘pembauran’, sedangkan *Harian Nusantara* mengedepankan integrasi. ‘Pembauran’ di sini bukanlah asimilasi total seperti zaman Orde Baru, melainkan sebuah bentukan kepedulian antar etnis dan kelas. Polarisasi ini membawa pada benturan lainnya yakni akulturasi dan multikulturalisme. Terlihat bahwa pemikiran arus utama lebih menempatkan budaya etnis Tionghoa sebagai sebuah konstruksi yang cair, mudah melebur

dengan budaya lain. Sedangkan konsep integrasi dan multikulturalisme yang diketengahkan *Harian Nusantara* lebih menonjolkan saling menghargai dalam ‘koridor’ masing-masing, tanpa saling mempengaruhi dan mengganggu. Polarisasi stereotipikal juga masih terlihat seperti tradisional versus modern, kelas kaya-miskin, profesi pengusaha versus non-pengusaha, dan sebagainya. *Harian Nusantara* berusaha ‘menghapus’ stereotip-stereotip semacam ini dengan memunculkan wacana tandingan, maupun dengan cara menekan citra negatif etnis Tionghoa dan menyuarakan sisi positif serta kekuatan budaya Tionghoa. Maka terlihat adanya negosiasi dalam mempertahankan sekat antar kelompok etnis. Dalam internal etnis Tionghoa sendiri, pelintasan sekat ternyata tidak diusahakan secara aktif, tetapi sekat itu justru ditegaskan. Dari eksternal kelompok, sekat ini kadang hendak dihilangkan, namun kadang juga masih dipertahankan dengan adanya berbagai stereotipikasi yang masih berlangsung.

Dari semua hal di atas, kita melihat bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, ketionghoan di Indonesia telah mengalami pergeseran-pergeseran, yang menunjukkan betapa kompleksnya ketionghoan dari segala tarik-menarik oposisi biner yang ada dari analisis wacana kedua surat kabar. Terlepasnya etnis Tionghoa dari kekang stereotip dan diskriminasi Orde Baru, membuat identitas Tionghoa menjadi semakin terpecah, semakin tidak menyatu. Hal ini selain menunjukkan bahwa ‘proses menjadi’ adalah sangat penting untuk dicermati, juga memperlihatkan bahwa berbagai dikotomi yang terlalu simplistik sebenarnya tidak cukup ‘baik’ untuk menjelaskan siapakah orang Tionghoa itu. Posisi kurang esensial, atau esensial strategis yang diambil oleh tesis ini berdasarkan referensi kerangka teori identitas Stuart Hall, telah memperlihatkan gambaran bahwa esensialisme ternyata masih dan terus direproduksi oleh etnis Tionghoa itu sendiri. Ketionghoan esensial seperti ini tidak bisa sepenuhnya hilang. Tetapi yang lebih menjadi perhatian kita adalah ‘strategi’ memutus perkembangan makna identitas hingga mencapai ‘identitas’ yang

diinginkan oleh kuasa tertentu. Kedua surat kabar telah menunjukkan ‘strategi’ yang berbeda-beda, yang tentu pada akhirnya menghasilkan konstruksi ketionghoan yang berbeda-beda pula.

Dari ketionghoan yang ditampilkan oleh kedua surat kabar, pergeseran konstruksi ketionghoan pada tahun 2003 hingga tahun 2013-2014, terlihat pada berkurangnya stereotip (negatif) terhadap etnis Tionghoa warisan Orde Baru yang tampil pada *Jawa Pos*. Terlihat pula semakin menguatnya wacana pelestarian budaya etnis, dalam hal ini budaya Tionghoa, di *Jawa Pos*. Sedangkan di *Harian Nusantara*, tidak terlihat pergeseran yang berarti. Konstruksi ketionghoan yang ditampilkannya relatif sama, sejak 2003 hingga 2013-2014. Pergeseran yang terlihat di sini menunjukkan bahwa dari sudut pandang arus utama (Pribumi), cenderung sudah semakin mengakui etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, seperti etnis-etnis yang lain. Sedangkan dari sudut pandang media Tionghoa sendiri, konstruksi ketionghoan yang mereka kumandangkan dan perjuangkan relatif tidak berubah, karena konstruksi itu yang dianggap paling ‘ideal’ oleh mereka.

Ketionghoan yang beragam ini membuat kita kembali pada pertanyaan di bab pendahuluan, apakah ketionghoan itu sungguh ada? Apabila kita mengacu kepada konsep anti-esensialis, atau yang dikatakan Hall (1996c) sebagai ‘ketidakmungkinan’ identitas, dimana identitas merupakan titik temu tak stabil dari berbagai wacana yang tidak saling berkaitan, maka bisa dikatakan bahwa identitas itu ‘tak mungkin’. Ketionghoan bisa saja digantikan dengan kejawaan, kesundaan, dan sebagainya, karena semuanya sama-sama tersusun akibat wacana-wacana yang tidak saling berkaitan, tidak ada aspek tertentu yang bisa dikatakan spesifik ‘Tionghoa’, atau ‘Jawa’, atau ‘Sunda’. Namun dengan konsep Hall tentang ‘kurang esensial’nya atau esensialis strategis mengenai identitas, telah membantu kita menyimpulkan bahwa titik temu tak stabil itu ditentukan oleh ‘strategi’ tertentu, sebuah ‘politik identitas’ tertentu. Sehingga ketionghoan itu bisa menjadi ‘mungkin’, seperti yang

ditunjukkan melalui ragam ketionghoan yang ditampilkan oleh kedua surat kabar. Persepsi yang berbeda-beda mengkonstruksi ketionghoan yang berbeda-beda pula. Jadi yang bisa kita katakan adalah, ketionghoan ‘esensial’ itulah yang tidak nyata, sedangkan ketionghoan sendiri adalah sebuah proses ‘menjadi’.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan analisis, perbandingan antara *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara*, didapatkan bahwa *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara* memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari segi struktur, terlihat bahwa secara garis besar, *Jawa Pos* dan *Harian Nusantara* memiliki bagian-bagian yang sama dalam kategori-kategori beritanya. Sedangkan dari segi konstruksi identitas Tionghoa, masing-masing juga mengungkap ketionghoan yang berbeda.

Konsep identitas yang bergeser dari pusat, atau konsep anti esensialis tentang identitas, mewarnai konstruksi tersebut. Berbagai wacana, seperti kelas sosial, agama, rasa nasionalis, turut menyusun konstruksi identitas Tionghoa, membuat makna ‘menjadi Tionghoa’ terus berubah. Berdasarkan konsep esensialis strategis Hall, ‘strategi’ yang memutuskan titik identitas inilah yang terus berkembang dan berbeda-beda. Berbagai wacana yang berkembang, seperti multikulturalisme dan pluralisme di masa reformasi, menjadi unsur-unsur tambahan pembentuk identitas. *Harian Nusantara* juga mengetengahkan identitas hibrid yang terwujud lewat transnasionalisme, komunitas bayangan etnis Tionghoa di seluruh dunia dengan mengacu kepada Tiongkok sebagai pusatnya. Selain benar-benar menjadi bagian dari bangsa Indonesia, konstruksi ini juga memunculkan unsur bahwa etnis Tionghoa adalah mediator antara hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Adanya kesan sekat yang cair yang terlihat di *Harian Nusantara*, yaitu antara hubungan Indonesia (melalui etnis Tionghoa) dan Tiongkok, menunjukkan hal ini. Sementara di *Jawa Pos*, batasan antara Indonesia dan Tiongkok lebih nampak jelas.

Unsur budaya Tionghoa juga mewarnai konstruksi identitas. *Harian Nusantara* terlihat lebih banyak menekankan hal ini, terutama lewat pendidikan bahasa dan budaya (tradisional) Tionghoa. Sedangkan *Jawa Pos* walau juga menyajikan konstruksi serupa, namun tidak terlalu ditekankan. Misalnya dalam komunitas Tionghoa, *Harian Nusantara* lebih menyoroti misi budaya komunitas itu untuk mendidik generasi muda Tionghoa dengan bahasa dan budaya Tionghoa. Sedangkan *Jawa Pos* hanya menyajikan ‘nampak luar’ dari komunitas tersebut, belum menghubungkan konstruksi identitas dengan misi budaya. Demikian pula pengaruh budaya Tionghoa terhadap struktur surat kabar, lebih nampak pada *Harian Nusantara*, seperti ditampilkannya berita tentang presiden secara konsisten di halaman pertama, yang dipengaruhi etika Konfusianisme tentang pemimpin sebagai teladan. Demikian pula dengan konsep *face value* yang terwujud pada lebih banyaknya pemasangan jenis iklan ucapan daripada *Jawa Pos*.

Aspek ketionghoan esensial juga masih ada di kedua surat kabar. Misalnya dalam komunitas Tionghoa, *Harian Nusantara* mengkonstruksi identitas Tionghoa yang perlu untuk kembali ke ketionghoan asal, dalam hal ini identitas kolektif yang perlu dicari bersama, sebagai ‘satu kelompok etnis’. Sedangkan *Jawa Pos* menampilkan aspek esensial lewat ‘memandang’ ke Tiongkok sebagai pusat ketionghoan, namun kedua sisi esensial ini masih dihadapkan dengan wacana-wacana yang lain, yang ‘memecah’ identitas yang satu yang dibayangkan ini.

Harian Nusantara juga menampilkan etnis Tionghoa dalam ‘penampilan yang lebih positif’. Ini ditunjukkan lewat sedikitnya diberitakan kriminalitas oleh etnis Tionghoa. Ia juga berusaha ‘mendidik’ warga Tionghoa untuk terus menjaga sisi positif. *Jawa Pos* lebih menampilkan sisi positif melalui orang-orang Tionghoa tertentu yang memang berjasa bagi masyarakat. Namun sisi negatif yang tampak melalui berita kejahatan oleh etnis Tionghoa juga ditampilkan.

Etnis Tionghoa pada *Harian Nusantara* ditampilkan sebagai etnis yang heterogen, terdiri dari berbagai kelompok dan golongan, namun diharapkan untuk bisa bersatu. Sedangkan dari sudut pandang *Jawa Pos*, etnis Tionghoa lebih ditampilkan secara homogen, sebagai satu identitas Tionghoa. Ini juga terwujud lewat beberapa stereotip mengenai orang Tionghoa yang masih muncul di *Jawa Pos*.

Konsep integrasi dan multikulturalisme dimunculkan dengan kuat di *Harian Nusantara*. Ia dengan tegas menyatakan bahwa etnis Tionghoa adalah salah satu dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki budayanya sendiri. Dengan demikian, sekat antar etnis masih terjaga, dan tidak dihilangkan. Tetapi sebagai bagian dari bangsa Indonesia, mereka bersama etnis yang lain turut mendukung pembangunan bangsa. Sementara *Jawa Pos* lebih condong ke arah ‘pembauran’ dengan menghilangkan sekat etnis (paling tidak dari sisi etnis Tionghoa). Sehingga etnis Tionghoa dikonstruksi sebagai sebuah kelompok etnis dengan sekat yang cair, yang seharusnya ‘berbaur’ dengan kelompok etnis yang lain, dengan lebih mendukung akulturasi budaya, percampuran budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Namun secara keseluruhan, negosiasi pada sekat ini tentunya terus berlangsung di antara wacana-wacana yang berkaitan.

Sebagai warga negara Indonesia, etnis Tionghoa oleh *Harian Nusantara* dikonstruksikan sebagai warga negara Indonesia yang sebenar-benarnya, yang memiliki hak dan pengakuan yang sama dengan etnis yang lain. Dengan demikian ia menolak tegas diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Rasa cinta tanah air juga digambarkan secara cukup konsisten melalui banyaknya pemberitaan seputar peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Sedangkan *Jawa Pos* cenderung ‘memperlunak’ sejarah diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa di masa lalu. Sehingga tuntutan kesamaan hak sebagai warga negara mungkin terkesan menjadi tidak terlalu urgen. Semangat nasionalisme etnis Tionghoa juga tidak terlalu ditonjolkan.

Stereotip terhadap etnis Tionghoa masih muncul, terutama di *Jawa Pos*. Etnis Tionghoa masih digambarkan sebagai kalangan ekonomi kuat, dikonstruksi berdasarkan penampilan fisik atau ras biologis, dan diragukan nasionalismenya. Walaupun demikian, di masa kini seiring dengan makin banyaknya tokoh etnis Tionghoa yang berkecimpung di pemerintahan, stereotip ini berangsur berkurang. Kedua surat kabar turut mendobrak stereotip bahwa etnis Tionghoa hanya mengejar keuntungan finansial, berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Dengan ditampilkannya berbagai tokoh Tionghoa dengan beragam profesi, stereotip ini lambat laun dikikis.

Dari perbedaan sudut pandang ‘kita’ Tionghoa dalam *Harian Nusantara* dan ‘mereka’ Tionghoa dalam *Jawa Pos*, beberapa hal berikut ini ditemukan dalam dinamika ‘kita’ dan ‘mereka’ ini. Pertama, adanya kesadaran atas sub etnis, atas keragaman di dalam etnis, yang lebih kuat pada internal kelompok etnis itu sendiri, dan cenderung lebih lemah atau tidak terlihat dari sudut pandang eksternal kelompok. Sedangkan di dalam internal kelompok etnis Tionghoa sendiri, lebih mengakui wacana ketionghoan menurut versi mereka sendiri, yang sebenarnya juga homogen esensial. Kedua, kesadaran sebagai bagian dari diaspora Tionghoa di seluruh dunia, ikut membentuk ketionghoan yang dipersepsi oleh internal kelompok etnis Tionghoa. Sedangkan dari sisi eksternal kelompok etnis, lebih cenderung melakukan stereotipikasi yang menghasilkan ketionghoan yang tunggal. Ketiga, dalam internal etnis Tionghoa sendiri, pelintasan sekat ternyata tidak diusahakan secara aktif, tetapi sekat itu justru ditegaskan. Dari eksternal kelompok, sekat ini kadang hendak dihilangkan, namun kadang juga masih dipertahankan dengan adanya berbagai stereotipikasi yang masih berlangsung.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, diketahui bahwa ketionghoan esensial ternyata masih direproduksi terus-menerus, Tionghoa masih dipandang sebagai entitas homogen oleh

sebagian elemen bangsa, masih adanya benturan wacana akulturasi serta integrasi multikultural, dan pengaruh identitas Tionghoa global yang menciptakan identitas hibrid. Keempat hal ini membawa kita kepada tantangan yang akan dihadapi dalam masalah ketionghoan di Indonesia di masa depan. Tidak dapat kita katakan dengan pasti apakah etnis Tionghoa akan semakin melebur ke dalam bangsa Indonesia, pun kita tidak bisa memperkirakan dengan yakin apakah esensialisme akan bertumbuh semakin subur dan kuat, di tengah-tengah globalisasi yang juga terus memberikan pengaruhnya. Maka penelitian lebih lanjut yang perlu dilakukan adalah menjelajah lebih dalam lagi pada aspek-aspek tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, media massa mendapatkan bahan pertimbangan lebih komprehensif mengenai bagaimana mereka menampilkan ketionghoan di dalam produksi teks. Pengakuan atas beragamnya ketionghoan akan menjadi sebuah langkah awal untuk mengurangi esensialisme yang eksklusif dan usaha-usaha reifikasi. Negosiasi antara wacana akulturasi dan wacana integrasi multikultural dalam dinamika sekat antar etnis juga menjadi pertimbangan bagi redaksi media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*: Verso.
- Ang, I. (1998). Can One Say No to Chineseness? Pushing the Limits of the Diasporic Paradigm. *boundary 2*, 25(3), 20.
- Bailey, O. G., Georgiou, M., & Harindranath, R. (2007). *Transnational Lives and the Media: Re-Imagining Diasporas*: Palgrave Macmillan.
- Barker, C. (2012). *Cultural Studies: Theory and Practice* (4 ed.). London: SAGE.
- Berger, A. A. (2000). *Media and communication research methods : an introduction to qualitative and quantitative approaches / Arthur Asa Berger*. Thousand Oaks, Calif. :: Sage Publications.
- Budiman, A. (2001). Rethinking Ethnicity and Nationalism: Anti-Chinese and Anti-Australian Sentiment in Indonesia. *Indonesia. The Uncertain Transition*, Crawford House Publishing Pty. Ltd., Adelaide, 264-291.
- Chan, W. T. (2008). *A Source Book in Chinese Philosophy*: Princeton University Press.
- Chua, C. (2004). Defining Indonesian Chineseness Under the New Order. *Journal of Contemporary Asia*, 34(4), 465-479.
- Chun, A. (1996). Fuck Chineseness: On the ambiguities of ethnicity as culture as identity. *boundary 2*, 111-138.
- Coppel, C. (1994). *Tionghoa Indonesia dalam krisis*: Pustaka Sinar Harapan.
- Coppel, C. A. (1976). Patterns of Chinese political activity in Indonesia. *The Chinese in Indonesia: Five Essays*, 19-76.
- Coppel, C. A. (2004). Historical impediments to the acceptance of ethnic Chinese in a multicultural Indonesia. *Chinese Indonesians: State Policies, Monoculture, and Multiculture*, 17-28.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*: SAGE Publications.
- Dawis, A. (2009). *Orang Indonesia Tionghoa: Mencari Identitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dawis, A. (2010). Orang Tionghoa Berorganisasi - Yang Kini Lanjutan Dari Masa Lalu? Dalam I. Wibowo & J. L. Thung (Eds.), *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Fairclough, N. (1993). *Discourse and Social Change*: Wiley.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*: Routledge.
- Fairclough, N. (1997). *Media Discourse*: Arnold.
- Foulcher, K. (2000). Sumpah Pemuda: The making and meaning of a symbol of Indonesian nationhood. *Asian Studies Review*, 24(3), 377-410.
- Freedman, A. (2003). Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia. *Asian Ethnicity*, 4(3), 439-452. doi: 10.1080/1343900032000117259
- Georgiou, M. (2006). *Diaspora, identity and the media: diasporic transnationalism and mediated spatialities*. Cresskill, N.J.: Hampton Press.
- Greif, S. W. (1988). *Indonesians of Chinese Origin: Assimilation and the Goal of "one Nation-one People"*: Professors World Peace Academy New York.
- Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. Dalam J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.
- Hall, S. (1992). The Question of Cultural Identity. Dalam S. Hall, D. Held & T. McGrew (Eds.), *Modernity and its Futures*. Cambridge: Polity Press and Blackwell for The Open University.

- Hall, S. (1996a). New ethnicities. *Stuart Hall: Critical dialogues in cultural studies*, 441-449.
- Hall, S. (1996b). On postmodernism and articulation. Dalam D. Morley & K.-H. Chen (Eds.), *Critical dialogues in cultural studies*. London: Routledge.
- Hall, S. (1996c). Who Needs 'Identity'? Dalam S. Hall & P. d. Gay (Eds.), *Questions on Cultural Identity*. London: SAGE Publications Ltd.
- Hall, S. (1997a). The Spectacle of The 'Other'. Dalam S. Hall (Ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: SAGE Publications.
- Hall, S. (1997b). The Work of Representation. Dalam S. Hall (Ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: SAGE Publications.
- Heryanto, A. (1999). Rape, race and reporting. *Reformasi: crisis and change in Indonesia*, 299-334.
- Holliday, A. (2010). Complexity in cultural identity. *Language and Intercultural Communication*, 10(2), 165-177. doi: 10.1080/14708470903267384
- Hoon, C. Y. (2012). Identitas Tionghoa Pasca Suharto: Budaya, Politik dan Media [Chinese Identity in Post-Suharto Indonesia: Culture, Politics and Media].
- Huang, S. (2007). *Yinni Huawen Meiti Jianfu Licu Shehui Hexie Zhongren*. Paper presented at the Di Si Jie Shijie Huawen Meiti Luntan, Chengdu, China.
- Iskan, D. (2009, 27 Januari 2009). Tionghoa, Dulu dan Sekarang (2-Habis) Tionghoa Bersambut, Bagaimana Yin Ni Hua Ren?, *Jawa Pos*.
- JEFFRES, L. W. (2000). Ethnicity and Ethnic Media Use: A Panel Study. *Communication Research*, 27(4), 496-535. doi: 10.1177/009365000027004004
- Jørgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse analysis as theory and method*: Sage.
- Kaboel, Assa R., N. M. S. (2010). Bahasa Mandarin Di Mana-Mana: Studi Kasus Wilayah Jakarta. Dalam T. J. L. I. Wibowo (Ed.), *Setelah Air Mata Kering*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Karim, K. H. (2003). *The Media of Diaspora*: Routledge.
- Levo-Henriksson, R. (2007). *Media and Ethnic Identity: Hopi Views on Media, Identity, and Communication*: Taylor & Francis Group.
- Li, D. (1993). *Contrastive discourse in English and Cantonese news stories : a preliminary analysis of newspaper, radio, and television versions of the Lan Kwai Fong new year's news story*. Hong Kong: City Polytechnic of Hong Kong.
- Li, Z. (2011). *Yinni Huawen Baokan de Jiyu yu Tiaozhan*. Paper presented at the Di Liu Jie Shijie Huawen Chuanmei Luntan, Chongqing, China.
- Lindsey, T. (2005). Reconstituting the ethnic Chinese in post-Soeharto Indonesia: Law, racial discrimination, and reform. *Chinese Indonesians: remembering, distorting, forgetting*, 57.
- Lu, R. (2009). 21 Shiji de Yinni Huawen Bao Ye yu Huawen Jiaoyu, *Huawen Wenxue. Overseas Chinese Journal of Bagui*(4), 4.
- Lu, R. (2010). 21 Shiji de Yinni Huawen Bao Ye yu Huawen Wenxue. *Guoji Xinwen Jie*(3), 2.
- Luo, H., & Gao, H. (2005). Yinni Huawen Meiti de Lishi, Xianzhuang ji Qianjing. *Shanghai Journalism Review*, 4.
- Mackie, J. (2001). Introduction to Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese, ed (Edisi ed.): Anthony Reid, xii—xxx. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Mayo, M. (2001). *Cultures, Communities, Identities: Cultural Strategies for Participation and Empowerment*: Palgrave Macmillan.

- Nagel, J. (1994). Constructing Ethnicity: Creating and Recreating Ethnic Identity and Culture. *Social Problems*, 41(1), 152-176. doi: 10.2307/3096847
- Pattiradjawane, R. L. (2000). Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia. *Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, 213-252.
- Prasetyo, S. A. (2010). Adakah Media untuk Keturunan Tionghoa? Dalam I. Wibowo & T. J. Lan (Eds.), *Setelah Air Mata Kering* (pp. 166-183). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996-1999*: NUS Press.
- Sai, S.-M. (2010). PUGILISTS FROM THE MOUNTAINS: HISTORY, MEMORY, AND THE MAKING OF THE CHINESE-EDUCATED GENERATION IN POST-1998 INDONESIA. *Indonesia*(89), 149-178,218.
- Salmon, C. (1996). Ancestral Halls, Funeral Associations, and Attempts at Resinicization in Nineteenth-Century Netherlands India. *Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese*, 197-198.
- Setyautama, S., & Mihardja, S. (2008). *Tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia*: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Chen Xingchu Foundation.
- Shi, Y. (2005). Identity construction of the Chinese diaspora, ethnic media use, community formation, and the possibility of social activism. *Continuum*, 19(1), 55-72.
- Shiraishi, T. (1997). Anti-sinicism in Java's new order. *Essential Outsiders: Chinese and Jews in the Modern Transformation of Southeast Asia and Central Europe*, 187-207.
- Suryadinata, L. (2001). Chinese Politics in Post-Suharto's Indonesia. Beyond the Ethnic Approach? *Asian Survey*, 41(3), 502-524.
- Suryadinata, L. (2004). Indonesian state policy towards ethnic Chinese: From assimilation to multiculturalism. *Chinese Indonesians: State policy, monoculture and multiculturalism*.
- Suryadinata, L. (2010). *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Teng, S. S. What "Chineseness", whose "Chineseness"?: A preliminary assessment of "Sinicisation" in the discussion of culture and ethnicity in postcolonial Singapore.
- Thung, J. L. (2010). Dari "Obyek" Menjadi "Subyek". Dalam I. Wibowo & J. L. Thung (Eds.), *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998* (pp. 1-23). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Toer, P. A. (1998). *Hoakiau di Indonesia*: Garba Budaya.
- Tong, C. K. (2010). *Identity and Ethnic Relations in Southeast Asia*: Springer.
- Tsai, J. L., Chentsova-Dutton, Y., & Wong, Y. (2002). Why and how researchers should study ethnic identity, acculturation, and cultural orientation. *Asian American psychology: The science of lives in context*, 41-65.
- Turner, S., & Allen, P. (2007). Chinese Indonesians in a rapidly changing nation: Pressures of ethnicity and identity. *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1), 112-127. doi: 10.1111/j.1467-8373.2007.00334.x
- Woodward, K. (1997). *Identity and difference* (Vol. 3): Sage.
- Woodward, K. (2002). *Understanding Identity*: Bloomsbury Academic.
- Wu, D. Y.-h. (1991). The construction of Chinese and non-Chinese identities. *Daedalus*, 159-179.
- Yuniartie, M. (2011). Peranan Media Untuk Masyarakat Etnis Tionghoa Setelah Era Reformasi (Studi Kasus: Majalah Suara Baru Tahun 2000-2001). *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, III(01).

- Zhong, T. (2007). *Yinni Huawen Meiti de Shiming*. Paper presented at the Di Si Jie Shijie Huawen Chuanmei Luntan Lunwen Ji, Beijing.
- Zhou, F. (2003). Ethnic Voices Where Do We Belong? 1. *Asian Ethnicity*, 4(3), 453-459. doi: 10.1080/1343900032000117240